

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR DI  
KABUPATEN BULUKUMBA**

Disusun dan diusulkan oleh

MIFTAHUS SA'ADAH

Nomor Stambuk: 105610508814



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR DI  
KABUPATEN BULUKUMBA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

MIFTAHUS SA'ADAH

No Stambuk : 105610508814

Kepada

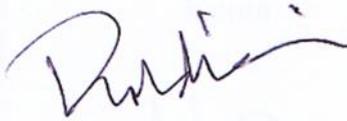
**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Implementasi Kebijakan Kartu Indonesiaia Di  
Kabupaten Bulukumba  
Nama Mahasiswa : Miftahus Sa'adah  
Nomor Stambuk : 105610508814  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

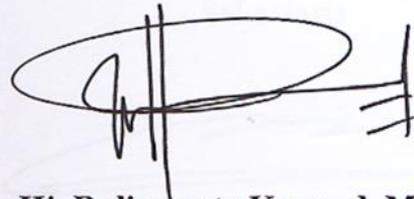
Menyetujui :

Pembimbing I



**Dr. Andi Rosdianti Rasak, M.Si**

Pembimbing II



**Dr. Hj. Rulinawaty Kasmad, M.Si**

Mengetahui :

Dekan

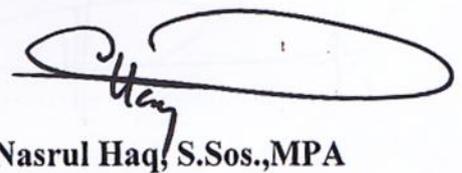
Fisipol Unismuh Makassar



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si**

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



**Nasrul Haq, S.Sos.,MPA**

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1690/FSP/A.1-VIII/X/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Rabu, 17 Oktober 2018.

## TIM PENILAI

**Ketua**



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

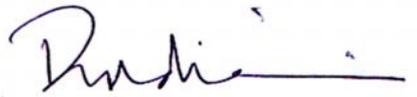
**Sekretaris**



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

**Penguji**

1. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si

  
(.....)

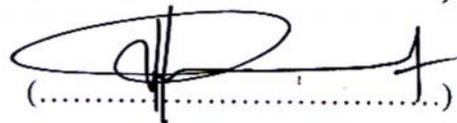
2. Dr. Abd Mahsyar, M.Si

  
(.....)

3. Drs. Alimuddin Said, M.Pd

  
(.....)

4. Dr. Hj. Rulinawaty Kasmad, M.Si

  
(.....)

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Miftahus Sa'adah

Nomor Stambuk : 105610508814

Program studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 17 September

2018

Yang Menyatakan,



Miftahus Sa'adah

Nim: 105610508814

## **ABSTRAK**

### **MIFTAHUS SA'ADAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR DI KABUPATEN BULUKUMBA**

(dibimbing oleh : Rosdianti razak, Rulinawaty Kasmad)

Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Bulukumba, jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yang mana semua data di peroleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian di jelaskan secara deskriptif kualitatif, sedangkan informan dalam penelitian ini sebanyak lima puluh empat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Bulukumba dengan berpedoman kepada undang-undang dan peraturan terkait, namun dalam pelaksanaannya pemberian kartu Indonesia pintar tidak sesuai prosedur dan persyaratan yang telah di tetapkan oleh pemerintah karena belum maksimalnya pembagian kartu Indonesia pintar. adapun upaya yang harus di lakukan oleh pemerintah sehinggah kebijakan kartu Indonesia pintar bisa optimal adalah sebaiknya dinas pendidikan dan sekolah lebih memperhatikan siswa yang berhak mendapatkan kartu Indonesia pintar.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pemerintah, Dinas Pendidikan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dan salawat serta doa tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW umat beliau yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan ajarannya kepada seluruh umatnya. Atas izin dan kehendak Allah SWT skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara fakultasi Ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah Makassar Skripsi ini berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR DI KABUPATEN BULUKUMBA.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini adalah atas izin Allah SWT sebagai pemegang kendali dan penulis sadar bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan rasa hormat penulis kepada :

1. Ibu Dr. Andi Rosdianti Rasak, M.Si selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, coret-coretannya, arahan dan motivasi kepada penulis untuk penyelesaian skripsi.
2. Ibu Dr. Hj. Rulinawaty Kasmad., S.Sos, M.Si selaku pembimbing II dan orang tua kami yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan kritik dan

dorongan serta tak lupa pula memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis selama penyelesaian skripsi.

3. Seluruh pegawai, Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Kepada segenap informan penelitian penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas pendidikan dan kebudayaan, terima kasih juga kepada SMA Negeri 8 Bulukumba, SMP negeri 1 Bulukumba, dan SD 7 Matajam Bulukumba, yang telah memberikan bantuan data dan informasi yang di butuh kanselama proses penelitian skripsi.

Teristimewa kepada Kedua Orang tua tercinta Bapak Sabri Jafar dan Ibu Miraya Rahmi yang telah menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas. Segenap keluarga besar penulis yang selalu percaya bahwa segala sesuatu yang di lakukan degan ikhlas dan tulus akan membuahkan hasil yang indah.

Untuk sahabat terbaikku, Ulfha Suanggita dan Rhezty Amaliah terima kasih atas kebersamaan selama 6 tahun, yang selalu setia menemani penulis dalam proses penelitian dan tidak pernah ada kata lelah dan capek yang keluar dari bibir kalian. Terima kasih untuk senantiasa mendoakan dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan Skripsi.

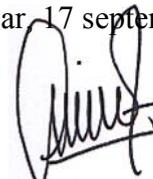
Terima kasih juga untuk sahabatku KELUARGA CEMARA Lady Rezki, Herawati, Irma Rifani, Mita Arnika, Sufairah ilahiah, Sri wahyuni yang selalu memberikan keceriaan, doa, senyuman, dan kekuatan dalam perjuangan

kita. Terspesial untuk Yulil Amri, S.H motivator pribadi, sang calon pendamping wisuda yang tanpa henti memberikan semangat dan dukungan. Nasihat dan saran yang tak henti-hentinya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Untuk Babak Belur Squad terima kasih untuk dukungan dan kerja samanya selama ini dalam hal bimbingan, dalam hal membagi waktu dan terima kasih atas canda tawanya selama proses pengerjaan skripsi, dan semoga kalian tetap semangat dalam penyelesaian skripsi.

Untuk teman seperjuangan saya dari semester 1 sampai akhir (ADN G.014) yang telah memberikan dongan dan semangat Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap skripsinya ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat di jadi kan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan, sehingga penyusunan tak lupa mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini. semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pembaca. Aamiin.

Makassar, 17 september 2018



Miftahus Sa'adah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PENERIMAAN TIM</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perbandingan Peneliti Terdahulu .....	7
B. Kebijakan Publik .....	9
C. Implementasi Kebijakan.....	10
D. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar .....	23
E. Kerangka Pikir.....	36
F. Fokus Penelitian .....	37
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	38

B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	38
C. Sumber Data.....	38
D. Informan Penelitian.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Keabsahan Data.....	41

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Hasil dan Pembahasan.....	53

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	143
B. Saran.....	145

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian terdahulu .....	7
Tabel 2.2 Besaran dana .....	26
Tabel 2.3 jumlah peserta didik di Kabupaten Bulukumba.....	34
Tabel 2.4.jumlah Peserta didik penerima KIP di Kabupaten Bulukumba .....	35
Tabel 2.5 Jumlah penerima KIP di SDN 7, SMPN 1, SMAN 8 Kabupaten Bulukumba .....	35
Table 4.1 Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dirinci menurut kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2014-2015 .....	46
Tabel 4.2 Proses kartu Indonesia pintar .....	56
Tabel 4.3 Mendorong Program KIP .....	63
Table 4.4 Mempengaruhi kebijakan KIP .....	70
Table 4.5 Merangsang target grup untuk melaksanakan KIP .....	76
Tabel 4.6 Menentukan target grup yang berhak mendapat KIP .....	84
Table 4.7 Mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang di diharapkan oleh perumus kebijakan KIP .....	90
Table 4.8 Menyesuaikan pola-pola perilaku pemerintah terhadap kebijakan KI ..	97
Table 4.9 Yang melaksanakan dan yang terlibat dalam kartu Indonesia pintar..	104
Tabel 4.10 Badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar .....	110
Tabel 4.11 Pengaruh eksternal dalam program kartu Indonesia pintar.....	115
tabel 4.12 Lingkungan mempengaruhi dari perspektif budayanya terhadap jalannya kartu Indonesia pintar .....	121
Tabel 4.13 Masyarakat menerima program kartu Indonesia pintar .....	128
Tabel 4.14 Pemerintah memudahkan dan mendukung program kartu Indonesia pintar .....	133
Tabel 4.15 Kartu Indonesia pintar terpengaruh dengan adanya pilkada.....	139

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 model implementasi kebijakan Adam Smith .....	22
Gambar 2.2 Bagan kerangka pikir .....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	49
Gambar 4.2 Struktur Organisasi SMA Negeri 8 Bulukumba .....	51
Gambar 4.3 Struktur organisasi SMP Negeri 1 Bulukumba .....	53
Gambar 4.4 Struktur organisasi SD 7 Matajang .....	55

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Implementasi adalah tahap paling penting dalam administrasi publik karena merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang di ikuti dan di laksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang di perhatikan. Anderson dalam Tachjan (2016:19). Tahap yang penting dalam implementasi kebijakan adalah menentukan apakah kebijakan yang di tempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti telah direncanakan. (Dwiyanto Indiahono, 2016:143).

Pada prinsipnya implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik. (Riant Nugroho, 2016:141).

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik, serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk

menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Suratman (2017:26).

Dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” serta dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Untuk mengimplementasikan pasal 34 ayat 2 UUD 1945, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan yang mengancam anak-anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar, bertujuan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. Instruksi presiden No 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia pintar, dan program Indonesia sehat. Sehingga upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang menghalangi penyelenggaraan pendidikan adalah dengan mengeluarkan Program Indonesia Pintar yang diwujudkan dengan pendistribusian Kartu Indonesia Pintar, (<http://www.sapa.or.id/b1/123-pmk/7722-undang-undang-desa-00000046>).

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan angka partisipasi

pendidikan dasar dan menengah. Adanya kartu Indonesia Pintar mempunyai maksud untuk dapat memutus rantai angka putus sekolah yang masih tinggi di Indonesia. Program Indonesia Pintar ini diwujudkan dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak yang telah terdaftar mengikuti Program Indonesia Pintar atau sebagai penanda anak usia sekolah (6- 21 tahun) dari keluarga tidak mampu mendapat manfaat dari Program Indonesia Pintar. (Desita, 2017)

Program Indonesia Pintar merupakan penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang ditujukan kepada anak usia sekolah untuk membantu biaya keperluan sekolah. Sehingga peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dapat tercukupi kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang proses pendidikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapat layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dan mencegah anak putus sekolah. Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau mereka yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Mereka yang memperoleh KIP berasal dari tingkat SD sampai SMA dan sederajat. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berdasarkan sumber data nasional penerima kartu indonesia pintar (KIP) Tahun 2016 berjumlah 19.547.510 anak.

Untuk wilayah Sulawesi selatan tahun 2015-2016 penerima kartu Indonesia pintar sebanyak 7.000 orang, data yang di ambil berdasarkan dari kartu keluarga sehat

(KKS) penerima manfaat, dengan harapan penerima bantuan tepat sasaran. (<http://m.antarsulses.com/berita/64263>)

Fenomena yang terjadi di salah satunya adalah masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana KIP serta masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana KIP. Padahal pemerintah meluncurkan program ini adalah diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin agar mendapat kesempatan pendidikan yang sama. (Septiani, 2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu sikap masyarakat terhadap pemanfaatan KIP adalah mendukung masyarakat telah menggunakan dana KIP sesuai prosedur yang telah di tetapkan. Sehingga tindakan masyarakat cenderung positif atau mendukung karena dana KIP yang diberikan tepat sasaran atau dalam hal ini benar diberikan kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi (Desita, 2017).

Berdasarkan permasalahan diatas maka, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut diatas dengan melakukan penelitian dengan judul: *implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar di kabupaten bulukumba (Studikasuk kebijakan program kartu Indonesia pintar di bulukumba)*. Penelitian ini menggunakan Model Proses implementasi yang di gunakan oleh Adam Smith. (Suratman:2017:20).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat di angkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana idealized policy dalam implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di kabupaten bulukumba ?
2. Bagaimana target grup dalam berinteraksi pada implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di kabupaten bulukumba ?
3. Bagaimana implementing organization dalam implementasi kartu Indonesia pintar di kabupaten bulukumba?
4. Bagaimana environmental Faktors dalam implementasi kartu Indonesia pintar di kabupaten bulukumba?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti mengangkat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui idealized policy dalam implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di kabupaten bulukumba
2. Untuk mengetahui target grup dalam berinteraksi pada implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di kabupaten bulukumba.
3. Untuk mengetahui implementing organization dalam implementasi kartu Indonesia pintar di kabupaten bulukumba.
4. Untuk mengetahui environmental Faktorsdalam implementasi kartu Indonesia pintar di kabupaten bulukumba

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik teoritis maupun pratikal sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a) Dapat memperluas dan memperkaya wawasan ilmiah, khususnya dalam Ilmu Administrasi.
  - b) Sebagai bahan informasi bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama.
2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dan acuan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya di kabupaten bulukumba.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perbandingan Peneliti Terdahulu

Tabel 2.1 Perbandingan Peneliti Terdahulu

No. Nama	Tahun	Judul Penelitian	Tujuan
Rini Septiani Astuti	2016	Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 Di Smp Negeri 1 Semin	1) membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. 2) untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya.
Triana Desita Sari	2017	Sikap Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (Kip) Di Kampung Lebak Manis Kelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar Lampung	1) Untuk menjelaskan bagaimana sikap masyarakat terhadap pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di kampung Lebak Manis kelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar Lampung.
Agus Setyani Sugiyasari	2017	Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar Di Sma Negeri 11 Kota Yogyakarta	1) Melakukan Pengusulan melalui jalur fraksi masih kurang tepat sasaran dikarenakan latar belakang orangtua peserta didik yang diusulkan adalah Pegawai Negeri Sipil. 2) Adanya pengawasan dari dinas pendidikan untuk pengguna dana KIP.
Sartika	2013	Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Kota Tanjungpinang	1) untuk membantu meringankan biaya personal pendidikan, mencegah agar siswa tidak putus sekolah, serta

			mendorong siswa putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan formal maupun non formal yang Rata-rata mereka berasal dari keluarga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) serta Program Keluarga Harapan (PKH).
--	--	--	---

Peneliti ini mencoba melihat implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di kabupaten bulukumba dengan menggunakan model Smith berfokus pada proses implementasi kebijakan yang bertujuan untuk melihat : *Idealized Policy, Target Grup, Implementing Organization, Environmental Factors*, dalam implementasi kebijakan kartu Indonesia.

## **B. Kebijakan Publik**

Menurut W.I Jenkins (Suratman:2017:11) kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling terkait yang ditetapkan oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada dasarnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor.

Berbeda pendapat dengan Carl J. Friedrich (Suratman:2017:10) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan James E. Anderson

(Suratman:2017:11) kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Adapun menurut George C. Edwards III & Ira Sharkansky (1978:2) dalam Suratman (2017:10) kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Harold D. Lasswell & Abraham Kaplan (1970). "*public policy is a projected program of goals, values and practices*". Nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Maksudnya nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan beberapa definisi diatas tersebut, maka administrasi publik telah diberikan arti yang lebih sekedar pengertiannya yang tradisional. Para ahli administrasi public telah meletakkan fungsi pelaksanaan kebijakan Negara. Kebijakan public adalah "*public policy is whatefer governments coose to do or not to do*" apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Thomas R. Dye, 1972). Pilihan tersebut merupakan sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi social ekonomi, sehingga pilihan berupa hasil-hasil keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu dimaksudkan untuk tujuan-tujuan publik. Pengertian ini sejalan dengan definisi William N. Dunn (1999), yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan-tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Kebijakan adalah setiap hubungan antara lembaga pemerintah dengan

lingkungannya. Kebijakan tidak selalu di wujudkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan tertulis, melainkan juga setiap tindakan pemerintah. Suratman (2017:12).

Mempelajari beberapa konsepsi dan definisi tentang kebijakan publik sebagaimana dikemukakan di atas, maka bertambah luaslah pengetahuan kita tentang kebijakan publik. Sehingga dari definisi tersebut dikemukakan dengan harapan dapat memberikan gambaran betapa kebijakan publik itu memiliki banyak dimensi, sehingga untuk memahaminya diperlukan langkah untuk mengidentifikasi karakteristik dari kebijakan publik itu sendiri. Menurut suratman (2017:12), Beberapa karakteristik kebijakan publik yang dapat didefinisikan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu pemecahan masalah publik (*public problem solving*);
- b. Adanya tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan;
- c. Merupakan fungsi pemerintah sebagai pelayanan publik;

### **C. Implementasi kebijakan**

Implementasi secara etimologis adalah berasal dari bahasa inggris yaitu *implement*. Webster's Dictionary (Suratman:2017:25), *to implement* (mengimplementasikan) berarti *provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Menurut Rulinawaty (2013:2) implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan public. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan.

Menurut Kebijakan publik menurut Thomas R Dye (Mulyadi, 2016:36) adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Berbeda pendapat Howleyt dan Ramesh (Mutiarain dan Arif, 2014:20) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah proses pelaksana program-program atau kebijakan-kebijakan, yang merupakan upaya penerjemahan dari rencana ke dalam praktek.

Adapun menurut Ripley dan Franklin (Winarno, 2012:148) implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang yang ditetapkan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau jenis keluaran yang nyata.

Menurut (Wahab, 2010:68) Implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Kemudian Suratman (2017:26) mengatakan implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik, serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan dan implementasi seringkali digunakan sebagai suatu istilah tunggal tanpa obyek. Sebenarnya, obyek dari kata implementasi adalah kebijakan. Kebijakan harus ada lebih dahulu, baru kemudian menyusul implementasi, dan yang diimplementasikan adalah kebijakan. Pada umumnya implementasi mengikuti teorema formasi dan keputusan tersebut. Sangat jarang di temukan keputusan yang bersifat swalaksana atau *self-executing*.

Melalui pemahaman yang lebih tentang proses implementasi dilakukan secara akurat diharapkan akan dapat dirumuskan rekomendasi yang lebih baik sehingga di masa-masa mendatang implementasi suatu kebijakan akan lebih memiliki peluang untuk berhasil disbanding dengan sebelumnya kemudian Harold Laswell (1956) dalam Erwan agus purwanto dan Dhya Ratih Sulistyastuti (2002:17) sebagai ilmuwan yang pertama kali yang mengembangkan studi tentang kebijakan public, Laswell menggagas suatu pendekatan yang ia sebut sebagai pendekatan proses (*policy process approach*). Menurutnya, agar ilmuwan dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang apa sesungguhnya kebijakan publik, maka kebijakan publik tersebut harus diurai menjadi beberapa bagian sebagai tahapan-tahapan, yaitu :*agenda-setting*,

formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi, dan terminasi. Dari siklus kebijakan tersebut terlihat secara jelas bahwa implementasi hanyalah bagian atau salah satu tahap dari proses besar bagaimana suatu kebijakan public dirumuskan. (Erwan Adan Dhya R:2002:16)

Meskipun Laswell tidak secara khusus memberi penekanan terhadap arti penting implementasi kebijakan dari keseluruhan tahapan yang harus dilalui dalam proses perumusan kebijakan, namun sejak saat itu konsep implementasi kemudian menjadi suatu konsep yang mulai dikenal dalam disiplin ilmu politik, ilmu administrasi publik, dan lebih khusus lagi disiplin ilmu kebijakan publik yang mulai dikembangkan.

Konsep tersebut memiliki posisi yang pivotal untuk menjelaskan fenomena implementasi kebijakan publik. Perkembangan selanjutnya bermunculan pakar yang menaruh perhatian terhadap studi implementasi. Mereka antara lain : Van Horn dan Van Meter (1975), Teilmann (1980), Klein (1979), Berman (1978), dan Patton (1978). Ada Dua konsep pendekatan studi implementasi. Pertama, memahami implementasi sebagai bagian dari proses atau siklus kebijakan (*part of the stage of the policy process*). Implementasi merupakan salah satu tahapan dari serangkaian proses atau siklus suatu kebijakan. Dalam hal ini implementasi dilihat sebagai: "*administration of the law in which various actors, organization, procedures, and techniques work together to put adopted policies into effect in an effort to attain policy or program goals*" (Anderson, 1990:172). Dalam pemahaman ini, implementasi dimaknai sebagai pengelolaan hukum (karena kebijakan telah disahkan dalam bentuk hukum) dengan

mengarakan semua sumber daya yang ada agar kebijakan tersebut mampu mencapai atau mewujudkan tujuannya.

Kedua, implementasi kebijakan dilihat sebagai suatu studi atau sebagai bidang kajian (*field of study*). Perspektif ini tidak dapat di lepaskan dari upaya yang dilakukan oleh para ahli untuk memahami problematika itu sendiri. Implementasi sebagai studi, tentu memiliki berbagai elemen penting, yaitu: *subject matter* (ontologi), cara memahami obyek yang dipelajari (epistemologi), dan rekomendasi tindakan yang diperlukan (aksiologi). Secara kronologis, tahapan-tahapan ilmiah implementasi sebagai suatu studi tersebut adalah:

Menemukan masalah atau fenomena implementasi yang menarik untuk dikaji.

- a. Merumuskan pertanyaan penelitian (*research question*) yang hendak diteliti.
- b. Merumuskan landasan teoritis, konsep, dan variable-variabel penelitian.
- c. Menetapkan metodologi yang hendak dipakai untuk mengumpulkan data.
- d. Mengolah dan menganalisis data.
- e. Rekomendasi kebijakan.

Konsep implementasi juga berkaitan dengan proses penilaian. Penilaian tersebut dilakukan oleh aktor yang terlibat dalam proses implementasi, dan salah satu tugas dasar seorang analis implementasi adalah mengevaluasi proses implementasi dengan mempertimbangkan tujuan dan perangkat terhadap implementasi kebijakan, analisis implementasi tidak bias terbatas hanya dengan pernyataan atau laporan mengenai kondisi setelah proses implementasi. Dan ini merupakan fokus utama paling awal yang perlu di perhatikan dalam analisis implementasi. Sukses atau gagal

bukanlah satu-satunya tolak ukur relevan terhadap implementasi kebijakan publik. Proses pelaksanaan sebuah kebijakan memiliki logikanya sendiri yang sekaligus menjadi fokus selanjutnya yang perlu di perhatikan oleh seorang analis implementasi. Suratman (2017:38).

Aspek-aspek proses implementasi selain pencapaian terhadap tujuan kebijakan yang perlu di perhatikan oleh seorang analis antara lain: strategi dan taktik yang digunakan oleh para pihak dalam implementasi tujuan, mekanisme penanggungan sebagai satu parameter keputusan, keseragaman motif diantara para aktor yang terlibat, dua kebutuhan pembangunan koalisi dan pengaturan tujuan yang hendak dicapai. Implementasi tidak hanya sekedar perkara dimana suatu kebijakan telah memiliki sebuah tujuan dan hasil (bisa jadi beberapa tujuan dan hasil), namun sebagai tambahan, konsep implementasi juga harus memenuhi dua hubungan yang berbeda, yakni: fungsi kausal dan fungsi pemenuhan/pencapaian.

Dua ide fundamental dalam konsep implementasi: bahwa rancangan kebijakan adalah keluaran (*output*) yang memberikan hasil (*outcome*) dengan cara tertentu yang kemudian memenuhi tujuan kebijakan. Penilaian dari proses implementasi berfokus pada pelaksanaan sebuah kebijakan beserta konsekuensi di dalamnya. Ini termasuk tiga aktifitas yang berbeda secara logika.

- a. Penjelasan mengenai tujuan yang dimaksud (fungsi tujuan),
- b. Pernyataan mengenai hubungan antara keluaran dan hasil dalam kerangka efektivitas kausal (fungsi kausal),

- c. Uraian mengenai hubungan antara tujuan dan hasil sebagai upaya untuk menegaskan jangkauan pencapaian tujuan (fungsi pencapaian).

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli diatas, disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu pemahaman apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian, sehingga diketahui hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

Selanjutnya Pressman dan wildavsky dalam (1973) dalam Suratman (2017:79), mengemukakan lima buah model implementasi kebijakan yaitu :

- a. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta, yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan keduanya mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan. Meter dan Horn mengemukakan suatu model yang mencakup enam variable yang membentuk

keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja. Dalam model ini, variable terkait adalah kinerja, yang didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana standar-standar dan tujuan-tujuan kebijakan direalisasikan. Adapun variable-variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja tersebut adalah :

- a) Standar dan tujuan (*standards and objectives*).
- b) Sumber daya (keuangan) (*resources*).
- c) Karakteristik organisasi pelaksana (*characteristics of the implementing agencies*).
- d) Komunikasi antar organisasi dan aktifitas penguatan (*interorganizational communication and enforcement activities*);
- e) Sikap para pelaksana (*disposition of implementers*).
- f) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik (*economic, social, and political conditions*).

b. Model Sabatier dan Mazmanian

Sabatier dan Mazmanian (1979) mengembangkan model control efektif dan pencapaian. Menurutnya pendekatan tahapan-tahapan kebijakan tidak membantu untuk memahami proses pembuatan kebijakan karena pendekatan ini membagi prosesitu menjadi serangkaian bagian yang tidak realistis dan artifisial. Karena itu dari sudut pandang ini implementasi dan pembuatan kebijakan menjadi satu proses yang sama. Sabatier dan Mazmanian mendukung sintesis gagasan teoritis *top-down* dan *botton up* menjadi enam syarat yang

mencakupi dan mesti ada untuk implementasi yang efektif dari tujuan kebijakan yang telah di nyatakan secara legal. Enam syarat yang dimaksud adalah :

- a) Tujuan yang jelas dan konsisten, sehingga dapat menjadi standar evaluasi legal dan sumber daya.
- b) Teori kasual yang memadai, dan memastikan agar kebijakan itu mengandung teori yang akurat tentang bagaimana cara melahirkan perubahan.
- c) Struktur implementasi yang disusun secara legal untuk membantu pihak-pihak yang mengimplementasikan kebijakan dan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.
- d) Para pelaksana implementasi yang ahli dan berkomitmen yang menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan.
- e) Dukungan dari kelompok kepentingan dan “penguasa” di legislatif dan eksekutif.
- f) Perubahan dalam kondisi sosio ekonomi yang tidak melemahkan dukungan kelompok dan penguasa atau tidak meruntuhkan teori kasual yang mendasari kebijakan.

Zabatier dan mazmanian mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variable, yaitu :

1. Variable independen
2. Variable intervening
3. Variable dependen

c. Model Politik- Administratif Grindle

Model Politik- Administratif Grindle (1980) berasumsi bahwa tugas implementasi adalah menetapkan suatu mata rantai yang memungkinkan arah kebijakan umum direalisasikan sebagai suatu hasil dari aktifitas pemerintahan. Dalam hal ini, kebijakan diterjemahkan kedalam program tindakan guna mencapai tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan tersebut. Program tindakan itu sendiri dapat dijabarkan lagi kedalam proyek-proyek spesifik yang mudah dilaksanakan. Kebijakan adalah pernyataan arah, tujuan, dan sarana yang bersifat luas dan umum. Proses implementasi hanya dapat dimulai apabila arah kebijakan umum dan tujuan sudah dinyatakan secara spesifik, program tindakan sudah di desain, dan dana telah dialokasikan untuk pelaksanaannya.

Model implementasi Grindle mencakup dua kelompok factor yang secara potensial dapat menyebabkan implementasi kebijakan berhasil atau gagal, yaitu : muatan kebijakan (*policy content*) dan konteks implementasi. Variabel terkait di dalam model adalah *outcomes* kebijakan namun tetap mempertimbangkan struktur implementasi yaitu dengan mempertanyakan tentang apakah program dan proyek di laksanakan sesuai rencana.

Grindle merumuskan model implementasi sebagai berikut :

- a) Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*interest affected*).
- b) Jenis manfaat yang di hasilkan (*tipe of benefit*).
- c) Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*).

- d) Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*).
- e) Para pelaksana program (*program implementators*).
- f) Sumber daya yang dikerahkan (*resources committed*).

d. Model Edwards III

Model Edwards III (1980) mempertimbangkan empat factor kritis atau variable di dalam mengimplementasikan kebijakan public, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor internal birokrasi ini berpengaruh secara langsung terhadap implementasi, tetapi juga saling tergantung satu dengan yang lainnya. Edwards menilai bahwa masalah utama administrasi public adalah rendahnya perhatian terhadap implementasi. Secara tegas dikatakan bahwa '*without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*'.

Factor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George

C. Edward III sebagai berikut :

- a) Komunikasi
- b) Sumber daya
- c) Disposisi atau sikap
- d) Struktur birokrasi

e. Model Proses atau Alur Dari Smith

Model *botton-up* yang di kemukakan oleh Smith (1973) yang di kutip Putra (2003), memandang implementasi sebagai proses atau alur. Smith

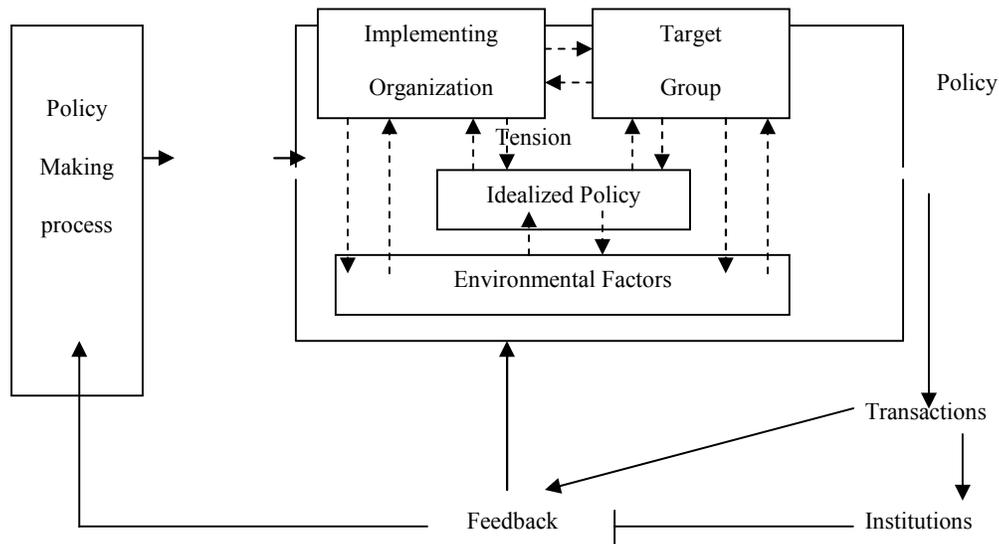
menyatakan bahwa ada empat variabel yang perlu di perhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu :

- a) *Idealized policy*, yaitu suatu pola interaksi yang diidealisasikan oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang *target grup* untuk melaksanakannya.
- b) *Target grup*, yaitu bagian dari *policy stakeholders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang di harapkan oleh perumus kebijakan. Karna mereka ini banyak mendapat pengaruh dari kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilakunya dengan kebijakan yang dirumuskan.
- c) *Implementing organization*, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
- d) *Environmental factors*, yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan (seperti aspek budaya sosial, ekonomi, dan politik).

## Model Implementasi Kebijakan Adam Smith

gambaran lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1 model implementasi kebijakan Adam Smith



Keempat variabel di atas tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbale balik, oleh karena itu sering menimbulkan tekanan (*tension*) bagi terjadinya transaksi atau tawar menawar antara formulator dan implementor kebijakan.

Smith menggunakan model teoritisnya dalam bentuk system dimana suatu kebijakan sedang diimplementasikan, maka interaksi di dalam dan di antara keempat faktor tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian dan akan menimbulkan tekanan atau ketegangan. Ketidaksesuaian, ketegangan dan tekanan-tekanan tersebut menghasilkan pola-pola interaksi, yaitu pola-pola yang tidak tetap yang berkaitan dengan tujuan dari suatu kebijakan.

#### **D. Kebijakan kartu Indonesia pintar**

Di Indonesia saat ini ada program yang di laksanakan pemerintah untuk siswa kurang mampu/miskin yang bertujuan untuk mengurangi anak putus sekolah yaitu kartu Indonesia pintar . adanya buku pedoman yang di keluarkan pemerintah sebagai pelaksanaan kartu Indonesia pintar di harapkan mampu memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pengertian kartu Indonesia pintar bagaimana landasan hukumnya, tujuan dari kebijakan kartu indonesia pintar, sasarannya, berapa jumlah besaran dana, sumber dana dari program Kartu Indonesia Pintar, bagaimana pemanfaatan dana untuk siswa, seperti apa mekanisme penetapan dan penyaluran Kartu Indonesia Pintar, bagaimana mekanisme pengambilan Kartu Indonesia Pintar, dan apa saja tugas dan tanggung jawab sekolah.

##### **1. Pengertian**

Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar adalah di pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima Kartu Indonesia Pintar, atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 19 tahun 2016 program indonesia pintar bahwa Program Indonesia Pintar merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan

menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Dalam pasal 1 menyebutkan Program Indonesia Pintar, untuk selanjutnya disebut Program Indonesia Pintar, adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kartu Indonesia Pintar, untuk selanjutnya disebut Kartu Indonesia Pintar, adalah kartu yang diberikan kepada anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun sebagai penanda/identitas untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar.

## **2. Dasar Hukum**

Pelaksanaan kebijakan kartu Indonesia pintar No. 19 Tahun 2016 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

## **3. Tujuan**

Program Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional (tercantum dalam RPJMN 2015-2019) yang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.
- b. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.
- c. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah.
- d. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

#### **4. Sasaran**

Program Indonesia Pintar adalah anak berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan :

- a. Penerima BSM 2014 Pemegang KPS;
- b. Siswa/anak dari keluarga pemegang KPS/ KKS/ KIP yang belum menerima BSM 2014;
- c. Siswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) non KPS;
- d. Siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari Panti Sosial/Panti Asuhan;
- e. Siswa/anak yang terkena dampak bencana alam;
- f. Anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang tidak bersekolah (*dro-out*) yang diharapkan kembali bersekolah;

- g. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang belum atau tidak lagi bersekolah yang datanya telah direkapitulasi pada Semester 2 (TA) 2014/2015.

## 5. Besaran dana

Sasaran BSM/KIP 2015 adalah sebanyak 17.920.270 peserta didik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2 besaran dana

<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Sasaran BSM/PIP</b>
SD/Paket A	10.470.610
SD/Paket B	4.249.607
SD/Paket C	1.353.515
SMK/Kursus dan Pelatihan	1.846.538
Jumlah	17.920.270

Besaran danaKartu Indonesia Pintar diberikan per peserta didik dari masing-masing direktorat teknis, adalah sebagai berikut:

- a. Sekolah Dasar (SD) / Paket A:
  - a) Peserta didik kelas I,II,III,IV dan V Tahun Pelajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp. 450.000,-;
  - b) Peserta didik kelas VI tahun Pelajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 225.000,-;
  - c) Peserta didik kelas I tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 225.000,-;
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Paket B:

- a) Peserta didik kelas VII dan VIII Tahun Pelajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp. 750.000,-;
  - b) Peserta didik kelas IX Tahun Pelajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 375.000,-;
  - c) Peserta didik kelas VII Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 375.000,-;
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Paket C:
- a) Peserta didik kelas X,XI dan XII Tahun Pelajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp. 1.000.000,-;
  - b) Peserta didik kelas XII Tahun Pelajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 500.000,-;
  - c) Peserta didik kelas X Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 500.000,-;
- d. Sekolah Menengah Kejuruan(SMK):
- Program 3 Tahun
- a) Peserta didik SMK kelas X dan XI Tahun Pelajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp. 1.000.000,-;
  - b) Peserta didik SMK kelas XII Tahun Pelajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 500.000,-;
  - c) Peserta didik SMK kelas X Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 500.000,-;

## **6. Sumber dana**

Cakupan program Kartu Indonesia Pintar dalam NK-RAPBNP 2015 akan menjangkau 19,2 juta siswa, meningkat hampir 10 juta siswa dari rencana dalam APBN 2015 (BSM). Konsekuensi penambahan cakupan siswa tersebut adalah adanya tambahan alokasi sebesar Rp.7,1 triliun dalam NK RAPBNP 2015 yang dialokasikan untuk penambahan 40 cakupan penerima serta biaya cetak kartu leaflet dan biaya pengiriman Kartu Indonesia Pintar, sehingga total besaran anggaran Kartu Indonesia Pintar dalam RAPBN-P 2015 sebesar ±12,9 triliun.

#### **7. Pemanfaatan dana**

Program Kartu Indonesia Pintar ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada siswa dengan untuk pemanfaatan sebagai berikut:

- a. Pembelian buku dan alat tulis sekolah
- b. Pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll)
- c. Biaya transportasi ke sekolah
- d. Uang saku siswa/ iuran bulanan siswa
- e. Biaya kursus/les tambahan
- f. Keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah/madrasah

#### **8. Mekanisme penetapan dan Penyaluran Kartu Indonesia Pintar(KIP)**

- a. Mekanisme Penetapan

Penetapan penerima danaKartu Indonesia Pintar 2015 dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a) Direktorat teknis menerima usulan calon siswa penerima Kartu Indonesia Pintar dari dinas pendidikan kabupaten/kota/pemangku kepentingan.
- b) Direktorat teknis menetapkan siswa penerima Kartu Indonesia Pintar yang berasal dari usulan sekolah yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dan usulan dari pemangku kepentingan dalam bentuk surat keputusan (SK) direktur teknis yang bersangkutan. Untuk usulan SMK yang berada dibawah binaan propinsi, pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
- c) Siswa SMK penerima Kartu Indonesia Pintar yang menempuh studi keahlian kelompok pertanian (agrobisnis dan agroteknologi), perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman yang ada dalam aplikasi dapodik dapat langsung ditetapkan sebagai penerima PIP sepanjang alokasi terpenuhi.
- d) Untuk peserta paket A/B/C, penetapan penerima ProgramIndonesia Pintar dilakukan oleh Direktorat PSD,PSMP,PSMA setelah menerima surat keputusan penetapan penerima ProgramIndonesia Pintar dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemendikbud.
- e) Untuk peserta balai latihan kerja penetapan penerima Kartu Indonesia Pintar dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK setelah menerima surat keputusan penetapan penerima Kartu Indonesia Pintar dari Direktorat Bina

Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

b. Mekanisme penyaluran

Dana BSM/KIP 2015 disalurkan langsung ke peserta didik penerima melalui mekanisme sebagai berikut: Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima Kartu Indonesia Pintar 2015 yang tercantum dalam surat keputusan direktur ke lembaga penyalur untuk dibuatkan rekening; Direktorat teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan surat keputusan direktur; KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di lembaga penyalur; Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2N) kepada lembaga penyalur untuk menyalurkan/memindahbukukan dana dari rekening penyalur langsung ke rekening penerima. Teknis penyaluran dana diatur dalam perjanjian kerjasama antara direktorat teknis dan lembaga penyalur; Direktorat teknis menginformasikan daftar siswa penerima kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan surat keputusan penerima; peserta didik mengambil/mencairkan dana KIP di lembaga penyalur. Penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar 2015 kepada penerima dilakukan melalui Tabunganku atau virtual account.

## 9. Mekanisme pengambilan Kartu Indonesia Pintar ( KIP )

Pengambilan/pencairan dana Kartu Indonesia Pintar 2015 dilakukan oleh peserta didik di lembaga penyalur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SD/ Paket A :
  - a) Surat keterangan kepala sekolah/ ketua lembaga.
  - b) Foto copy lembar rapor yang berisi biodata. lengkap dengan nama sekolah, NPSN dan NISN.
  - c) KTP orang tua/wali.
- b. SMP/Paket B :
  - a) Surat keterangan kepala sekolah/ ketua lembaga.
  - b) Foto copy lembar rapor yang berisi biodata lengkap dengan nama sekolah, NPSN dan NISN
  - c) KTP orang tua/wali
- c. SMA/Paket C :
  - a) Surat keterangan kepala sekolah/ ketua lembaga.
  - b) Kartu pelajar atau identitas pribadi (antara lain KTP/Kartu Keluarga/surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah).
  - c) KTP/Kartu Keluarga orang tua/wali bagi peserta didik yang belum memiliki KTP.
- d. SMK/Kursus dan Pelatihan
  - a) Surat keterangan kepala sekolah/ ketua lembaga.
  - b) Foto Copy lembar rapor yang berisi biodata lengkap.

- c) KTP peserta didik atau KTP orang tua/wali bagi siswa yang belum memiliki KTP.

Khusus peserta didik Paket A/B tidak diwajibkan membawa dokumen biodata yang berisi NISN, menandatangani bukti penerimaan dana Program Indonesia Pintar 2015 yang disediakan oleh lembaga penyalur, untuk siswa SD, SMP, dan SMK yang belum memiliki KTP, pengambilan dana beberapa peserta didik harus didampingi minimal satu orang guru/orang tua/wali, bagi penerima Kartu Indonesia Pintar yang menggunakan TabunganKu hanyadapat dicairkan oleh bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertulis pada buku tabungan, serta bagi penerima Kartu Indonesia Pintar yang menggunakan virtual account dan berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke lembaga penyalur (tidak ada kantor lembaga penyalur di kecamatan sekolah/tempat tinggal peserta didik sedangkan biaya transport pengambilan lebih besar dari bantuan yang akan diterima), maka pengambilan danaKartu Indonesia Pintar2015 dapat diambil secara kolektif dengan dikuasakan kepada kepala sekolah/kepala lembaga pendidikan atau bendahara sekolah/bendahara lembaga pendidikan dengan syarat/ketentuan pengambilan kolektif sebagai berikut:

1. Surat kuasa kolektif dari orang tua siswa penerima Kartu Indonesia Pintar 2015 dengan melampirkan dokumen persyaratan pengambilan sesuai ketentuan;

2. Sekolah/lembaga pendidikan menyampaikan surat permohonan pencairan kolektif ke dinas pendidikan kabupaten/kota;
3. Dinas pendidikan kabupaten/kota menerbitkan surat persetujuan pengambilan dana kolektif hanya diberikan kepada sekolah/lembaga pendidikan, tembusan disampaikan kepada direktorat teknis terkait;
4. Kepala sekolah yang telah menerima rekomendasi harus membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pengambilan dana Kartu Indonesia Pintar 2015 secara kolektif yang ditandatangani penerima kuasa bermaterai;
5. Penerima kuasa harus menunjukkan identitas seperti KTP atau SIM asli pada saat pengambilan dana secara kolektif;
6. Surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga;
7. Foto copy halaman biodata raport masing-masing siswa;

Dana yang sudah dicairkan oleh penerima kuasa harus segera diberikan kepada siswa penerima yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan kolektif, dan pelaporan pencairan kolektif dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencairan kolektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Pengambilan dana untuk siswa SD, SMP, dan SMK dapat diambil pada tanggal 5 sampai dengan 24 setiap bulannya; Minimal saldo pada rekening tabungan adalah sebesar Rp.0;

## **10. Peran dan Fungsi Sekolah/Lembaga Pendidikan**

Peran dan Fungsi Sekolah/Lembaga Pendidikan adalah: menseleksi dan mengusulkan siswa calon penerima dana Kartu Indonesia Pintar 2015 dengan pertimbangan siswa berkelainan fisik, siswa korban musibah berkepanjangan, siswa dari orang tua terkena PHK, siswa di daerah konflik sosial, siswa dari keluarga terpidana, siswa dari lembaga penyelenggara pendidikan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), siswa miskin memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara tinggal serumah; menyampaikan informasi kepada siswa penerima bahwa dana Program Indonesia Pintar telah siap diambil; membuat surat keterangan kepala sekolah sebagai persyaratan pengambilan dana oleh siswa di lembaga penyalur; memberikan pengarahan kepada siswa penerima dana Kartu Indonesia Pintar 2015 perihal ketentuan pemanfaatan dana; memantau proses pengambilan/pencairan dana Kartu Indonesia Pintar di lembaga penyalur; Sekolah wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah (6 sampai dengan 21 tahun) yang tidak bersekolah dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP sebagai calon peserta didik/warga belajar untuk diusulkan sebagai calon penerima dana Kartu Indonesia Pintar.

## 11. Jumlah Penerima Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Bulukumba

Tabel 2.3 jumlah peserta didik di Kabupaten Bulukumba

No.	KECAMATAN	SD	SMP	SMA	TOTAL
1.	KEC.GANTARANG	7.250	1.953	735	9.938
2.	KEC. UJUNG BULU	5.831	2.110	2.071	10.012
3.	KEC.BONTOBAHARI	3.088	1.354	1.030	5.472
4.	KEC.BONTOTIRO	2.672	719	923	4.314
5.	KEC.HERLANG	3.103	1.312	822	5.237
6.	KEC.KAJANG	5.395	2.126	1.618	9.139
7.	KEC.BULUKUMPA	5.007	1.752	1.261	8.020
8.	KEC.RILAU ALE	3.731	1.643	1.047	6.421
9.	KEC.KINDANG	3.048	597	464	4.109
10	KEC.UJUNG LOE	5.076	1.497	1.170	7.743
Total		44.201	15.063	11.141	70.405

Jumlah peserta didik di kabupaten Bulukumba tiap kecamatan yang totalnya 70.405 siswa. Yang dimana dari 10 kecamatan, untuk SD total siswa 44.201, SMP total siswanya 15.063, dan SMA total siswanya 11.141.

Tabel 2.4.jumlah Peserta didik penerima KIP di Kabupaten Bulukumba

No.	SEKOLAH	JUMLAH PENERIMA KIP DI KAB.BULUKUMBA
1.	SD	16.818
2.	SMP	7.027
3.	SMA	4.813
Total		28.658

Inilah jumlah siswa yang menerima Kartu Indonesia Pintar di kabupaten bulukumba. Penerima KIP di kabupaten bulukumba untuk SD 16.818 siswa, SMP 7.072 siswa, dan SMA 4.813 siswa. Dan total keseluruhannya yang mendapatkan KIP 28.658 siswa dan Dari total siswa keseluruhan di kabupaten bulukumba tidak semua yang mendapatkan KIP.

Tabel 2.5 Jumlah penerima KIP di SDN 7, SMPN 1, SMAN 8 Kabupaten Bulukumba

No.	Nama Sekolah	Jumlah Siswa		Jumlah Penerima KIP	Jumlah Uang yang di terima
		L	P		
1.	SDN 7	183	177	60 Siswa	Rp.450.000
2.	SMPN 1	551	583	23 Siswa	Rp.750.000
3.	SMAN 8	372	535	77 Siswa	Rp.1.000.000

Di setiap tingkat level sekolah, penerima KIP di SD 7 60 siswa dan jumlah uang di terima Rp.450.000, SMP 1 ada 23 orang jumlah uang di terima Rp.750.000, dan SMA 8 ada 77 siswa menerima uang Rp.1.000.000 per siswa. Inilah Jumlah penerima KIP di kabupaten bulukumba khususnya di SDN 7 Matajang, SMPN 1, SMAN 8.

#### E. Kerangka pikir

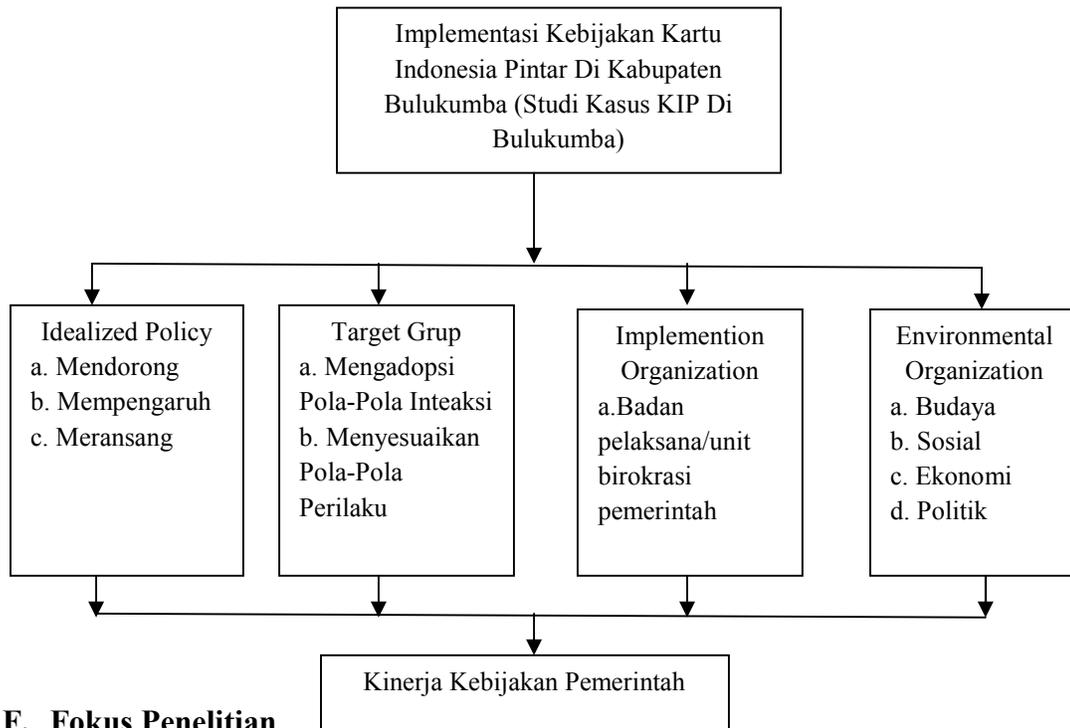
Di kabupaten Bulukumba telah melaksanakan kebijakan kartu Indonesia pintar. Tujuan dari kebijakan kartu Indonesia pintar ini untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapat layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dan mencegah anak putus sekolah.

Maka peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di kabupaten bulukumba (studi kasus kasus kartu Indonesia pintar di bulukumba). Dengan menggunakan Model Proses atau Alur Dari Smith. Smith menyatakan bahwa ada empat variabel yang perlu di perhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu *Idealized policy*, *Target grup*, *Implementing organization*, *Environmental factors*. Keempat variabel tersebut kemudian di jadikan

acuan peneliti mengenai implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di kabupaten bulukumba (studi kasus kartu Indonesia pintar di bulukumba).

### Bagan Kerangka Pikir(Teori Adam Smith)

Gambar 2.2 Bagan kerangka pikir



#### F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini di lihat dari latar belakang masalah kemudian di rumuskan dalam rumusan masalah di kaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di bulukumba.

#### G. Deskripsi Fokus Penelitian

- a. Dealized policy, yaitu untuk melihat suatu pola interaksi yang diidealisasikan oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong pemerintah dalam pelaksanaan program kartu Indonesia pintar, mempengaruhi kebijakan kartu Indonesia pintar dan meransang *target grup* untuk melaksanakannya.

- b. Target grup, yaitu yaitu bagian dari *policy stakeholders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang di harapkan oleh perumus kebijakan kartu Indonesia pintar. Dan menyesuaikan pola-pola perilaku pemerintah terhadap kebijakan kartu Indonesia pintar.
- c. Implementing organization, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar.
- d. Environmental factors, yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan kartu Indonesia pintarseperti aspek budaya yaitu kebiasaan yang oleh pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan, sosial yaitu hubungan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, ekonomi yaitu dana yang digunakan dalam pelaksanaan program, dan politik yaitu bagaimna suatu program yang dilaksanakan tanpa intrefensi dari suatu golongan dan betul-betul tepat sasaran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan yaitu pada bulan Mei, Juni, Juli. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba karena termasuk kabupaten yang menerima bantuan kartu Indonesia pintar dan diberikan kepada sekolah-sekolah yang mempunyai siswa tidak mampu. Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek penelitian di masing-masing tingkat level sekolah yaitu SD Negeri 7 Matajang kabupaten Bulukumba, SMP Negeri 1 Kabupaten Bulukumba, dan SMA Negeri 8 Kabupaten Bulukumba.

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif agar mendapatkan gambaran umum tentang implementasi kartu Indonesia pintar di kabupaten bulukumba sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Menurut Sugiyono (2009:15).

#### **C. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe deskriptif untuk mendapatkan data kartu Indonesia pintar dan gambaran akurat tentang implementasi yang ada di lapangan dengan menggunakan data dan hasil analisa. Tipe deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil

penelitian tetapi tidak di gunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Menurut Sugiyono (2015:21)

#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informan mengenai data berdasarkan sumbernya, data di gunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

##### a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada sumber data yaitu dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara pada informan untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan kartu Indonesia pintar dari persepsi narasumber atau informan yang dianggap sangat berkompeten dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan.

##### b. Data sekunder

Yaitu data yang berasal dari buku-buku, literature-literatur, dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar dan persepsi informan yang dianggap sangat berkompeten dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.

#### **D. Informan Penelitian**

- a. Dinas Pendidikan
  - a) KASI Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
- b. Kepala sekolah SD, SMP, SMA
- c. Murid SD, SMP, SMA
- d. Orang tua murid SD, SMP, SMA

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Menurut Sugiyono (2013:145-240).

- a. Teknik observasi/pengamatan

Melakukan observasi atau pengamatan terdahulu agar proses penelitian berjalan dengan semestinya.

- a. Teknik interview/wawancara

Melakukan Wawancara dengan adanya pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.

- b. Teknik dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan cara proses pengumpulan data yaitu menurut Miles dan Humberman (1992) dalam Syaeb 2014 yaitu :

### **a. Reduksi Data**

Membuat reduksi data yang meliputi hal-hal pokok yang sesuai dengan penelitian, suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu di perlukan.

### **b. Penyajian Data**

Melakukan Penyajian data dengan sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

### **c. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi**

Setelah data di sajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu di usahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul. Jadi dari data tersebut berusaha di ambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data untuk jawaban atas masalah yang di angkat dalam penelitian.

## **G. Pengabsahan Data**

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:125) Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan Berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono (2012:127) membagi triangulasi kedalam tiga macam, yaitu:

### **a. Triangulasi Sumber**

Melakukan triangulasi sumber dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada.

### **b. Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen.

### **c. Triangulasi Waktu**

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba**

Kabupaten Bulukumba berada di 153 Km dari Makassar Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan terletak di bagian selatan dari jazirah Sulawesi Selatan dengan luas wilayah kabupaten 1.154,67 Km<sup>2</sup> atau 1,85% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang secara kewilayahan Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki gunung bawakaraeng-lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas.

Kabupaten Bulukumba terletak di antara dengan batas-batas yakni :

- a. Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Sinjai
- b. Sebelah Timur berbatasan Teluk Bone dan Pulau Selayar
- c. Sebelah Selatan berbatasan Laut Flores
- d. Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Bantaeng

##### **2. Aspek geografis**

Wilayah Kabupaten Bulukumba memiliki topografi yang bervariasi dari 0 meter hingga di atas 1000 meter dari permukaan laut (dpl) yang dapat di bagi kedalam 3 (tiga) satuan ruang morfologi yaitu :

- a. Morfologi Daratan

Daerah daratan rendah dengan ketinggian antara 0 s.d. 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir yaitu : Kecamatan

Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, dan Kecamatan Herlang.

b. Morfologi Bergelombang

Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s.d. 100 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa, dan Kecamatan Rilau Ale.

c. Morfologi perbukitan

Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke Utara dengan ketinggian 100 s.d. di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

### **3. Kondisi Penduduk**

Pertumbuhan penduduk menjadi prioritas pemerintah saat ini terkait dengan adanya hubungan yang linear antara pertumbuhan penduduk dengan angka kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika pertumbuhan penduduk menjadi modal dalam factor produksi dan semakin bertambahnya akan semakin meningkatkan output, maka kondisi ini menandakan bahwa penduduk memiliki kedudukan sebagai asset. Namun sebaliknya, ketika pertumbuhan penduduk akan semakin menurunkan daya beli individu, maka di katakana penduduk sebagai beban. Hal inilah yang menjadi perhatian baik di daerah maupun di tingkat pusat.

Menurut data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bulukumba pada tahun 2015 memiliki jumlah penduduk mencapai 410.485 jiwa yang berada di 10 (sepuluh) Kecamatan dengan kepadatan penduduk 355 orang per Km<sup>2</sup>, ini berarti mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni tahun 2014 dimana jumlah penduduk sebanyak 405.775 jiwa dengan kepadatan penduduk 353 orang per Km<sup>2</sup>.

Table 4.1 jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dirinci menurut kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2014-2015

No.	Kecamatan	2014	2015
1.	Gantang	73.545	74.061
2.	Ujung Bulu	51.916	52.832
3.	Ujung Loe	40.834	41.114
4.	Bontorobahari	24.848	25.040
5.	Bontotiro	22.237	22.075
6.	Herlang	24.452	24.507
7.	Kajang	48.188	48.411
8.	Bulukumba	51.861	52.059
9.	Rilau Ale	39.174	39.473
10.	Kindang	30.720	30.914
<b>Bulukumba</b>		<b>407.775</b>	<b>410.485</b>

#### 4. Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba adalah SKPD unsur pelaksana teknis pemerintah Kabupaten Bulukumba di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Landasan hukum Dinas Pendidikan telah di tetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 75 Tahun 2016.

a. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Mengacu pada visi dan misi kabupaten bulukumba, visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2010-2014) dan Visi Bupati / Wakil Bupati (2016-2021) pada hakekatnya menekankan kepada “*Pelayanan*”. Dengan demikian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba menetapkan visi dengan rumusan “*TERWUJUDNYA LAYANAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN*” penjelasan dari pokok-pokok visi tersebut adalah :

- a) *Layanan pendidikan dan Kebudayaan*, mengandung makna bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menempatkan posisinya sebagai institusi yang memfasilitasi perkembangan peserta didik secara optimal, sehingga mereka dapat memiliki kesiapan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan pencapaian prestasi serta terpeliharanya kekayaan dan keragaman budaya daerah.
- b) *Merata*, bermakna untuk mengembangkan kebijakan terhadap layanan pendidikan yang dapat menjangkau anak usia sekolah dari semua kalangan untuk mengesep pendidikan yang berkualitas sesuai tuntutan Standar Nasional Pendidikan dan pencapaian prestasi serta minat bakat dalam bidang pendidikan. Pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya daerah serta pengembangan kesenian daerah.
- c) *Berkeadilan*, mengandung makna keberpihakan terhadap masyarakat tanpa memandang status sosial dan kemampuan untuk memperoleh akses

pendidikan yang bermutu seluas-luasnya pada semua jenjang pendidikan sebagai tuntutan untuk memenuhi layanan hak dasar masyarakat tanpa ada pendiskriminasian. Semua masyarakat berhak untuk mendapatkan segala fasilitas dan kemudahan dalam menerima pendidikan. Semua masyarakat berhak mengembangkan minat dan bakat di bidang pendidikan dan kebudayaan.

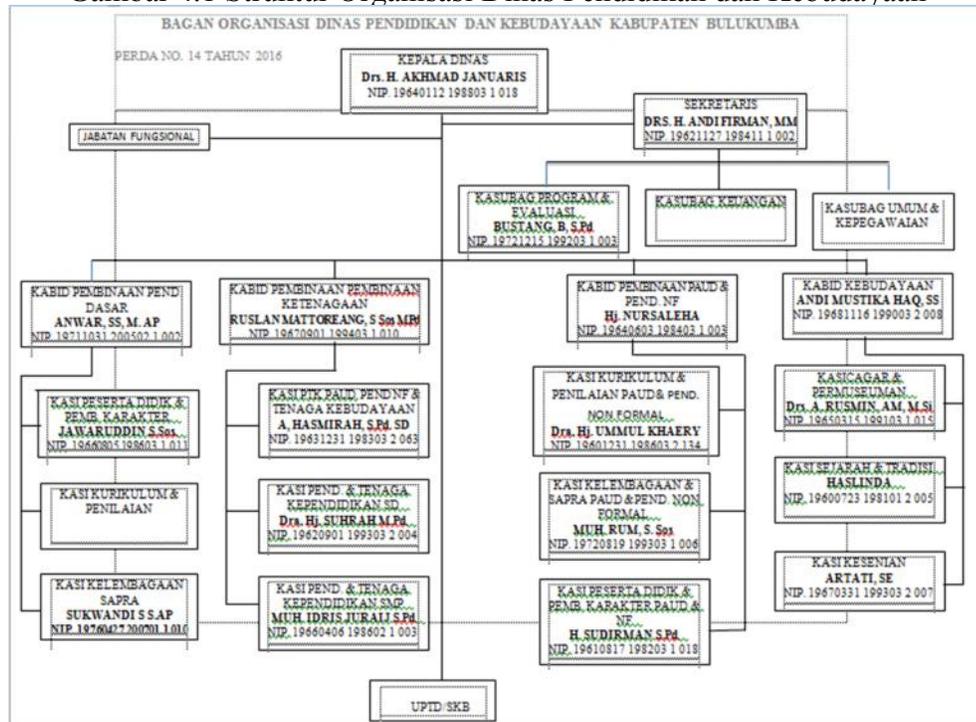
Sejalan dengan Visi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkeyakinan dan berupaya hingga tahun 2021 menghasilkan masyarakat Bulukumba yaitu masyarakat Sejahtera Terdepan dan menjadi salah satu tolak ukur ketercapaian Visi dan Misi Bupati / Wakil Bupati. Oleh karena itu dalam mewujudkan Visi, ditetapkan Misi :

- a) Menetapkan ketuntasan Program Wajib Belajar, Program Pendidikan Universal dan Program Pendidikan Orang Dewasa. (Melek Huruf)
- b) Memfasilitasi Pengembangan Sistem Pembelajaran yang bermakna (Berkualitas dan Berkarakter)
- c) Menyediakan dan Memfasilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan mencapai Standar Nasional Pendidikan.
- d) Memfasilitasi Bantuan Subsidi untuk keterjangkauan Layanan Pendidikan pada Semua Jenjang Pendidikan.
- e) Mengelola Manajemen Pendidikan Secara Akuntabel, Profesional dan Bertanggung Jawab.

- f) Memfasilitasi dan Mendorong pengelola kekayaan dan keragaman budaya daerah serta pengembangan kesenian.

b. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



## 5. SMA Negeri 8 Kabupaten Bulukumba

SMA Negeri 8 Kabupaten Bulukumba adalah Sekolah SMA Negeri yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Bulukumba. Yang terletak di Jl. K.H. Mukhtar Lutfi No.32 Bulukumba, di dirikan pada tahun 1989 luas bangunan 3750 M<sup>2</sup>.

### a. Visi dan Misi SMA Negeri 8 Bulukumba

Visi Sekolah :

Unggul dalam prestasi dan berbudi pekerti luhur berdasarkan imtaq dan iptek yang berwawasan lingkungan.

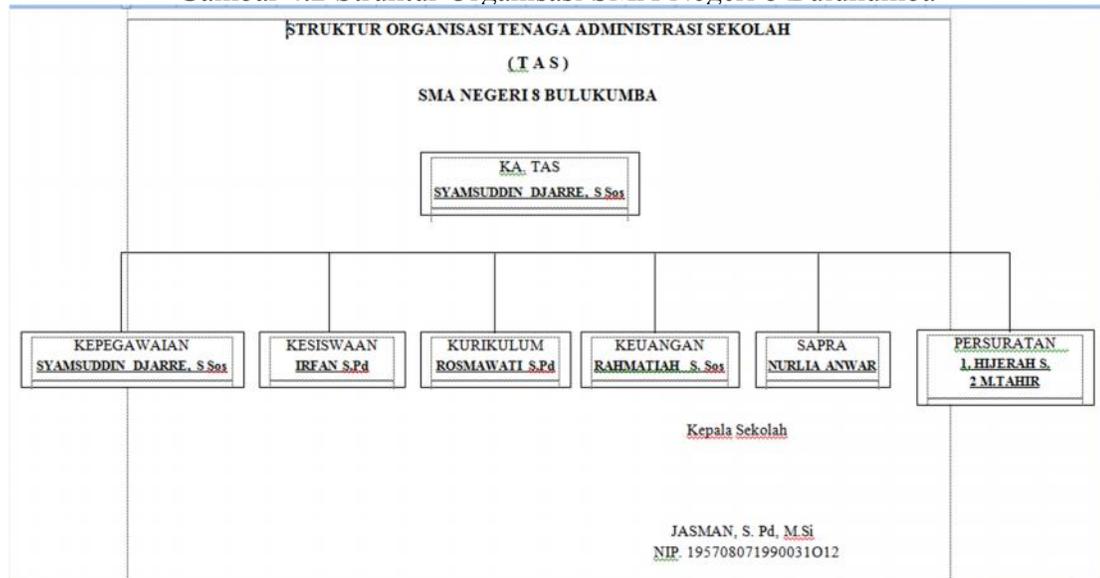
Misi Sekolah :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul melalui penerapan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun).
2. Meningkatkan mutu pendidikan baik akademik maupun non-akademik yang mengintegrasikan sistem nilai, agama dan budaya serta Iptek yang berbasis ICT.
3. Mengembangkan pembinaan keagamaan yang terintegrasi kedalam pembelajaran.
4. Mewujudkan pendidikan dengan lulusan yang berakhlak, kreatif, berprestasi, yang dapat beraing di era global.
5. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di sekolah guna mewujudkan visi sekolah secara optimal.
6. Meningkatkan pembinaan ekstra kurikuler demi pengembangan minat dan bakat peserta didik secara utuh.
7. Menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah dengan wali peserta didik, masyarakat, instansi, dan lembaga terkait dalam rangka pencapaian visi sekolah yang optimal.
8. Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, harmonis, bersih hijau, indah dan nyaman dengan :
  1. Memanfaatkan fungsi lingkungan
  2. Mencegah pencemaran lingkungan

### 3. Mencegah perusakan lingkungan

#### b. Struktur Organisasi SMA Negeri 8 Bulukumba

Gambar 4.2 Struktur Organisasi SMA Negeri 8 Bulukumba



## 6. SMP Negeri 1 Bulukumba

SMP Negeri 1 Bulukumba merupakan salah satu sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Sama dengan SMP pada umumnya di Indonesia masa pendidikan sekolah di SMPN 1 Bulukumba di tempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari kelas VII sampai kelas IX. SMP negeri 1 terletak di jl. Teratai, Caile, Ujung bulu No.5B, Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia. Luas tanah 20.000 M<sup>2</sup>.

#### a. Visi dan Misi SMP Negeri 1 Bulukumba

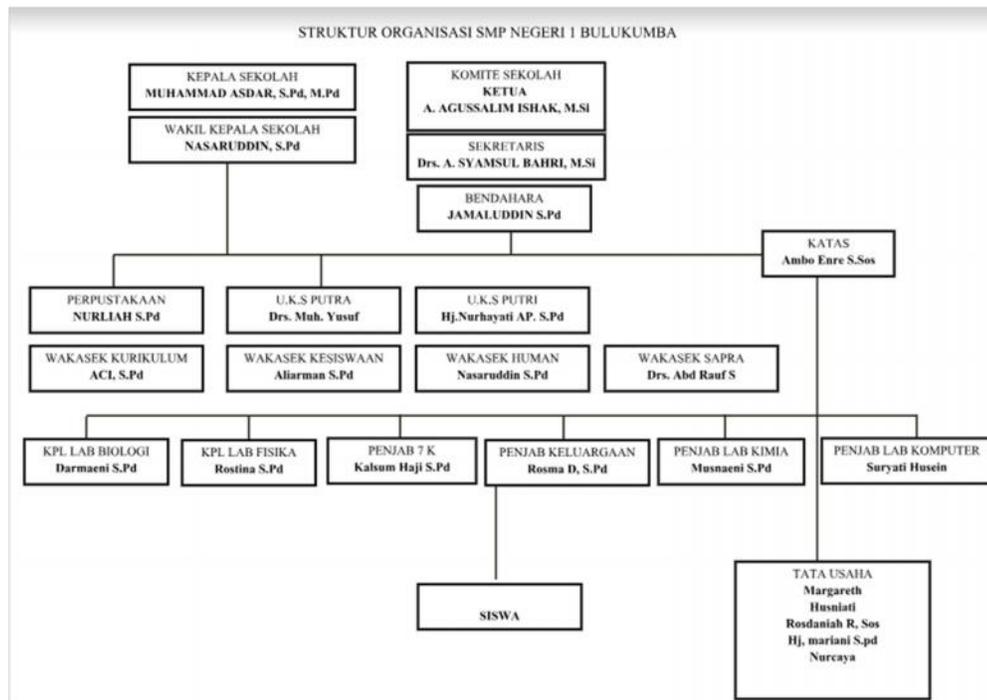
Visi Sekolah :

Unggul dalam mutu, berbudi pekerti luhur dalam bingkai iman dan taqwa serta berwawasan lingkungan sehat.

Misi Sekolah :

1. Menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk mengoptimalkan potensi dan prestasi akademik siswa.
  2. Membantu dan mendorong siswa mengenali diri dalam upaya peningkatan prestasi non akademik.
  3. Mengembangkan sikap dan perilaku seluruh warga sekolah sebagai cermin budi pekerti yang luhur.
  4. Membudayakan kegiatan menciptakan akhlak mulia bagi seluruh warga sekolah.
  5. Meningkatkan dan mengembangkan pengalaman dan nilai-nilai ajaran agama.
  6. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan berwawasan lingkungan menuju terwujudnya green school dan sekolah sehat.
- b. Struktur organisasi SMP Negeri 1 Bulukumba

Gambar 4.3 Struktur organisasi SMP Negeri 1 Bulukumba



## 7. SD Negeri 7 Matajang Kabupaten Bulukumba

SD 7 Matajang Kabupaten Bulukumba merupakan sekolah SD Negeri yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terletak di Jl. Dato Tiro, Ela-Ela, Ujung Bulu.

### a. Visi dan Misi SD 7 Matajang

Visi Sekolah :

Terwujudnya peserta didik yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha ESA, berprestasi, berkarakter, berjiwa sosial dan berbudaya lingkungan.

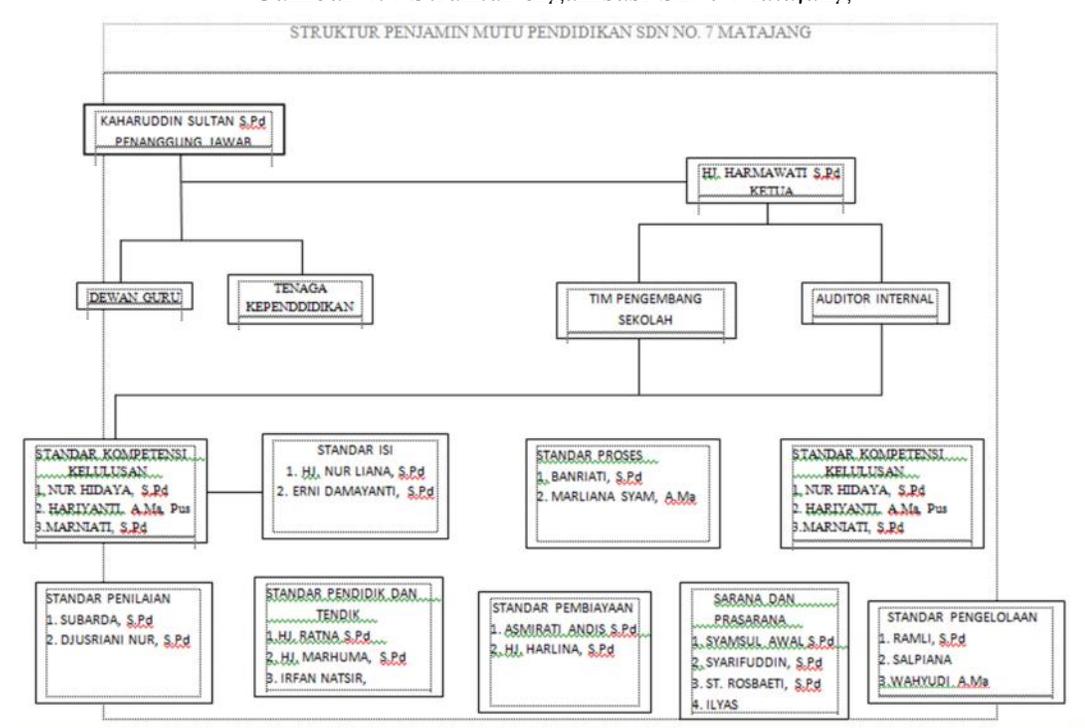
Misi Sekolah :

1. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang di anut sebagai landasan kearifan local dalam bergaul dan bertindak.

2. Melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan untuk mengembangkan potensi keilmuan peserta didik.
3. Mengembangkan kurikulum dengan system pembelajaran yang berkualitas dengan mengacu pada 8 standar pendidikan.
4. Meningkatkan profesionalisme guru dalam menciptakan budaya mutu yang inovatif dan kreatif.
5. Terlaksananya program ekstrakurikuler untuk menghasilkan siswa yang berprestasi dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.
6. Meningkatkan penerapan sikap dan perilaku yang berkarakter kepada seluruh warga sekolah.
7. Menerapkan manajemen berbasis sekolah yang partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan masyarakat.
8. Mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah pencemaran lingkungan dan/atau perusakan lingkungan.

b. Struktur organisasi SD 7 Matajang

Gambar 4.4 Struktur organisasi SD 7 Matajang



## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Idealized Policy

Implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di kabupaten Bulukumba menggunakan model kebijakan Smith yang terdiri dari beberapa indikator salah satunya adalah idealized policy. Idealized policy yaitu untuk melihat suatu pola interaksi yang diidealisasikan oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong pemerintah dalam pelaksanaan program kartu Indonesia pintar, mempengaruhi kebijakan kartu Indonesia pintar dan merangsang target grup untuk melaksanakannya. Untuk menganalisis indikator tersebut, perlu menggambarkan

bagaimana Proses-proses KIP baik pada tataran Pemerintahan maupun pada tataran masyarakat yang menerima program tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2 : Proses kartu Indonesia pintar

No.	Informan	Poses KIP
1.	Dinas Pendidikan	a. Foto copy KPS (Kartu Perlindungan Sosial)
2.	Kepala Sekolah SMA	a. Bukti KIP bagi siswa yang sudah punya b. KPS c. SKTM
3.	Kepala Sekolah SMP	a. Ada nama langsung dari Dinas Pendidikan b. usul berdasarkan KK c. ada pemberitahuan di sekolah d. sekolah bikinkan surat bawa ke BRI di bikinkan rekening e. tunggu proses untuk pencairannya f. siswa bersama orangtuanya mengambil sendiri dananya
4.	Kepala Sekolah SD	a. pendataan pada status sosialnya kita dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6 b. surat keterangan tidak mampu c. kalau tidak ada SKTM ada namanya dulu penerima BSM kan sudah punya keterangan itu tinggal itu di lanjutkan d. memasukkan kedalam sebuah aplikasi namanya aplikasi dapodik e. yang memverifikasi lagi kembali itu adalah dinas pendidikan setelah itu baru di kirim ke pusat f. pusat kembali ke dinas g. dinas itu kita di informasikan lagi bahwa yang ini yang dapat h. diproses menerbitkan kartunya i. KPS
5.	Orangtua SMA	Memasukkan surat keterangan tidak mampu, KPS, fotocopy kartu keluarga, foto copy KTP orangtua, dilihat latar belakang orang tua, pekerjaannya dll.
6.	Orangtua SMP	Orang tua di undang sosialisasi kesekolah, memasukkan fotocopy KK, fotocopy KTP orangtua,

		surat keterangan tidak mampu, KPS.
7.	Orangtua SD	Ada pendataan kerumah orangtua siswa, Memasukkan KPS, surat keterangan tidak mampu, fotocopy kartu keluarga, fotocopy KTP orangtua,
8.	Siswa SMA	Memasukkan KPS, fotocopy KTP orangtua, surat keterangan tidak mampu, fotocopy kartu keluarga, buku rekening BNI.
9.	Siswa SMP	Memasukkan fotocopy kartu keluarga dan fotocopy KTP orangtua, surat keterangan tidak mampu.

Hasil reduksi data 2018

Pada table 4.2 Proses KIP yang di lakukan oleh para informan di atas bisa dilihat dari hasil wawancara di bawah ini, sebagaimana yang di ungkapkan oleh “AY” salah satu orang tua siswa SD 7 matajang, yaitu :

“saya kasi masuk KPS di sekolahnya tidak lama itu di panggilmi adami keluar namanya.(Hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2018)”.

Pendapat yang sama juga di ungkap kan oleh informan “Im” , yaitu :

“pertamanya di mintaki surat keterangan tidak mampu terus di Tanya apa pekerjaan bapaknya, pekerjaan orangtuanya .(Hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2018)”.

Demikian pula yang di katakan oleh informan “Mw”, yaitu :

“dulu ada gurunya kerumah meminta KPS dengan KK karena itu persyaratannya untuk mendapatkan KIP. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.

Hasil wawancara dengan para informan di atas mengemukakan bahwa proses KIP awalnya melalui pendataan. Pendataan awal guru datang ke rumah orangtua siswa dan meminta fotocopy KPS, fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat keterangan tidak mampu untuk di setor di sekolah sebagai syarat untuk menerima

KIP. Selanjutnya pernyataan di perkuat tentang proses KIP di SD 7 “KHS” selaku kepala sekolah, yaitu :

“Kalau prosesnya itu ada pendataan dulu, pendataan pada status sosialnya kita dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6 kita data mana yang siswa kurang mampu itu yang kita data kemudian setelah itu di perintahkan untuk memasukkan surat keterangan tidak mempunya, kalau dia tidak punya surat keterangan kan ada namanya dulu penerima BSM kan sudah punya keterangan itu tinggal itu di lanjutkan kemudian melalui proses itu baru kita memasukkan kedalam sebuah aplikasi namanya aplikasi dapodik ada khususnya di laporkan di pusat baru nanti akan muncul daftar namanya itu yang akan memverifikasi lagi setelah kita menginput dari sini kan, yang memverifikasi lagi kembali itu adalah dinas pendidikan setelah itu baru di kirim ke pusat, pusat kembali ke dinas, dari dinas itu kita di informasikan lagi bahwa yang ini yang dapat. Kemudian diproses menerbitkan kartunya. Bukan cuman penerima BSM yang terima KIP tapi termasuk salah satu yang di prioritaskan kan termasuk siswa miskin sudah..... (Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)”.

Dari ungkapan tersebut bahwa proses Kartu Indonesia Pintar adalah melalui proses pendataan pada status sosialnya. Bagi siswa yang kurang mampu di data kemudian diperintah untuk memasukkan surat keterangan tidak mampu, bagi yang tidak memiliki bisa memasukkan BSM tinggal di lanjutkan.ada sebuah aplikasi namanya aplikasi dapodik, semua nama siswa yang di telah memasukkan berkas di input kedalam aplikasi tersebut, nanti akan muncul daftar nama penerima KIP khususnya di SD 7 matajam Kabupaten Bulukumba. Kemudian diproses penerbitan Kartunya.Penerima KIP bukan hanya siswa yang mempunyai BSM tapi juga yang memiliki KPS, namun di prioritaskan untuk untuk siswa yang status sosial sangat di bawah.kartu Indonesia pintar itu hanya muncul di siswa-siswa tertentu saja.

Adapun proses Kartu Indonesia Pintar di SMP 1 Kabupaten Bulukumba yang di kemukakan oleh salah satu siswa “NVS”, yaitu :

“awalnya ada pendataan baru didataki, setelah itu guruku meminta berkas seperti fotocopy KK, fotocopy KTP orangtua, fotocopy surat keterangan tidak mampu. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2018)”.

Berdasarkan pernyataan tersebut proses penerimaan Kartu Indonesia Pintar awalnya melalui pendataan kerumah siswa untuk melihat latar belakang orang tua, dan juga untuk memastikan bahwa siswa tersebut memang layak untuk menerima bantuan. banyak persyaratan yang harus di penuhi oleh siswa seperti surat keterangan tidak mampu dari kantor Lurah setempat, fotocopy KTP orangtua, dan foto copy Kartu Keluarga, persyaratan ini sebagai identitas bahwa siswa tersebut termasuk golongan masyarakat kurang mampu. Pendapat ini di benarkan oleh salah satu orang tua siswa “NI” yaitu :

“ kebetulan ada surat keterangan tidak mampu ku dari kantor lurah itu sudah lamami, terus di sekolah di mintakimi surat keterangan tidak mampu, Foto copy KTP, dan Foto copy KK selebihnya itu sekolahmi yang uruski dek....(Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2018).

Pernyataan yang sama juga di ungkapkan oleh informan orang tua siswa “Ed” yaitu :

“dulu itu saya di panggil ke sekolahnya untuk sosialisasi tentang KIP kita disuruh bawa itu fotocopy KK, fotocopy KTP. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2018)”.

Hasil wawancara tersebut sekolah mengundang orang tua untuk mensosialisasikan tetang KIP agar orang tua mengerti kegunaan dari KIP. Karena sebenarnya kegunaan KIP tersebut untuk keperluan sekolah siswa seperti perlengkapan mulai dari seragam sekolah, alat tulis, biaya transportasi sekolah, biaya kursus/les tambahan, uang saku siswa. Jadi orangtua harus memahami sasaran dari

KIP. Hal ini di tunjukkan dari hasil wawancara dengan informan dari Kepala Sekolah SMP 1 Kabupaten Bulukumba “MHA” yaitu :

“.....Kalau di SMP 1 itu proses kartu Indonesia pintar disini biasanya ada data dari dinas pendidikan masuk bahwa ini anak-anak yang menerima beasiswa, saya tidak tau apakah ini kartu Indonesia pintar atau kartu siswa yang tidak mampu, itu anak-anak langsung ke Bank BRI saja, anak-anak yang mendapatkan KIP di arahkan ke BRI untuk buka Rekening, buka Rekening sendiri bersama orangtuanya. Alurnya itu dari pusat, ada nama di Dinas Pendidikan, ada pemberitahuan di sekolah, sekolah bikinkan surat bawa ke BRI di bikinkan rekening, tunggu proses untuk pencairannya, siswa bersama orangtuanya mengambil sendiri dananya. (Hasil wawancara pada tanggal 13 Juli 2018)”.

Sebuah fenomena yang menarik dari hasil wawancara dengan kepala sekolah SMP 1 bahwa proses KIP sebenarnya langsung dari dinas pendidikan dan datanya dari pusat. KIP ini seharusnya di tangani langsung oleh kepala sekolah tapi dia bersikap acuh tak acuh terhadap kebijakan KIP ini. setaunya nama penerima KIP langsung namanya muncul di usul berdasarkan kartu keluarganya atau apa sekolah terima data siswa yang terima KIP. Kepala sekolah di seharusnya mengerti dan mau turun tangan terhadap kebijakan ini, jangan karena tidak ada anggaran untuk guru-guru yang mengurus lantas malas untuk mengurusinya.

Selanjutnya proses Kartu Indonesia Pintar di kemukakan oleh informan “Nu” salah satu orang tua siswa di SMA 8 Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“proses penerimaannya, proses terbitnya toh. Kalau anakku itu di mintai keterangan tidak mampu awalnya baru KTP orangtua dengan KK, nah itu baru di usulkan baru di terbitkan SK, seperti itu.(Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.

Senada dengan yang di kemukakan oleh siswa SMA 8 di bulukumba “RSA”

yaitu :

“prosesnya di sekolahku itu kak disuruhki membawa surat keterangan tidak mampu, KPS, dan kartu keluarga sebagai syarat untuk mendapatkan KIP. (Hasil wawancara pada tanggal 24 Agustus 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas proses Kartu Indonesia pintar yaitu persyaratan untuk menerima KIP memang harus ada. Dan tidak semuanya siswa yang memasukkan berkas menerima KIP. Sasaran KIP tersebut hanya siswa yang tidak mampu. Setelah persyaratan di kumpulkan oleh sekolah, maka semua berkas di kirim ke pusat. Siswa tinggal menunggu hasil. Hal ini di sampaikan oleh informan “Sg” selaku orang tua siswa, yaitu :

“awalnya itu ada informasi dari kepala sekolahnya atau guru kelas terus sesudah itu anak yang kurang mampu di kasi bantuan KIP, jadi itu anakku termasuk anak yang tidak mampu. perlengkapannya itu seperti kartu keluarga, pendapatan orangtuanya bagaimana, penghasilannya apakah memang ini termasuk mi itu anakku juga bisa karena pendapatan orangtuanya tidak mencukupi. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2018)”.

Dari ungkapan tersebut proses Kartu Indonesia pintar awalnya sekolah menginformasikan kepada siswa yang berasal dari keluarga yang memang kurang mampu dalam hal pembiayaan pendidikan masih dalam taraf kurang terpenuhi. Semua persyaratan yang di informasikan harus di lengkapi oleh siswa yang kurang mampu agar bisa mendapat kartu Indonesia pintar. Informasi yang lebih keras di kemukakan oleh informan “SYD” selaku kepala sekolah SMA 8 Bulukumba, yaitu :

“peserta didik SMA 8 untuk mendapatkan KIP itu kita tidak tau, cuman kita disini adalah di SMA 8 ini hanya kita meminta bukti KIP atau KPS atau SKTM dari lurah yang itu kita sampaikan kepada anak-anak untuk di usulkan mendapatkan beasiswa di pusat, nah itu. Jadi proses untuk mendapatkan KIP itu bukan dari sini itu KIP adalah di peroleh dari di usulkan oleh lurah atau desa melalui kantor sosial. Jadi untuk di sekolah ini ketika ada penerimaan ada calon penerima siswa baru 2017 toh peserta didik melalui jalur aformasi

maka disitu kita lihat bahwa untuk peserta didik yang mendaftar jalur aformasi..... (Hasil wawancara pada tanggal 2 Juli 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa proses Kartu Indonesia Pintar di SMA 8 Kabupaten Bulukumba itu menyertakan bukti KIP (bagi yang sudah punya) atau KPS atau SKTM dari lurah di sampaikan kepada anak-anak untuk di usulkan mendapatkan beasiswa di pusat. Proses Kartu Indonesia Pintar sebenarnya di peroleh dan di usulkan oleh lurah atau desa melalui kantor sosial. Sekolah SMA 8 hanya menerima data dari pusat bagi penerima kartu Indonesia pintar. Total siswa yang berkasnya dikirim tidak berarti semuanya menerima. Pernyataan yang lebih keras di ungkapkan oleh “JWD” selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembentukan Karakter di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“Kartu Indonesia Pintar itu bermula berasal dari KPS, itu KPS pendataannya di tahun 2011 ada di lakukan pendataan yang di laksanakan oleh BPJS masing-masing kabupaten menghasilkanlah itu KPS namanya, setelah KPS ada di bagikan ke masyarakat penggunaannya itu ada menerima di, pertama di kantor POS perbulan perkeluarga Rp.300.000 , jadi data Kartu Indonesia Pintar berasal dari KPS. KPS itu Kartu Perlindungan Sosial, peruntukannya kemarin itu masyarakat yang mendapatkan itu KPS menerima dana setiap bulannya di kantor pos sebanyak Rp.300.000. setelah itu ada kebijakan peraturan kementerian pendidikan dan kebudayaan yang keluar menyampaikan bahwa masyarakat yang memiliki KPS dan punya anak bersekolah di SD, SMP, SMA/SMK silahkan mendaftarkan KPSnya itu di sekolahnya masing-masing. Contoh “saya punya KPS ada anakku SD 2 orang ada SMP 1 orang ada SMA 1 orang ada di SMK 1 orang, empat-empatnya ini bisa menerima KIP”.....(Hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2018)”.

Jadi dapat di simpulkan dari para informan di atas bahwa proses Kartu Indonesia pintar di Kabupaten Bulukumba tidak sesuai prosedur yang telah di sampaikan oleh dinas pendidikan. Persyaratan yang telah di tetapkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan di lapangan.persyaratan yang di sampaikan oleh kepala sekolah

setiap sekolah tidak sesuai dengan yang di kumpulkan oleh siswa, dan khusus SMA 8 prosesnya langsung dari provinsi tidak lagi melalui dinas pendidikan kabupaten Bulukumba.

a. Mendorong

Mendorong dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar mampu mendorong implementasi kebijakan agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Maka Tabel kedua akan menunjukkan bahwa setiap Informan dalam program KIP tersebut berupaya agar program ini dapat dijalankan sesuai dengan aturan kebijakan. Hal ini bisa dilihat dalam table berikut :

Tabel 4.3 : Mendorong Program KIP

No.	Informan	Mendorong pelaksanaan KIP
1.	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memantau bagi siswa tersebut yang ada SK nya itu kepada pihak sekolah untuk mempercepat pencairan</li> <li>b. interpersni kita di kabupaten tidak ada sama sekali</li> <li>c. yang punya KPS itu yang menerima KIP</li> </ul>
2.	Kepala Sekolah SMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyampaikan kepada peserta didik melalui upacara di sampaikan</li> <li>b. melalui pengumuman-pengumuman tertentu oleh anak-anak</li> <li>c. di sampaikan oleh wali-wali kelasnya</li> <li>d. di data anak-anak peserta didik yang kurang mampu yang punya KPS supaya dapat di kirim kepusat</li> <li>e. jadi anak-anak itu akan mengumpul melalui wali-wali kelasnya</li> </ul>
3.	Kepala Sekolah SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. data anak toh bahwa mungkin di dapodik</li> <li>b. pekerjaan orang tua anak begini sehingga masuk kategori tidak mampu sehingga di usulkan</li> </ul>
4.	Kepala Sekolah SD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan arahan kepada orangtua</li> <li>b. para orangtua apabila ada anaknya yang</li> </ul>

		<p>masih sekolah di sekolah ini dan memiliki KPS yang saya maksudkan silahkan di usul masuk di sini</p> <p>c. kita himbau tujuan perolehan KIP</p>
5.	Orangtua SMA	<p>a. mendata dan mengumpulkan semua berkas siswa yang kurang mampu untuk di kirim k pusat.</p> <p>b. Surat keterangan tidak mampu</p> <p>c. memberikan motivasi kepada anak supaya lebih rajin kesekolah dan giat belajar.</p> <p>d. memotivasi, memfasilitasi siswa untuk mendapatkan KIP.</p>
6.	Orangtua SMP	<p>a. memberikan motivasi kepada orangtua siswa yang tidak mampu</p> <p>b. mendata dari setiap siswa</p> <p>c. mendorong anak-anak rajin belajar</p> <p>d. banyak melakukan kerja sama dengan mengundang orangtua siswa</p>
7.	Orangtua SD	<p>a. mendata kerumah-rumah siswa</p> <p>b. sangat mendorong karena pihak sekolah yang terjun langsung</p>
8.	Siswa SMA	<p>a. peranannya itu sangat bagus karena membantu perekonomian siswa</p> <p>b. mendata semua siswa-siswa yang tidak mampu untuk mendapatkan KIP</p> <p>c. mengurus berkas siswa yang tidak mampu itu untuk di kirim ke pusat</p> <p>d. memberikan fasilitas kepada siswa yang tidak mampu dan orangtua di panggil untuk sosialisasi</p>
9.	Siswa SMP	<p>a. mendata kerumah siswa</p> <p>b. bisa terbantuan biaya sekolahnya.</p>

Hasil reduksi data 2018

Pada table 4.3 diatas terlihat bahwa untuk dimensi mendorong kebijakan pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar yang di lakukan oleh para informan di atas bisa dilihat dari hasil wawancara di bawah ini, sebagaimana yang di ungkapkan oleh “Nr” salah satu orang tua siswa SD 7 Matajang, yaitu :

“setauku itu guru-gurunya ji yang pergi mendata kerumah-rumah siswa.(Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.

Senada dengan yang di utarakan oleh orangtua siswa “Nd” yaitu :

“sangat mendorong karena pihak sekolah yang terjun langsung.(Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.

Hasil wawancara di atas bahwa untuk mendorong Pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar itu pihak sekolah yang datang langsung kerumah siswa untuk melihat kondisi orangtua siswa, apakah berhak untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar atau tidak. Demikian pula di katakan oleh informan “Au” orang tua siswa :

“sekolah yang mengatur semuanya tapi setauku dari pusat itu namanya. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2018)”.

Selanjutnya pernyataan di perkuat untuk mendorong pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar KIP di SD 7 “KHS” selaku kepala sekolah, yaitu :

“.....menghimbau kepada para orangtua apabila ada anaknya yang masih sekolah di sekolah ini dan memiliki KPS yang saya maksudkan silahkan di usul masuk di sini. Selebihnya seperti itu. Kemudian kita himbau tujuan perolehan KIP ini kan itu yang paling penting juga karena terkadang biasa begini ada biasa anak-anak yang agak malas-malasan itu disaat tidak menerima ini yang kita memang selalu berikan perhatian khusus bahwa ini KIP sebenarnya ini adalah tujuannya bagaimana supaya anak-anak kita ini tidak ada yang putus sekolah, terus pendidikannya berlanjut terus. Inikan tujuan pemerintah kita ciptakan siswa-siswa yang laju dan tentu memiliki prestasi yang baik. Seperti itu.(Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas untuk mendorong pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar sekolah mengundang orang tua siswa yang menerima Kartu Indonesia Pintar anaknya untuk di berikan arahan oleh kepala sekolah bahwa apabila masih ada anaknya yang sekolah di SD 7 agar peroleh Kartu Indonesia Pintar tersebut sangat penting untuk pembiayaan sekolah, supaya siswa

tidak ada yang putus sekolah pendidikannya terus berlanjut dan memiliki prestasi yang baik.

Adapun untuk mendorong pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar di SMP 1 Kabupaten Bulukumba yang di kemukakan oleh salah satu orang tua siswa “Ed”, yaitu :

“peranan sekolah itu memberikan motivasi kepada orangtua siswa yang tidak mampu bahwa ada bantuan dana untuk siswa yang tidak mampu. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.

Informasi lain juga di kemukakan oleh informan “Ni” orang tua siswa :

“perannya sekolah yang pertama sekolah betul-betul mendata dari setiap siswa atau muridnya terus setiap setelah mendata itu dek betul-betul ada di lihat datanya yang mana betul-betul memang harus mendapatkan KIP dimana setiap siswa tidak sama tingkat kesejahteraan tingkat mampu atau tidaknya supaya di pusat nanti betul-betul merata itu yang dapat KIP. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.

Hasil wawancara dengan informan di atas untuk mendorong pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar yaitu sekolah mendata siswa dan dapat membedakan mana siswa yang betul-betul bisa mendapatkan bantuan, dimana di lihat dari tingkat kesejahteraan mampu atau tidak, peranan sekolah sangat bagus agar pembagian Kartu Indonesia Pintar bisa merata keseluruh masyarakat tidak mampu. Demikian pula yang di katakan oleh siswa “Ba” :

“awal adanya program KIP tentunya guru di sekolah bahagai karena memang di sekolahku toh kak banyak siswa yang kurang mampu dan dengan adanya ini KIP bisa terbantuan biaya sekolahnya. (Hasil wawancara pada tanggal 20 juli 2018)”.

Selanjutnya pernyataan di kemukakan oleh informan “MHA” selaku kepala sekolah SMP 1 Bulukumba :

“Kalau kita sih mendorong setahu saya sih, makanya saya ini tidak pahami karena begini dek yah kartu Indonesia pintar kita tadi bilang bagian tidak mampu, jadi kalau kita tidak mendorong anunya tapi ini berdasarkan data, data anak toh bahwa mungkin di dapodik, pekerjaan orang tua anak begini sehingga masuk kategori tidak mampu sehingga di usulkan toh, kalau pihak sekolah tidak di bilang bagaimana mendorong, tidak terlalu nampakji keterlibatan sekolah disini, melalujui datanya anak toh Karena disini kartu Indonesia pintar itu tidak perlu ji kayaknya bahwa anak itu harus pintar toh, intinya disini tidak mampu. (Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)”.

Berdasarkan pernyataan informan diatas untuk mendorong pelaksanaan Kartu Kartu Indonesia Pintar, tidak terlalu Nampak keterlibatannya karena data yang di terima oleh sekolah sudah jadi. Yang jelas untuk penerima Kartu Indonesia Pintar dari kalangan kurang mampu bukan dilihat dari kepintaran siswa. selanjutnya untuk mendorong pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar di SMA 8 Kabupaten Bulukumba yang di kemukakan oleh salah satu orang tua siswa “Sm”, yaitu :

“kalau peranan sekolah itu dia hanya mendata dan mengumpulkan semua berkas siswa yang kurang mampu untuk di kirim ke pusat. (Hasil wawancara pada tanggal 20 juli 2018)”.

Informasi lain di tambahkan oleh informan “Nu” orang tua siswa :

“peranan sekolah itu memotivasi, memfasilitasi siswa untuk mendapatkan KIP. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.

Dari hasil wawancara di atas informan “Sm” dan “Nu” untuk mendorong pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar itu peranan sekolah mendata siswa kurang mampu dan memberikan arahan dan himbauan kepada para orang tua siswa tujuan

bantuan tersebut. Pendapat yang sama juga di ungkapkan oleh “Fj” siswa SMA 8 yaitu :

“sangat membantu sekali karena kalau tidak begitu guruku tidak ada kutau bilang ternyata ada programnya pemerintah seperti ini. Ternyata bagus langsung sekolah yang turun tangan jadi langsung sampai ke siswa.(Hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2018)”.

Pernyataan yang lebih lengkap di kemukakan oleh informan “SYD” Kepala sekolah SMA 8 Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“kita ini menyampaikan kepada peserta didik melalui upacara di sampaikan, melalui pengumuman-pengumuman tertentu oleh anak-anak, di sampaikan oleh wali-wali kelasnya, di data anak-anak peserta didik yang kurang mampu yang punya KPS supaya dapat di kirim kepusat, jadi anak-anak itu akan mengumpul melalui wali-wali kelasnya biasa juga langsung ke saya sebagai pengelolah KIP. (Hasil wawancara pada tanggal 2 Juli 2018)”.

Berdasarkan ungkapan informan di atas untuk mendorong pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar di sampaikan oleh kepala sekolah pada saat upacara bendera.Keterlibatan guru-guru di sekolah sangat bagus karena selalu ada pengumuman-pengumuman untuk siswa yang kurang mampu. Pernyataan yang lebih kuat juga di sampaikan oleh “JWD” selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembentukan Karakter di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“.....siswa tersebut yang ada SK nya itu kepada pihak sekolah untuk mempercepat pencairan itu. Kan misalnya tadi toh telah di input rekapitulasi kabupaten bulukumba dari 15.000 itumi di kembalikan ke kita ke kabupaten, pusat kembalikan ke kabupaten, di kabupaten saya sebagai unit pengelolahnya memisah atau memilah-milah ini bontotito ini bontobahari, di lemparmi ke sekolah bahwa ini sekolah kita punya kuota tahun ini misalnya di tahap, karena pakai tahapan bukan satu kali setahun masuk ini sekolah masuk menerima, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahapnya tergantung dari pusat. Jadi di sini dek interpersi kita di kabupaten tidak ada sama sekali.....(Hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2018)”.

Melihat hasil wawancara para informan di atas untuk dimensi mendorong maka pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar terlihat baik pada tataran Implementor maupun target group menunjukkan bahwa program ini diimplementasi dengan upaya yang luar biasa dari berbagai informan. Dimana pihak pemerintah maupun pihak masyarakat mengikuti sesuai dengan aturan kebijakan, Implementor menjalankan kebijakan dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk tahu aturan sehingga mereka taat dengan aturan kebijakan. Seperti siswa yang telah mengumpulkan berkas di sekolah itu orang tuanya di undang ke sekolah untuk melakukan sosialisasi untuk di beri arahan apa kegunaan dari dana bantuan tersebut. Di SMP 1 keterlibatan dalam program ini tidak begitu baik Karena tidak adanya anggaran untuk guru yang bersangkutan, namun beda lagi di SMA 8 keterlibatan kepala sekolah dan guru-guru sangat baik, selalu ada penyampaian tiap upacara di sekolah. Begitu juga di SD 7 sangat baik keterlibatannya karena melihat dari antusias masyarakat dalam menerima kebijakan ini.

b. mempengaruhi

Mempengaruhi dalam hal ini bahwa implementor mengintervensi kebijakan dengan jalan mempengaruhi agar kebijakan bisa diimplementasikan dengan baik. seperti bagaimana implementor mensosialisasikan KIP tersebut agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Maka Tabel ketiga akan menunjukkan bahwa setiap Informan dalam program KIP tersebut berupaya agar program ini dapat dijalankan sesuai dengan aturan kebijakan. Hal ini bisa dilihat dalam table berikut :

Table 4.4 : Mempengaruhi kebijakan KIP

No.	Informan	mempengaruhi kebijakan KIP
1.	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memantau bagi siswa tersebut yang ada SK nya itu kepada pihak sekolah untuk mempercepat pencairan</li> <li>b. interpersi kita di kabupaten tidak ada sama sekali</li> <li>c. yang punya KPS itu yang menerima KIP</li> </ul>
2.	Kepala Sekolah SMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyampaikan kepada peserta didik melalui upacara di sampaikan</li> <li>b. melalui pengumuman-pengumuman tertentu oleh anak-anak</li> <li>c. di sampaikan oleh wali-wali kelasnya</li> <li>d. di data anak-anak peserta didik yang kurang mampu yang punya KPS supaya dapat di kirim kepusat</li> <li>e. jadi anak-anak itu akan mengumpul melalui wali-wali kelasnya</li> </ul>
3.	Kepala Sekolah SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. data anak toh bahwa mungkin di dapodik</li> <li>b. pekerjaan orang tua anak begini sehingga masuk kategori tidak mampu sehingga di usulkan</li> </ul>
4.	Kepala Sekolah SD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan arahan kepada orangtua</li> <li>b. para orangtua apabila ada anaknya yang masih sekolah di sekolah ini dan memiliki KPS yang saya maksudkan silahkan di usul masuk di sini</li> <li>c. kita himbau tujuan perolehan KIP</li> </ul>
5.	Orangtua SMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi siswa yang kurang mampu.</li> <li>b. Siswa kuang mampu sangat terbantu apalagi soal biaya pendidikan</li> <li>c. sangat berpengaruh karena data-data dari siswa itu di laporkan kesana kemudian di usulkan naik, di usulkan oleh kepala sekolah sehingga kalau di setuju itu di terbitkan mi kartu</li> </ul>
6.	Orangtua SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. meringankan beban orangtua</li> <li>b. sekolah yang menyaring sekolah yang mendata yang mana saja siswa atau muridnya bisa mendapatkan KIP.</li> </ul>

		c. memberikan pengaruh yang positif karena dengan begitu alhamdulillah banyak anak-anak yang terbantu khususnya mereka yang punya ekonomi di bawah rata-rata.
7.	Orangtua SD	a. siswa yang tidak mampu yang putus sekolah kembali bersekolah.
8.	Siswa SMA	a. sangat membantu karena dapat membantu perekonomian siswa b. pengaruh sekolah itu terhadap kebijakan KIP itu sangat berpengaruh karena dapat membantu siswa-siswa yang kurang mampu untuk mendapatkan KIP selain itu karena adanya KIP juga dapat membantu membeli peralatan-peralatan sekolah yang di butuhkan
9.	Siswa SMP	a. sangat berpengaruh kak karena bisa membantu itu siswa dan siswi yang sangat membutuhkan.

Hasil reduksi data 2018

Pada table 4.4 untuk mempengaruhi Kartu Indonesia Pintar yang di lakukan oleh para informan di atas bisa dilihat dari hasil wawancara di bawah ini, sebagaimana yang di ungkapkan oleh “Mw” salah satu orang tua siswa SD 7 Matajang, yaitu :

“sangat mendukung dengan adanya program ini karena siswa yang tidak mampu yang putus sekolah kembali bersekolah. ....(Hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2018)”.

Pendapat yang sama juga di ungkapkan oleh “Im” orang tua siswa, yaitu :

“sangat berpengaruh dek karena anakku itu rajinmi belajar, semangatmi karena adami bantuan baru kalau ada uang ta’sedikit bisa mi disisihkan sedikit kalau ada uangnya keluar, begitu. (Hasil wawancara pada tanggal 8 agustus 2018)”.

Informasi dari orang tua siswa di atas, dalam mempengaruhi kebijakan Kartu Indonesia Pintar itu yaitu siswa putus sekolah kembali bersekolah, baiknya lagi siswa

lebih rajin untuk belajar dan dana yang di terima sangat membantu biaya sekolah. Upaya ini telah di tunjukkan oleh “KSH” Kepala Sekolah SD 7 Matajang Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“Yah sekira begini kebijakan itu kan datangnya dari atas kan kita disini selaku penentu kebijakan paling bawah tentu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, boleh itu secara langsung maupun melalui komite sekolah, komite sekolah kita adalah punya mitra namanya milik sekolah yang merupakan perwakilan dari pada orangtua siswa nanti kita sampaikan kalau kita tidak sempat sampaikan secara menyeluruh komite sekolah yang akan memberikan itu lagi ke masyarakat. (Hasil wawancara pada tanggal 30 Mei 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas untuk mempengaruhi kebijakan Kartu Indonesia Pintar yaitu memberikan sosialisasi kepada orang tua siswa biasanya di lakukan langsung oleh kepala sekolah terkadang juga di lakukan oleh komite sekolah. Dalam hal ini sangat bagus agar orangtua siswa dapat memahami Kartu Indonesia Pintar tersebut.

Adapun untuk mempengaruhi Kartu Indonesia Pintar di SMP 1 Kabupaten Bulukumba yang di kemukakan oleh salah satu siswa “Nk”, yaitu :

“sangat membantu untuk membeli pakaian sekolah, buku, tas, dan peralatan sekolah yang lain. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2018)”.

Pendapat yang sama juga di ungkapkan oleh informan “Im” , yaitu :

“sekolah sangat berpengaruh dalam pembagian kartu indonesia pintar karena kenapa itu dek, karena yang pertama itu kita bilang tadi yang dari pemerintah toh terus di bagikan merata kesemua sekolah otomatis sekolah yang menyaring, sekolah yang mendata yang mana saja siswa atau muridnya bisa mendapatkan KIP. Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di atas bahwa dalam pembagian Kartu Indonesia Pintar harus merata ke kalangan siswa yang kurang

mampu, agar semua siswa yang kurang mampu tersebut bisa membeli perlengkapan sekolah. Adapun pernyataan yang di kemukakan oleh “MHA” selaku Kepala Sekolah SMP 1 Bulukumba, yaitu :

“Begini, kalau dia sudah terima dia di panggil, anak dan orang tuanya bahwa sudah begini manfaatkanlah itu untuk hal-hal yang memang penting misalnya beli seragam dll sebagainya, begitu. Kita mendorong seperti itu ji. (Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)”.

Hasil wawancara dengan informan di atas dana yang di terima oleh siswa agar di manfaatkan dengan baik memang betul-betul untuk biaya sekolah misalnya seragam, buku, uang saku, biaya les tambahan, bukan membelajakan dengan sesuatu yang tidak berguna. Orang tua siswa di panggil kesekolah untuk di beri pemahaman guna dari Kartu Indonesia Pintar.

Selanjutnya dalam mempengaruhi kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SMA 8 Kabupaten Bulukumba di kemukakan oleh informan “Nu” orang tua siswa, yaitu :

“pengaruhnya sekolah dan diknas dalam hubungannya dengan penerbitan kartu KIP itu sangat berpengaruh karena data-data dari siswa itu di laporkan kesana kemudian di usulkan naik, di usulkan oleh kepala sekolah sehingga kalau di setuju itu di terbitkan mi kartu. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.

Pendapat yang sama juga di ungkapkan oleh informan “ML” orang tua siswa, yaitu :

“kan ini kebijakan dari pemerintah atas dan di berikan kepada setiap kabupaten dan inimi diknas dan sekolah yang tau semua. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.

Hasil wawancara dengan para informan di atas yaitu persyaratan yang di masukkan oleh siswa ke sekolah itu di kirim ke pusat dan di sanalah di tentukan

siswa yang akan terima Kartu Indonesia Pintar setelah itu di kirim ke Dinas Pendidikan Provinsi lalu ke Dinas Pendidikan Kabupaten memberi tau kesekolah-sekolah untuk di berikan SK nya. Informasi lain pula di dapatkan dari informan “Sf” siswa, yaitu :

“sangat berpengaruh kak karena pemerintah sudah memberikan wewenang ke sekolah, jadi sekolahlah yang mendata siswa-siswa yang kurang mampu. (Hasil wawancara pada tanggal 24 Agustus 2018)”.

Pernyataan lain di kemukakan oleh “Fj” siswa, yaitu :

“kalau sekolah memang untuk demi meningkatkan mutu sekolah memang salah satunya itu untuk peningkatan mutu, jadi seperti sarana dan prasarana nya ada komite semua itu bisa di penuhi dengan KIP ini bantuannya sangat berguna itu apalagi bagi siswa. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu pemerintah pembuat kebijakan dan sekolah yang menjalankan kebijakan melaksanakan dengan baik Program Kartu Indonesia Pintar ini karena demi untuk meningkatkan mutu sekolah seperti sarana dan prasarana. Demikian pula pernyataan di kemukakan oleh informan “SYD” selaku Kepala sekolah di SMA 8 kabupaten Bulukumba, yaitu :

“untuk kebijakan disini kalau memang anak-anak yang sudah memiliki KIP memang di prioritaskan mereka untuk di usulkan ke pusat, dan yang kedua di bebaskan untuk pembayaran-pembayarannya seperti pembayaran komite. (Hasil wawancara pada tanggal 2 Juli 2018)”.

Hasil wawancara di atas maksudnya yaitu bagi siswa yang telah memiliki Kartu Indonesia Pintar maka di prioritaskan dan di usulkan ke pusat agar bisa bisa mendapat dana dan bebas untuk pembayaran-pembyaran seperti komite sekolah sebagai lagi bisa membeli perlengkapan sekolah lainnya. Pernyataan yang lebih kuat

di ungkapkan oleh informan “JWD” selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembentukan Karakter di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“.....dinas pendidikan cuman menjalankan aturan perintah apa itu aturan perintah SK, apa yang di sampaikan dari pusat itu yang kita lakukan. Contoh, dia kirimkan SK SK penerima itu, misalnya di tahap pertama kabupaten Bulukumba mendapat 5000 tahap pertama, setelah tiba di kabupaten kita lempar mi ke wilayah kecamatan masing-masing, wilayah kecamatan itu kita bagi-bagi mi SD ini di kecamatan itu sekian, SD ini sekian, begitupun di kecamatan lain. Kalau misalnya ada perintahnya bahwa ada apaya semacam percepatan pencairan toh kita menyurat lagi. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kita dek..... (Hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2018)”.

Jadi dapat di simpulkan untuk mempengaruhi kebijakan Kartu Indonesia Pintar yaitu apapun perintah dari pusat dinas pendidikan hanya menjalankan. Dinas pendidikan yang menerima total kuota penerima Kartu Indonesia pintar di Bulukumba, nanti setelah itu di beritahukan ke sekolah masing-masing. Contohnya juga ada percepatan pencairan dana maka dinas pendidikan menyurat lagi ke sekolah-sekolah. Dan sekolah memberikan sosialisasi kepada orang tua siswa biasanya di lakukan langsung oleh kepala sekolah terkadang juga di lakukan oleh komite sekolah. dana yang di terima oleh siswa agar di manfaatkan dengan baik memang betul-betul untuk biaya sekolah misalnya seragam, buku, uang saku, biaya les tambahan, bukan membelajarkan dengan sesuatu yang tidak berguna. bagi siswa yang telah memiliki Kartu Indonesia Pintar maka di prioritaskan dan di usulkan ke pusat agar bisa bisa mendapat dana dan bebas untuk pembayaran-pembyaran seperti komite sekolah sebagai lagi bisa membeli perlengkapan sekolah lainnya.

c. Meransang

Meransang dalam hal ini bahwa bagaimana pemerintah memotivasi target grup agar kebijakan kartu Indonesia pintar bisa berjalan dengan baik sesuai aturan yang telah di buat. Implementor berkoordinasi dengan sekolah agar kebijakan ini bisa tepat sasaran. Maka Tabel keempat akan menunjukkan bahwa setiap Informan dalam program KIP tersebut berupaya agar program ini dapat dijalankan sesuai dengan aturan kebijakan. Hal ini bisa dilihat dalam table berikut :

Table 4.5 : Meransang target grup untuk melaksanakan KIP

No.	Informan	Meransang target grup untuk melaksanakan KIP
1.	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kementerian pendidikan kerja sama mi sekarang dengan kemensos</li> <li>b. kedepannya tidak bisami itu sembarangan kartu tidak mampu keluar</li> <li>c. jadi untuk KIP itu datanya kementerian sosial yang di ambil oleh kementerian pendidikan, itulah yang di tindak lanjuti oleh kementerian pendidikan</li> </ul>
2.	Kepala Sekolah SMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. peserta didik yang di usulkan untuk medapatkan dana tidak mampu dan ketika mereka sudah dapat kita berikan pemahaman</li> <li>b. kita sampaikan kepada orangtua bahwa ada pengarahan dulu dari kepala sekolah bahwa sasaran uang itu kemana dan di gunakan untuk apa</li> <li>c. kita sampaikan bahwa uang itu bukan di gunakan untuk semata-mata di gunakan untuk konsumsi-konsumsi yang tidak bermanfaat bagi dirinya</li> </ul>
3.	Kepala Sekolah SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. uang yang di terima itu betul-betul tepat sasaran dalam arti bahwa memang di gunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan sekolah</li> </ul>
4.	Kepala Sekolah SD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ransangan kita hanya memberikan informasi saja karena rata-rata orangtua siswa itu antuasias sekali kalau tentang hal ini</li> </ul>

		b. mensosialisasikan saja secara berkelompok
5.	Orangtua SMA	a. sekolah menentukan itu berdasarkan peninjauan dari kepala sekolah kemudian yang kedua dari keterangan tidak mampu karena anak minta keterangan tidak mampu dari kelurahan dan kelurahan tentunya sudah mendata warganya siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, saya rasa seperti itu. b. ini awalnya dari pendataan statistik dia lihat mana yang bisa di kasi yang tidak bisa.
6.	Orangtua SMP	a. saya pikir itu dek kalau sekolah yang tentukan sebelumnya kan ada informasi dari sekolah kalau ini ada mau di bagi kartu indonesia pintar jadi kita kasi datanya kesekolah, biasanya itu ada ini dek dari sekolah datang kunjungi rumah-rumah kami biasanya mungkin karena mau di lihat yang mana betul-betul siswa yang berhak untuk mendapatkan kartu indonesia pintar. b. sekolah melihat apa pekerjaan dari siswa tersebut, bagaimana keadaan siswa pergi sekolah mulai dari pakaian sekolah bisa membedakan mana anak tidak mampu dan mampu.
7.	Orangtua SD	a. dengan melihat kondisi siswa, kondisi orangtua siswa, pekerjaan orangtua, begitujdi dek.
8.	Siswa SMA	a. yang pertama itu dengan cara mendata siswa, yang kedua dengan cara wawancara. b. proses penentuan yang berhak mendapatkan KIP itu harus sesuai dengan data yang di tentukan oleh sekolah. Untuk penentua penerima KIP itu dari pemerintah bukan sekolah, jadi pemerintah yang tentukan semua keputusan.
9.	Siswa SMP	a. hanya orang yang tidak mampu yang bisa dapat KIP

Hasil reduksi data 2018

Pada table 4.5 Meransang target grup untuk melaksanakan Kartu Indonesia Pintar yang dilakukan oleh para informan diatas bisa dilihat dari hasil wawancara di

bawah ini, sebagaimana yang di katakan oleh “Mw” salah satu orang tua siswa SD 7

Matajang, yaitu :

“dengan melihat kondisi siswa, kondisi orangtua siswa, pekerjaan orangtua, begituji dek. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.

Pendapat yang sama juga di ungkapkan oleh informan orang tua siswa “Un” ,

yaitu :

“yah dengan pendataan itu melihat keadaan saya datang mensurvei rumah saya bahwa anak saya ini benar-benar bisa mendapatkan. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2018)”.

Hasil wawancara dengan informan di atas mengemukakan bahwa Meransang target grup untuk melaksanakan Kartu Indonesia Pintar yaitu pihak sekolah tidak asal pilih untuk penerima bantuan tapi betul-betul datang langsung kerumah orang tua siswa dan melihat kondisinya. Adapun informasi yang di sampaikan oleh “KHS” selaku kepala sekolah SD 7 Matajang Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“.....kita hanya memberikan informasi saja karena rata-rata orangtua siswa itu antusias sekali kalau tentang hal ini, kalau misalnya ada dia tau bahwa ada bantuan maka berlomba-lomba, dari mulut kemulut saja orangtua itu berdatangan mempertanyakan itu biasanya kan satu orang yang tau katanya ada begini datangmi itu bersama-sama bertanya disini di sekolah kita, jadi sebenarnya intinya begini kita hanya sekedar mensosialisasikan saja secara berkelompok maka akan datang sendiri ke sekolah mempertanyakan itu, barulah kita memberikan arahan disini apa-apa yang perlu disiapkan kemudian apa-apa bukti-bukti fisik yang di perlukan ....(Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas kepala Sekolah SD 7 merangsang target grup untuk melaksanakan Kartu Indonesia pintar yaitu dengan mensosialisasikan secara berkelompok, dan memberikan informasi kepada orang tua siswa karena

antusias sekali dalam hal ini, bisa saja dari mulut kemulut sehingga datang ke sekolah untuk mempertanyakan lebih jelasnya.

Adapun dalam merangsang target grup untuk melaksanakan Kartu Indonesia Pintar di SMP 1 Kabupaten Bulukumba yang dikemukakan oleh salah satu orangtua siswa “An” yaitu :

“sekolah melihat apa pekerjaan dari orangtua siswa tersebut, bagaimana keadaan siswa pergi sekolah mulai dari pakaian sekolah bisa membedakan mana anak tidak mampu dan mampu.(Hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2018)”.

Pendapat lain di kemukakan oleh orang tua siswa “As” yaitu :

itu yang pertama kita lihat kan biasanya setiap ada siswa baru itu ada melampirkan data pekerjaan orangtua dilihat disitu biasanya penghasilan rata-rata.(Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2018)”.

Dari hasil wawancara dengan para orang tua siswa di atas bahwa merangsang target grup untuk melaksanakan kartu Indonesia pintar itu sekolah bisa membedakan siswa yang kurang mampu dan mampu dengan melihat cara berpakaian kesekolah, untuk siswa kurang mampu untuk bisa mendapat bantuan agar melampirkan data pekerjaan dan penghasilan orangtua. Informasi lain di tambahkan oleh siswa “Hk” yaitu : “hanya orang yang tidak mampu yang bisa dapat KIP.( Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2018)”. Menurut “Hk” kebijakan KIP ini di buat hanya untuk siswa yang kurang mampu dan siswa yang tidak punya biaya soal pendidikan.pernyataan lain di kemukakan oleh “MHA” selaku Kepala Sekolah SMP 1 Bulukumba, yaitu :

“Ituji saja kita berusaha bahwa uang yang di terima itu betul-betul tepat sasaran dalam arti bahwa memang di gunakan untuk kepentingan yang

berkaitan dengan sekolah. Misalnya beli seragam, beli topi, beli sepatu dll sebagainya. (Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa merangsang target grup untuk melaksanakan kartu Indonesia pintar yaitu berharap agar para siswa yang menerima bantuan agar membelanjakan uang dengan semestinya, pemerintah memberikan bantuan berupa Kartu Indonesia Pintar agar siswa yang tidak punya biaya untuk bersekolah bisa kembali bersekolah misalnya untuk beli seragam, buku, sepatu, dll.

Selanjutnya merangsang target grup untuk melaksanakan Kartu Indonesia Pintar di SMA 8 Kabupaten Bulukumba di kemukakan oleh informan “Nu” orang tua siswa, yaitu :

“sekolah menentukan itu berdasarkan peninjauan dari kepala sekolah kemudian yang kedua dari keterangan tidak mampu karena anak minta keterangan tidak mampu dari kelurahan dan kelurahan tentunya sudah mendata warganya siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, saya rasa seperti itu. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.

Pendapat lain di tambahkan oleh siswa “Fj” yaitu :

“caranya itu guruku dia survei ke masing-masing rumah yang mendaftar, dia datang dia lihat situasi dan kondisinya memang dia cek langsung apakah memang layak untuk di jadikan sebagai penerima KIP ini atau tidak, kalau memang layak yah mereka prioritaskan kalau tidak dia beritahu bahwa belum bisa kali ini dapat KIP nanti kalau kurang mampu. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2018)”.

Hasil wawancara dari para informan di atas yaitu sekolah melakukan peninjauan kerumah orang tua siswa apakah memang layak untuk di jadikan sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar atau tidak, jika layak maka akan di minta mengumpulkan persyaratannya. Selanjutnya pernyataan yang di kemukakan oleh informan “SYD” selaku Kepala sekolah di SMA 8 kabupaten Bulukumba, yaitu :

“kita ransang anak-anak itu bahwa bagi peserta didik yang di usulkan untuk medapatkan dana tidak mampu dan ketika mereka sudah dapat kita berikan pemahaman, jadi sebelum mereka di beri di serahkan itu di panggil dulu orangtua untuk menerima disini, kita bersurat dulu kepada orangtua di tandatangi oleh kepala sekolah baru di undang orangtua untuk menerima, setelah di undang orangtua untuk menerima sesuai dengan waktu yang di tentukan maka kita sampaikan kepada orangtua bahwa ada pengarahan dulu dari kepala sekolah bahwa sasaran uang itu kemana dan di gunakan untuk apa, kita juga sampaikan bahwa sasaran uang itu di gunakan untuk kepentingan-kepentingan kebutuhan-kebutuhan sekolahnya.(Hasil wawancara pada tanggal 2 Juli 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dia atas dalam meransang target grup untuk melaksanakan Kartu Indonesia Pintar di SMA 8 sudah bagus Karena sekolah mengundang orangtua siswa untuk di beri pengarahan dan pemahaman agar tau tujuan dari dana tersebut, agar setelah siswa mendapat dana bisa tepat sasaran.

Pernyataan yang lebih kuat di kemukakan oleh informan “JWD” selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembentukan Karakter di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“Begini dek, kita itu di kementrian pendidikan kerja sama mi sekarang dengan kementrian sosial, jadi kedepannya, itu kayaknya kedepannya tidak bisami itu sembarangan kartu tidak mampu keluar, ada memang data basis terpadu khusus untuk orang miskinnya bulukumba, jadi target-target yang masukkan itu jangan sampai kita bisa mengusulkan, sekarang tidak ada karena adami namanya basis data terpadu, itu basis data terpadu di bikin di produksi disini di kabupaten bulukumba, masing-masing kabupaten, berapa ribu masyarakat miskinnya kabupaten bulukumba. Itu di sinkronkan itu yang mendata itu dek kementrian sosial, jadi untuk KIP itu datanya kementrian sosial yang di ambil oleh kementrian pendidikan, itulah yang di tindak lanjuti oleh kementrian pendidikan.....(Hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2018)”.

Jadi dapat di simpulkan hasil wawancara dengan para informan di atas untuk Meransang bahwa bagaimana pemerintah memotivasi target grup agar kebijakan

kartu Indonesia pintar bisa berjalan dengan baik sesuai aturan yang telah di buat yaitu untuk bisa mendapatkan Kartu Indonesia Pintar harus memasukkan persyaratan kesekolah masing-masing yaitu surat keterangan tidak mampu, jadi sekarang tidak sembarang orang lagi yang bisa ambil surat tersebut. Semua orang miskin di Bulukumba di sinkronkan yang mendata. Karena data Kartu Indonesia Pintar di ambil di kementerian sosial. melaksanakan Kartu Indonesia Pintar yaitu dengan mensosialisasikan secara berkelompok, dan memberikan informasi kepada orang tua siswa karena antusias sekali dalam hal ini, berharap agar para siswa yang menerima bantuan agar membelanjakan uang dengan semestinya, pemerintah memberikan bantuan berupa Kartu Indonesia Pintar agar siswa yang tidak punya biaya untuk bersekolah bisa kembali bersekolah misalnya untuk beli seragam, buku, sepatu, dll. di SMA 8 sudah bagus Karena sekolah mengundang orangtua siswa untuk di beri pengarahan dan pemahaman agar tau tujuan dari dana tersebut, agar setelah siswa mendapat dana bisa tepat sasaran.

Dari hasil penelitian di atas di simpulkan bahwa idealized policy dalam implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di kabupaten bulukumba sebagai berikut : a) Proses kartu Indonesia pintar di Kabupaten Bulukumba yaitu tidak sesuai prosedur yang telah di sampaikan oleh dinas pendidikan Persyaratan yang telah di tetapkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan di lapangan, b) Mendorong pemerintah dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Bulukumba yaitu sangat baik karena siswa yang telah mengumpulkan berkas di sekolah itu orang tuanya di undang ke sokolah untuk melakukan sosialisasi untuk di beri arahan apa

kegunaan dari dana bantuan tersebut. keterlibatan kepala sekolah dan guru-guru sangat baik, selalu ada penyampaian tiap upacara di sekolah dan melihat dari antusias masyarakat dalam menerima kebijakan ini. c) mempengaruhi kebijakan Kartu Indonesia Pintar Kabupaten Bulukumba yaitu apapun perintah dari pusat dinas pendidikan hanya menjalankan. Dinas pendidikan yang menerima total kuota penerima Kartu Indonesia pintar di Bulukumba, nanti setelah itu di beritahukan ke sekolah masing-masing. Contohnya juga ada percepatan pencairan dana maka dinas pendidikan menyurat lagi ke sekolah-sekolah. Dan sekolah memberikan sosialisasi kepada orang tua siswa biasanya di lakukan langsung oleh kepala sekolah terkadang juga di lakukan oleh komite sekolah.dana yang di terima oleh siswa agar di manfaatkan dengan baik memang betul-betul untuk biaya sekolah misalnya seragam, buku, uang saku, biaya les tambahan, bukan membelajakan dengan sesuatu yang tidak berguna. d) Merangsang target grup untuk melaksanakan Kartu Indonesia Pintar Kabupaten Bulukumba yaitu Semua orang miskin di Bulukumba di sinkronkan yang mendata. Karena data Kartu Indonesia Pintar di ambil di kementerian sosial.melaksanakan Kartu Indonesia Pintar yaitu dengan mensosialisasikan secara berkelompok, dan memberikan informasi kepada orang tua siswa karena antusias sekali dalam hal ini, berharap agar para siswa yang menerima bantuan agar membelanjakan uang dengan semestinya, pemerintah memberikan bantuan berupa Kartu Indonesia Pintar.

## **2. Target grup**

Implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di kabupaten Bulukumba menggunakan model kebijakan Smith yang terdiri dari beberapa indikator salah satunya adalah Target grup. Target grup yaitu bagian dari policy stakeholders yang di harapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang di harapkan oleh perumus kebijakan kartu Indonesia pintar. Dan menyesuaikan pola-pola perilaku pemerintah terhadap kebijakan kartu Indonesia pintar. Untuk mengkaji indikator tersebut, perlu menggambarkan bagaimana menentukan target grup yang berhak mendapat KIP. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.6

Tabel 4.6 : menentukan target grup yang berhak mendapat KIP

No.	Informan	Menentukan target grup yang berhak mendapat KIP
1.	Dinas Pendidikan	a. Dari data basis terpadu kementerian sosial di ambil oleh kementerian pendidikan
2.	Kepala Sekolah SMA	d. kita usulkan semua itu peserta didik untuk mendapatkan KIP nya ke pusat
3.	Kepala Sekolah SMP	g. berdasarkan datanya, biasanya kan ada keterangan tidak mampu dari kelurahan, kartu tidak mempunya itu di seleksi berdasarkan datanya.
4.	Kepala Sekolah SD	j. perekrutan yah, perekrutan itu kan kita harus mengadakan termasuk sidang rapat-rapat kecil melalui teman-teman kita yang ada kita kan dia yang lebih tau pantau anak-anaknya siapa yang miskin siapa. k. Kan itu keluarnya nama secara kolektif langsung dari pusat.
5.	Orangtua SMA	a. proses penetuannya yaitu guru juga pasti melihat kondisi siswanya yang mana tidak mampu untuk di berikan dana KIP. b. kalau prosesnya itu saya dengar dari sekolah dia mengusulkan berapa saja siswa yang mendapatkan kartu KIP kemudian di usulkan naik ke pemerintah yang punya wewenang kemudian cairlah melalui Bank BNI.

6.	Orangtua SMP	<p>a. yang berhak mungkin itu dek pusat yang tentukan karena sekolah kan sudah mendata pasti yang untuk mendapatkan itu kartu indonesia pintar mungkin sama ji semua tingkat kesejahteraannya setelahnya itu pusat mi yang menentukan yang mana berhak untuk dikasi.</p> <p>b. itu kita masukkan data, adapun semua data yang terkumpul itu kemudian kan ada memang guru yang menangani itu, itu kemudian dikirim semua data-data yang memang layak dikirim, adapun itu penentuannya nanti disana biasanya di pusat dikirim kembali ini yang naik yang muncul, adapun data yang dikirim semua layak.</p>
7.	Orangtua SD	<p>a. dilihat mi itu dari anunya dek pekerjaan orangtua, bagaimana sehari-harinya di rumah, begitu.</p>
8.	Siswa SMA	<p>a. yah itu tadi guru melihat latar belakang siswa dan latar belakang orangtuanya apakah dia mampu atau tidak.</p> <p>b. pertama haruski “miskin” baru ada surat yang dikeluarkan dari pemerintah minimal desa tentang kita kurang mampu, begitu itu salah satu syaratnya. Dan kita aktif berprestasi di sekolah.</p> <p>c. proses penentuannya itu kak kembali lagi ke data kan biasanya ada anak-anak yang mampu tapi dia tetap ingin mendapatkan KIP tetapi juga ada anak yang tidak mampu jadi sekolah itu peranannya untuk menyaring anak-anak yang memang kurang mampu sehingga dapat di berikan KIP.</p>
9.	Siswa SMP	<p>a. melalui pendataan, melihat keadaan rumah, dan pekerjaan orangtua.</p>

Hasil reduksi data 2018

Pada table 4.6 Menentukan target grup yang berhak mendapat Kartu Indonesia Pintar yang di lakukan oleh para informan di atas bisa dilihat dari hasil

wawancara di bawah ini, sebagaimana yang di ungkapkan oleh “St” salah satu orang tua siswa SD 7 matajang, yaitu :

“dilihat mi itu dari anunya dek pekerjaan orangtua, bagaimana sehari-harinya di rumah, begitu. .(Hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2018)”.

Pendapat yang sama juga di ungkapkan oleh informan “Un” orang tua siswa , yaitu :

“sebenarnya ini dek kalau anak saya dia setor di sekolahnya, yaitu KPS, dan gurunya melihat keadaan anak saya. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2018)”.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan di atas yaitu pihak sekolah menyaring siswanya mana yang mampu dan tidak, dengan cara mendatangi langsung kerumah orang tua siswa, menanyakan perkerjaan orang tua siswa, dan bagaimana kesehariannya. Informasi lain di kemukakan oleh “KHS” selaku kepala sekolah, yaitu :

“.....proses barangkali yang masuk disitu proses perekrutan yah, perekrutan itu kan kita harus mengadakan termasuk sidang rapat-rapat kecil melalui teman-teman kita yang ada kita kan dia yang lebih tau pantau anak-anaknya siapa yang miskin siapa yang ini kemudian tidak ada batasan seberapa banyaknya, pokoknya siapa saja silahkan di tampung di catat kemudian di usulkan..... (Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)”.

Hasil wawancara dengan informan di atas yaitu untuk Menentukan target grup yang berhak mendapat Kartu Indonesia Pintar itu melalui perekrutan, perekrutan di SD 7 itu harus mengadakan siding rapat-rapat kecil bersama guru-guru, agar guru-guru juga paham dan bisa pantau anak-anak mana yang kurang mampu dan tidak.

Adapun untuk Menentukan target grup yang berhak mendapat Kartu Indonesia Pintar di SMP 1 Kabupaten Bulukumba yang di kemukakan oleh salah satu siswa “Ni”, yaitu :

“yang berhak mungkin itu dek pusat yang tentukan karena sekolah kan sudah mendata pasti yang untuk mendapatkan itu kartu indonesia pintar mungkin sama ji semua tingkat kesejahteraannya setelahnya itu pusat mi yang menentukan yang mana berhak untuk dikasi. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2018).”

Demikian pula yang di ungkapkan oleh informan “In” yaitu :

“yah seperti tadi kita harus cari yang betul-betul berhak seperti dia yang tidak mampu tapi maksudnya punya semangat untuk belajar.(Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2018).”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas untuk menentukan target grup yang berhak mendapat Kartu Indonesia Pintar yaitu pemerintah pusat karena sekolah hanya menyaring siswa yang tidak mampu untuk memasukkan berkas kesekolah. Sekarang tidak sedikit siswa putus sekolah padahal punya semangat tinggi untuk belajar. Pendapat lain di kemukakan oleh siswa “Ba” yaitu :

“proses penentuan itu saya tidak tau kak Karena yang menentukan itu pusat bukan sekolah. (Hasil wawancara pada tanggal 20 juli 2018)”.

Hasil wawancara dengan informan di atas untuk menentukan target grup yang berhak mendapat Kartu Indonesia Pintar yaitu siswa SMP 1 tidak untuk menentukan target grup setaunya pusat yang menentukan Karena siswa hanya menunggu informasi dari sekolah. Pernyataan yang lebih kuat di kemukakan oleh “MHA” selaku Kepala Sekolah SMP 1 Bulukumba, yaitu :

“Iya berdasarkan datanya, biasanya kan ada keterangan tidak mampu dari kelurahan, kartu tidak mempunya itu di seleksi berdasarkan datanya.(Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas untuk menentukan target grup yang berhak mendapat Kartu Indonesia Pintar yaitu data yang telah di masukkan oleh siswa kesekolah di seleksi dengan baik agar tidak ada siswa yang mampu mendapatkan Kartu Indonesia Pintar.

Selanjutnya Menentukan target grup yang berhak mendapat Kartu Indonesia Pintar di SMA 8 Kabupaten Bulukumba di kemukakan oleh informan “Am” orang tua siswa, yaitu :

“guru yang menentukan keterangan tidak mampu dan mengusulkan ke pihak atas sehingga bisa terbit SK nya. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.

Pendapat lain di tambahkan oleh “Nu” orang tua siswa, yaitu :

“kalau prosesnya itu saya dengar dari sekolah dia mengusulkan berapa saja siswa yang mendapatkan kartu KIP kemudian di usulkan naik ke pemerintah yang punya wewenang kemudian cairlah melalui Bank BNI. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.

Dari hasil wawancara dengan kedua informan diatas yaitu guru yang bersangkutan memperhatikan berkas siswa untuk di usulkan naik ke pemerintah yang punya wewenang untuk menentukan yang berhak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar kemudian cairlah melalui Bank BNI. Pernyataan lain di kemukakan oleh informan “SYD” selaku Kepala sekolah di SMA 8 kabupaten Bulukumba, yaitu :

“mendapatkan dana KIP itu memang sudah kita usulkan semua itu peserta didik untuk mendapatkan KIP nya ke pusat, KIP untuk tahun 2017 sekitar 67 orang kita kirim semua itu kepusat termasuk itu peserta didik yang mempunyai SKTM tadi. Jadi anak-anak yang kita kirim kepusat itu sekitar 67

orang misalnya toh nah itulah pusat yang memverifikasi terhadap nama-nama yang di kirim oleh sekolah, apakah dia cara untuk pembayarannya apakah bertahap atau di bayar sekaligus terhadap siswa yang di kirim itu, tapi biasanya itu tidak semuanya di bayar oleh pusat. (Hasil wawancara pada tanggal 2 Juli 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas untuk Menentukan target grup yang berhak mendapat Kartu Indonesia Pintar di SMA 8 yaitu semua peserta didik yang telah memasukkan berkas kesekolah semuanya telah di usulkan ke pusat begitupun yang telah memiliki Kartu Indonesia Pintar di usulkan untuk pencairan dananya. Selanjutnya pernyataan yang lebih kuat di kemukakan oleh informan “JWD” selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembentukan Karakter di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“Dari data basis terpadu kementrian sosial di ambil oleh kementrian pendidikan, contoh kalau data basis terpadu kabupaten bulukumba keluarganya berapaya 20ribu misalnya dan anaknya yang 20rb KK itu ada 15ribu yang sekolah itulah yang di buat kan KIP.(Hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2018)”.

Dari hasil wawancara di atas untuk Menentukan target grup yang berhak mendapat Kartu Indonesia Pintar di SMA 8 yaitu data kementrian pendidikan di ambil dari data basis terpadu kementrian sosial, jumlah KK kabupaten Bulukumba yang kurang mampu, anaknya itu yang di buat kan Kartu Indonesia Pintar. Jadi dapat di simpulkan dari para informan di atas bahwa melalui perekrutan, perekrutan itu harus mengadakan sidang rapat-rapat kecil bersama guru-guru, agar guru-guru juga paham dan bisa pantau anak-anak mana yang kurang mampu dan tidak.data yang telah di masukkan oleh siswa kesekolah di seleksi dengan baik agar tidak ada siswa yang mampu mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. semua peserta didik yang telah

memasukkan berkas kesekolah semuanya telah di usulkan ke pusat begitupun yang telah memiliki Kartu Indonesia Pintar di usulkan untuk pencairan dananya.

a. Mengadopsi

Mengadopsi dalam hal ini bagaimana pemerintah dalam mengambil tindakan sesuai kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah sehingga KIP ini bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Maka Tabel keenam akan menunjukkan bahwa setiap Informan dalam program KIP tersebut melaksanakan sesuai kebijakan yang ada. Hal ini bisa dilihat dalam table berikut :

Table 4.7 : mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang di harapkan oleh perumus kebijakan KIP

No.	Informan	Mengadopsi pola-pola interaksi
1.	Dinas Pendidikan	a. setiap waktu setiap ada rakor di Jakarta tetap kita mengusulkan, sama kita bilang masih ada yang tidak terdaftar di lapangan
2.	Kepala Sekolah SMA	a. sampaikan kepada anak-anak yang tidak mampu itu adalah minta rekomendasi dari kantor lurah, kantor desa untuk mendapatkan kartu indonesia pintar yang kita bisa usulkan kepusat b. sarankan kepada anak-anak bagi yang tidak mampu agar supaya bisa urus kartu indonesia pintarnya melalui kepala Desa atau Lurah nanti
3.	Kepala Sekolah SMP	a. kartu Indonesia pintar itu sebenarnya sekolah hanya memfasilitasi terkait datanya apa untuk terkait yang lain-lain itu kebijakan itu dari pusat kemudian dinas pendidikan itu saja b. membackup data itu saja melalui dapodik terkait pola-polanya itu pusat dan dinas pendidikan yang mengatur.
4.	Kepala Sekolah SD	a. mengadopsi itu sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan tentunya oleh pihak pusat kan melalui informasi juga dari dinas

		<p>pendidikan</p> <p>b. mengadopsi saja dari aturan-aturan di atas kita tidak menambah dan mengurangi hanya mensosialisasikan saja apa yang ada dan aturan apa yang telah di tetapkan dari atas.</p>
5.	Orangtua SMA	<p>a. kalau masalah yang menerima KIP itu yang tepatnya yang kurang mampu karena di data tapi yang menentukan itu yang berhak menerima KIP itu yang di pusat karena tidak semua yang kasi masuk berkas dapat semua karena yang menentukan dari pusat.</p> <p>b. kalau untuk tepat sasaran itu tadi dari pendataan jadi pihak yang berwenang di sekolah hanya menyarankan anak-anak untuk ke kantor kelurahan dan kelurahan tentunya tau persis warganya karena selalu di data siapa yang berhak siapa yang tidak.</p>
6.	Orangtua SMP	<p>a. kalau untuk KIP nya supaya tepat sasaran saya pikir itu dek dari pemerintah mi karena semua yang didata sama sekolah warga tidak mampu, terus kalau untuk tepat sasarnya itu saya pikir tidak semua dapat tapi belum tentu anak saya dapat tahun ini tapi bisa saja semester depan tidak dapat.</p> <p>b. tu bagus nya sih sebenarnya kalau memang ada yang fasilitator dari seperti pekerja sosial sebenarnya, jadi adalah kerja sama yang baik antara penentu kebijakan dengan orang-orang yang ada di lapangan maksudnya tanpa di ketahui bahkan sebenarnya, yah pekerja sosial lah begitu yang tidak di ketahui oleh penentu kebijakan tapi bisa menjadi jembatan.</p>
7.	Orangtua SD	<p>a. tidak tau ki itu dek, itu dari data jai kapang naliat dari pekerjaan orangtua.</p>
8.	Siswa SMA	<p>a. guru melihat pertama kondisi keluarganya, kedua kondisi ekonomi keluarganya apakah dia layak atau tidak dia menerima KIP.</p> <p>b. yang pasti jadi pemeran utama ini adalah distributornya artinya orang yang menyampaikan yang mengurus semua itu kalau memang orang yang mengurus itu</p>

		bagus pasti juga tujuannya tepat sasaran ki.
9.	Siswa SMP	a. dengan cara mendata, guruku mensurvey masyarakat kurang mampu sehingga anak-anak yang tidak mampu menerima KIP.

Hasil reduksi data 2018

Pada table 4.7 untuk Mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang di harapkan oleh perumus kebijakan Kartu Indonesia Pintar yang di lakukan oleh para informan di atas bisa dilihat dari hasil wawancara di bawah ini, sebagaimana yang di ungkapkan oleh “Ay” salah satu orang tua siswa SD 7 matajang, yaitu :

“pemerintah tauki yang mana yang layak mendapatkan bantuan dan mana yang tidak layak mendapatkan bantuan. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2018)”.

Pendapat sama juga di ungkapkan oleh informan “Im” orangtua siswa, yaitu :

“itu di lihat dari pekerjaan orangtuanya atau juga kayak saya ini di lihat dari rumahnya mungkin.(Hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas untuk Mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang di harapkan oleh perumus kebijakan Kartu Indonesia Pintar yaitu setelah sekolah berkas siswa di usulkan naik ke pusat maka akandi tentukan yang berhak mendapatkan bantuan, karena kebijakan ini memang di prioritaskan untuk siswa yang kurang mampu. Adapun pernyataan yang di sampaikan oleh oleh “KHS” selaku kepala sekolah SD 7 Matajang Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“Kalau mengadopsi itu sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan tentunya oleh pihak pusat kan melalui informasi juga dari dinas pendidikan, kita juga sering membaca lewat internet bagaimana proses-prses sampai ketangan siswa kita itu namanya PIP kan PIP namanya bukan KIP, KIP itu kartu Indonesia pintar kalau PIP program Indonesia pintar dan PIP sudah berupa uangnya, kan kartu saja ini prosesnya, itu proses pengadaan kartu saja. Jadi dulu kan kalau sudah terdaftar namanya maka secara otomatis itu langsung terbit KIP nya. Kita mengadopsi saja dari aturan-aturan di atas kita tidak menambah dan

mengurangi hanya mensosialisasikan saja apa yang ada dan aturan apa yang telah di tetapkan dari atas. ....(Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)".

Dari hasil wawancara di atas untuk Mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang di harapkan oleh perumus kebijakan Kartu Indonesia Pintar yaitu kepala sekolah SD 7 mengadopsi sesuai aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh pihak pusat dan melalui informasi dari Dinas Pendidikan, juga mengadopsi dari aturan-aturan dari atas sekolah tidak menambah dan mengurangi hanya melakukan sosialisasi apa yang ada dan aturan apa yang telah di tetapkan.

Adapun untuk Mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang di harapkan oleh perumus kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SMP 1 Kabupaten Bulukumba yang di kemukakan oleh salah satu orangtua siswa "Ay", yaitu :

"pemerintah tauki yang mana yang layak mendapatkan bantuan dan mana yang tidak layak mendapatkan bantuan.(Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)".

Pendapat yang sama juga di ungkapkan oleh "Nk" siswa, yaitu :

"dengan cara mendata, guruku mensurvey masyarakat kurang mampu sehingga anak-anak yang tidak mampu menerima KIP. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2018)".

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan para informan untuk Mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang di harapkan oleh perumus kebijakan Kartu Indonesia yaitu sekolah melaksanakan kebijakan ini dengan mendata peserta didik kurang mampu menyaring siswa yang mampu dan tidak untuk di berikan bantuan. Adapun Pernyataan di kemukakan oleh "MHA" selaku Kepala Sekolah SMP 1 Bulukumba, yaitu :

“kita anu saja bahwa intinya begini bahwa kartu Indonesia pintar itu sebenarnya sekolah hanya memfasilitasi terkait datanya apa untuk terkait yang lain-lain itu kebijakan itu dari pusat kemudian dinas pendidikan itu saja. Kita hanya membackup data itu saja melalui dapodik terkait pola-polanya itu pusat dan dinas pendidikan yang mengatur. (Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)”.

Dari hasil wawancara diatas dengan informan untuk Mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang di harapkan oleh perumus kebijakan Kartu Indonesia yaitu sekolah SMP 1 hanya memfasilitasi siswa dengan mengurus berkas-berkas masuk dan hanyak membackup data melalui dapodik. Selanjutnya untuk Mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang di harapkan oleh perumus kebijakan Kartu Indonesia di kemukakan oleh informan “Sn” salah satu orang tua siswa di SMA 8 Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“kalau masalah yang menerima KIP itu yang tepatnya yang kurang mampu karena di data tapi yang menentukan itu yang berhak menerima KIP itu yang di pusat karena tidak semua yang kasi masuk berkas dapat semua karena yang menentukan dari pusat. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.

Senada dengan yang di kemukakan oleh siswa SMA 8 di bulukumba “Nbr” yaitu :

“itu lagi kak kembali lagi kembali di berikan kepada orang-orang yang tidak mampu sehingga orang yang tidak mampu ini menggunakan dan KIP dengan semestinya. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.

Dari hasil wawancara kedua informan di atas yaitu semua berkas siswa yang kurang mampu di usulkan ke pusat, dan pusatlah yang menentukan siapa-siapa yang berhak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar karena tidak semua siswa yang memasukkan berkas menerima bantuan, ada tahapannya. Pendapat yang sama juga di ungkapkan oleh siswa “Nn” yaitu : yang jelas kak KIP ini di peruntukkan untuk siswa

kurang mampu, soal tepat sasaran saya tepat sasaranji semua cuman tidak semua memasukkan berkas itu dapat. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.  
Pernyataan yang lebih kuat di kemukakan oleh informan “SYD” selaku kepala sekolah SMA 8 Bulukumba, yaitu :

“..... Jadi kita sarankan kepada anak-anak bagi yang tidak mampu agar supaya bisa urus kartu indonesia pintarnya melalui kepala Desa atau Lurah nanti proses selanjutnya itu nanti pihak Lurah dan kepala Desa yang memberikan penjelasan lebih lanjut yang jelas yang sekolah menyarankan supaya peserta didik itu memiliki kartu indonesia pintar. Rata-rata itu anak yang memiliki SKTM itu biar tidak disuruh mereka stor sendiri tapi anak-anak yang memiliki rata-rata KIP itu memang susah di dapat kita melalui proses yang agak panjang, agak lama. Tidak ada siswa yang tidak mampu disini, yang mampu menyetor KIP, tidak ada. Rata-rata disini tidak mampu.(Hasil wawancara pada tanggal 2 Juli 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu sekolah SMA 8 menyarankan kepada peserta didik yang kurang mampu agar mengurus surat keterangan tidak mampu di kantor Lurah minimal Kantor Desa agar lebih mudah untuk pengurusan Kartu Indonesia Pintar, dan SMA 8 itu tidak ada siswa yang mampu mentor berkas, semuanya rata-rata tidak mampu. Pernyataan yang lebih keras di kemukakan oleh oleh “JWD” selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembentukan Karakter di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“Jadi kita itu dari kabupaten, masing-masing dari kabupaten sama, maksudnya bagaimana karena masih banyak di lapangan kita tetap mengusulkan, itu setiap waktu setiap ada rakor di Jakarta tetap kita mengusulkan, sama kita bilang masih ada yang tidak terdaftar di lapangan. Kan target di berikan dari pusat kan sudah ada, rumus bakunya sudah ada misalnya 20rb ternyata masih banyak. Jadi setiap kita itu mengusulkan bahwa ternyata masih ada yang membutuhkan.(Hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2018)”.

Jadi dapat di simpulkan dari para informan di atas untuk Mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang di harapkan oleh perumus kebijakan kartu Indonesia pintar yaitu Dinas Pendidikan kabupaten Bulukumba itu mengusulkan masyarakat kurang mampu agar bisa mendapat Kartu Indonesia Pintar dan sampai sekarang masih ada yang belum terdaftar di lapangan, jadi Dinas Pendidikan selalu mengusulkan bahwa ternyata masih ada yang membutuhkan dengan menyarankan kepada peserta didik yang kurang mampu agar mengurus surat keterangan tidak mampu di kantor Lurah minimal Kantor Desa agar lebih mudah untuk pengurusan Kartu Indonesia Pintar, sesuai aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh pihak pusat dan melalui informasi dari Dinas Pendidikan, juga mengadopsi dari aturan-aturan dari atas sekolah tidak menambah dan mengurangi hanya melakukan sosialisasi apa yang ada dan aturan apa yang telah di tetapkan.

b. Menyesuaikan

Menyesuaikan dalam hal ini bagaimana menyamakan kebijakan kartu Indonesia pintar dengan kebijakan yang lalu dalam meningkatkan kualitas pendidikan, baik pada tataran Pemerintahan maupun pada tataran masyarakat yang menjalankan program KIP. Maka Tabel ketujuh akan menunjukkan bahwa setiap Informan dalam menyesuaikan pola-pola perilaku pemerintah terhadap kebijakan KIP tersebut berupaya agar program ini bisa di terima oleh masyarakat. Hal ini bisa dilihat dalam table berikut :

Table 4.8 : Menyesuaikan pola-pola perilaku pemerintah terhadap kebijakan KIP

No.	Informan	Menyesuaikan pola-pola perilaku pemerintah
1.	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. di kabupaten bulukumba itu ada dana sharing pemerintah terhadap program Indonesia pintar</li> <li>b. namanya dia masuk di program PDP (Pelayanan dasar pendidikan)</li> </ul>
2.	Kepala Sekolah SMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. anak-anak yang tidak mampu itu memiliki surat keterangan tidak mampu itu memang anak-anak tidak mampu</li> <li>b. itu jangan lihat berdasarkan dari KIP saja tapi kita lihat dulu dari kondisi yang ada itu melalui dengan SKTM nya.</li> </ul>
3.	Kepala Sekolah SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. masukkan di beasiswa tidak mampu melalui dana bos dan dana PDIP, dan dana-dana sekolah.</li> </ul>
4.	Kepala Sekolah SD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kalau mengenai penyesuaian karena begini kan ada juga terkadang aturan bahwa harus yang memiliki KPS yang menerima saja</li> <li>b. memberikan keluasaan kepada siswa kita untuk memperoleh surat keterangan tidak mampu, nah yang tau itu apakah anak kita mampu atau tidak itu pemerintah setempat</li> </ul>
5.	Orangtua SMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. setiap kebijakan pasti bagus, cuman untuk KIP ini memang untuk siswa yang tidak mampu, beda dengan kebijakan yang kemarin kan beasiswa untuk siswa yang berprestasi saja.</li> <li>b. setiap pergantian pemerintah (presiden) kebijakan pasti berubah paling tidak bertambah, begitu</li> </ul>
6.	Orangtua SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ini kan sebenarnya sekalipun sama-sama orientasinya untuk bantuan tapi kalau untuk KIP saat ini sebenarnya lebih bagus di banding program sebelumnya karena terlihat dari lebih banyak siswa yang dapat itu lebih meluas ceritanya jangkauannya, walaupun ada perubahan itu hanya lebih kelayakan lagi karena yang namanya juga kebijakan sebegitu apapun itu tetap ada kelemahannya jadi harus juga bagus turun ki itu dari</li> </ul>

		<p>penentu kebijakan toh lihat, jangan hanya mengandalkan yang ada di bawah kemudian di kirim kesana memudahkan ceritanya, menunggu bola begitu toh.</p> <p>b. soal perubahan saya pikir itu baik karena ini memang diperuntukkan untuk siswa kurang mampu, banyak itu toh nak kebijakan yang lalu bantuan dana ada juga yang mampu dapat padahal banyak kodong siswa yang tidak mampu.</p> <p>c. begini nak setiap kebijakan itu bagus semua, cuman ini KIP kan di peruntuk siswa yang kurang mampu menurut saya kebijakan ini lebih bagus dari sebelumnya</p>
7.	Orangtua SD	kebijakan KIP dengan kebijakan yang lalu samaji yang membedakan KIP ini untuk siswa kurang
8.	Siswa SMA	<p>a. seperti kebijakan yang lalu sebelum KIP kan ada namanya BSM toh saya pikir samaji tujuannya dengan KIP.</p> <p>b. di sekolah itu ada khusus siswa yang menghendel misalnya KIP itu urusan kesiswaan, untuk yang berprestasi itu guru lain juga yang tau, seperti itu kak</p>
9.	Siswa SMP	a. kebijakan bagus semua kak

Hasil reduksi data 2018

Pada tabel 4.8 untuk Menyesuaikan pola-pola perilaku pemerintah terhadap kebijakan KIP yang di lakukan oleh para informan di atas bisa dilihat dari hasil wawancara di bawah ini, sebagaimana yang di ungkapkan oleh “Un” salah satu orang tua siswa SD 7 matajang, yaitu :

“kebijakan KIP dengan kebijakan yang lalu samaji yang membedakan KIP ini untuk siswa kurang mampu. (Hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2018)”.

Dari hasil wawancara dengan informan di atas untuk menyesuaikan pola-pola perilaku pemerintah terhadap kebijakan KIP yaitu kebijakan pemerintah yang dulu

dengan kebijakan sekarang lebih memprioritasnya peserta didik yang kurang mampu dan penentuan yang berhak dapat bukan sekolah tapi pusat. Selanjutnya pernyataan di kemukakan oleh “KHS” selaku kepala sekolah SD 7, yaitu :

“Kalau mengenai penyesuaian karena begini kan ada juga terkadang aturan bahwa harus yang memiliki KPS yang menerima saja, tapi kita mengambil kebijakan lain Karena ternyata tidak semua siswa yang tidak memiliki KPS itu semuanya mampu tidak semuanya ternyata masih banyak juga siswa-siswa yang lain sehingga pola yang kita tempuh seperti itu tadi memberikan keluasaan kepada siswa kita untuk memperoleh surat keterangan tidak mampu, nah yang tau itu apakah anak kita mampu atau tidak itu pemerintah setempat. Jadi melalui itu kita akan yakin kemudian setelah sampai disitu baru kita bikinkan lagi surat keterangan, surat keterangannya itu berdasarkan surat keterangan dari pemerintah setempat maka tersebut namanya bahwa ini anak adalah betul..... (Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas untuk Menyesuaikan pola-pola perilaku pemerintah terhadap kebijakan Kartu Indonesia Pintar yaitu sekolah SD 7 mengambil kebijakan lain karena aturan harus yang memiliki KPS yang menerima tapi masih ada siswa yang tidak memiliki KPS jadi siswa di beri keluasaan untuk memperoleh surat keterangan tidak mampu. Jadi melalui surat tersebut maka siswa tersebut memang betul kurang mampu.

Adapun untuk Menyesuaikan pola-pola perilaku pemerintah terhadap kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SMP 1 Kabupaten Bulukumba yang di kemukakan oleh salah satu orangtua siswa “As”, yaitu :

“ini kan sebenarnya sekalipun sama-sama orientasinya untuk bantuan tapi kalau untuk KIP saat ini sebenarnya lebih bagus di banding program sebelumnya karena terlihat dari lebih banyak siswa yang dapat itu lebih meluas ceritanya jangkauannya, walaupun ada perubahan itu hanyak lebih kelayakan lagi karena yang namanya juga kebijakan sebgas apapun itu tetap ada kelemahannya jadi harus juga bagus turun ki itu dari penentu kebijakan toh lihat, jangan hanya mengandalkan yang ada di bawah kemudian di kirim

kesana memudahkan ceritanya, menunggu bola begitu toh. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2018)”.

Dari hasil wawancara di atas sekalipun kebijakan yang lalu sama-sama orientasinya tapi kalau untuk Kartu Indonesia Pintar lebih bagus di banding kebijakan sebelumnya karena siswa yang dapat lebih meluas dan di prioritaskan hanya untuk siswa yang kurang mampu. Pendapat lain di tambahkan oleh orang tua siswa “Ip” yaitu :

“soal perubahan saya pikir itu baik karena ini memang diperuntukkan untuk siswa kurang mampu, banyak itu toh nak kebijakan yang lalu bantuan dana ada juga yang mampu dapat padahal banyak kodong siswa yang tidak mampu. (Hasil wawancara pada tanggal 20 juli 2018)”.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas yaitu kebijakan Kartu Indonesia Pintar lebih bagus di banding yang sebelumnya karena kebijakan ini memang betul-betul untuk siswa yang kurang mampu beda dengan kebijakan yang lalu penerimanya juga banyak dari kalangan menengah atas. Adapun Pernyataan yang lebih kuat di kemukakan oleh Kepala Sekolah SMP 1 Kabupaten Bulukumba “MHA” yaitu :

“Kita menyesuaikan dalam arti bahwa kan begini kadang-kadang kan begini misalnya kita mengusulkan 100 yang muncul 20 muncul 25 kadang-kadang ada yang salin anu apa namanya misalnya ada yang seharusnya layak dapat tapi begitu anu tidak muncul namanya jadi kita sesuaikan saja yang tidak muncul itu kita masukkan di beasiswa tidak mampu melalui dana bos dan dana PDIP, dan dana-dana sekolah. (Hasil wawancara pada tanggal 13 Juli 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu banyak siswa di SMP 1 tergolong siswa yang kurang mampu namun tidak semua mendapat Kartu Indonesia Pintar karena kadang sekolah mengusulkan keatas 100 yang muncul hanya 20 paling banyak 25 jadi siswa tersebut saling iri, maka sekolah sesuaikan saja nama siswa yang tidak

dapat Kartu Indonesia Pintar untuk di masukkan di beasiswa tidak mampu melalui dana bos dan dana PDIP.

Selanjutnya untuk Menyesuaikan pola-pola perilaku pemerintah terhadap kebijakan Kartu Indonesia Pintar di kemukakan oleh informan “Am” salah satu orang tua siswa di SMA 8 Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“setiap kebijakan pasti bagus, cuman untuk KIP ini memang untuk siswa yang tidak mampu, beda dengan kebijakan yang kemarin kan beasiswa untuk siswa yang berprestasi saja.. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.

Hasil wawancara dengan informan di atas kebijakan Kartu Indonesia Pintar ini lebih baik daripada kebijakan yang lalu karena kebijakan Kartu Indonesia pintar di prioritaskan untuk siswa kurang mampu sedangkan kebijakan yang lalu hanya untuk siswa berprestasi. Pendapat yang sama juga di ungkapkan oleh siswa “Fj” , yaitu :

“di sekolah itu ada khusus siswa yang menghendel misalnya KIP itu urusan kesiswaan, untuk yang berprestasi itu guru lain juga yang tau, seperti itu kak. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu setiap kebijakan di sekolah pasti ada masing-masing guru yang menghendel, misalnya Kartu Indonesia pintar ada kepala sekolah dan guru bagian kesiswaan yang m elaksanakan. Pernyataan yang lebih kuat di kemukakan oleh informan “SYD” Kepala sekolah SMA 8 Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“...Bahwa anak-anak yang tidak mampu itu memiliki surat keterangan tidak mampu itu memang anak-anak tidak mampu, jangan hanya menerima saja yang memiliki kartu KIP dan KPS, karena kenyataan di desa-desa itu anak-anak yang memiliki KIP dan KPS itu adalah orang yang boleh di kata ada betul-betul kenalan baik atau orang dekat dengan kepada Desanya ketua RT nya dan sebagainya. Dan kenyataan seperti itu, karena ada tetangga saya 2 orang memang tidak mampu tapi mereka tidak ada KIP dan KPS nya, seperti

itu. Jadi itu upaya kita sampaikan kepada pemerintah agar supaya yang tidak mampu itu jangan lihat berdasarkan dari KIP saja tapi kita lihat dulu dari kondisi yang ada itu melalui dengan SKTM nya.(Hasil wawancara pada tanggal 2 Juli 2018)”.

Dari hasil wawancara di atas di SMA 8 masih banyak siswa yang kurang mampu tidak memiliki KPS ataupun KIP jadi sekolah mengusulkan menggunakan surat keterangan tidak mampu siswa, sekolah sudah menyampaikan ke Dinas pendidikan, dan dinas pendidikan melaporkan ke pusat bahwa di kabupaten Bulukumba Khususnya di SMA 8 masih banyak siswa yang kurang mampu tidak mempunyai KPS maupun KIP jadi jangan lihat berdasarkan KPS atau KIP nya saja tapi lihat kondisi yang ada melalui dengan surat keterangan tidak mampu.

Penyataan yang lebih keras juga di sampaikan oleh “JWD” selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembentukan Karakter di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“.....Begini dek di kabupaten bulukumba itu ada dana sharing pemerintah terhadap program Indonesia pintar, itu namanya dia masuk di program PDP (Pelayanan dasar pendidikan) disitu dek ada kegiatan membantu siswa yang miskin di PDP itu. Itu salah satu dana sharing kabupaten bulukumba terhadap program pemerintah pusat. Jadi tujuannya disana itu di PDP adalah mengcover anak yang tidak mendapatkan PIP dari pusat. Contoh saya dapatka PIP dari pusat otomatis saya tidak mendapat PDP disitu. Ada memang dana sharing kabupaten bulukumba itu terhadap bantuan siswa miskin. Kalau PIP itu Program Indonesia pintar dari pusat kalau di kabupaten itu di berikan juga dana, cuman yang di berikan adalah siswa yang tidak mendapatkan PDP.....(Hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2018)”.

Jadi dapat di simpulkan dari para informan di atas untuk Menyesuaikan pola-pola perilaku pemerintah terhadap kebijakan Kartu Indonesia Pintar di kabupaten Bulukumba yaitu yang tidak mendapatkan Kartu Indonesia pintar namun tergolong

kurang mampu di bulukumba itu ada dana sharing pemerintah terhadap program Indonesia pintar, namanya program PDP (pelayanan dasar pendidikan) untuk membantu siswa yang miskin. Jadi siswa yang tidak menerima Kartu Indonesia pintar maka di berikan PDP. dengan mengambil kebijakan lain karena aturan harus yang memiliki KPS yang menerima tapi masih ada siswa yang tidak memiliki KPS jadi siswa di beri keluasaan untuk memperoleh surat keterangan tidak mampu untuk di usulkan keatas sekolah sesuaikan saja nama siswa yang tidak dapat Kartu Indonesia Pintar untuk di masukkan di beasiswa tidak mampu melalui dana bos dan dana PDIP. maka peraturan yang di buat pemerintah di jalankan oleh sekolah tapi tetap ada yang di tamba-tambah.

Dari hasil penelitian di atas di simpulkan bahwa Target grup dalam implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di kabupaten bulukumba sebagai berikut : a) Menentukan target grup yang berhak mendapat Kartu Indonesia pintar yaitu melalui perekrutan, perekrutan itu harus mengadakan sidang rapat-rapat kecil bersama guru-guru, agar guru-guru juga paham dan bisa pantau anak-anak mana yang kurang mampu dan tidak. data yang telah di masukkan oleh siswa kesekolah di seleksi dengan baik agar tidak ada siswa yang mampu mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. b) Mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang di harapkan oleh perumus kebijakan kartu Indonesia pintar di Kabupaten Bulukumba yaitu aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh pihak pusat dan melalui informasi dari Dinas Pendidikan, juga mengadopsi dari aturan-aturan dari atas sekolah tidak menambah dan mengurangi hanya melakukan sosialisasi apa yang ada dan aturan apa yang telah

di tetapkan. c) Menyesuaikan pola-pola perilaku pemerintah terhadap kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Bulukumba yaitu dengan mengambil kebijakan lain karena aturan harus yang memiliki KPS yang menerima tapi masih ada siswa yang tidak memiliki KPS jadi siswa di beri keluasaan untuk memperoleh surat keterangan tidak mampu untuk di usulkan keatas sekolah sesuaikan saja nama siswa yang tidak dapat Kartu Indonesia Pintar untuk di masukkan di beasiswa tidak mampu melalui dana bos dan dana PDIP.

### 3. Implementing organization

Implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di kabupaten Bulukumba menggunakan model kebijakan Smith yang terdiri dari beberapa indikator salah satunya adalah Implementing organization. Implementing organization yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar. Untuk mengkaji indikator tersebut, perlu menggambarkan siapa yang melaksanakan dan yang terlibat dalam kartu Indonesia pintar. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.9

Table 4.9 :Yang melaksanakan dan yang terlibat dalam kartu Indonesia pintar

No.	Informan	Yang melaksanakan dan yang terlibat dalam KIP
1.	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggung jawab itu ada di dinas pendidikan kabupaten bulukumba, dan yang melaksanakan seksi peserta didik</li> <li>b. Yang menangani langsung adalah seksi peserta didik dan pembangunan karakter</li> <li>c. Yang terlibat di dalamnya ada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten bulukumba, sekolah/Lembaga pendidikan, lembaga penyalur</li> </ul>

2.	Kepala Sekolah SMA	a. yang mengelolah kepala sekolah, kesiswaan, para wali kelas b. Dinas pendidikan menyampaikan kepala sekolah itukan melalui proses jalur, misalnya informasi melalui pusat departemen pendidikan dan kebudayaan pusat sampaikan ke provinsi gubernur
3.	Kepala Sekolah SMP	Urusan kesiswaan langsung yang mengatur itu kemudian dia yang berkordinasi langsung dengan pihak dinas pendidikan dan pihak Bank
4.	Kepala Sekolah SD	Ada unsur dari dinas pendidikan, unsur sekolah, dan unsur pemerintah setempat, itu saja yang terlibat dan pihak Bank penyalur.
5.	Orangtua SMA	Orang tua, siswa, sekolah, bank penyalur, dinas pendidikan, pemerintah
6.	Orangtua SMP	pemerintah, dinas pendidikan, sekolah, Bank penyalur, kerja sama dengan orangtua siswa.
7.	Orangtua SD	Pemerintah, pihak sekolah, dinas pendidikan, bank penyalur,
8.	Siswa SMA	pihak sekolah, dinas pendidikan, pemerintah, bank penyalur bank BNI, siswa.
9.	Siswa SMP	pemerintah, kepala sekolah, guru, orangtua, bank penyalur.

Hasil reduksi data 2018

Pada table 4.9 yang melaksanakan dan yang terlibat dalam kartu Indonesia pintar yang di lakukan oleh para informan di atas bisa dilihat dari hasil wawancara di bawah ini, sebagaimana yang di ungkapkan oleh “Ay” salah satu orang tua siswa SD 7 matajang, yaitu :

“yang melaksanakan itu pemerintah, guru-guru dan dari dinas pendidikan. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2018)”.

Senada yang di ungkapkan oleh orang tua siswa “Nd”, yaitu :

“guru, kepala sekolah, pemerintah, dinas pendidikan. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di atas yang melaksanakan dan yang terlibat dalam kartu Indonesia pintar yaitu guru, kepala sekolah selaku yang melaksanakan di sekolah, dinas pendidikan yang mengatur Program kartu Indonesia pintar khusus di kabupaten bulukumba, dan pemerintah selaku pembuat kebijakan. Adapun pernyataan yang di kemukakan oleh “KHS” selaku kepala sekolah SD 7 tentang yang melaksanakan dan yang terlibat dalam kartu Indonesia pintar, yaitu :

“Ada unsur dari dinas pendidikan, unsur sekolah, dan unsur pemerintah setempat, itu saja yang terlibat dan pihak Bank penyalur. Jadi ada 4 unsur ini yang terlibat. Dari dinas pendidikan itu sendiri kemudian sekolah, sekolah itu yang memverifikasi apa membuat surat keterangan bahwa benar kemudian pihak pemerintah setempat apakah itu kelurahan atau RT/RW dan seterusnya apakah kepala desa, kemudian yang terlibat secara langsung juga adalah pihak Bank penyalur. (Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)”.

Dari hasil wawancara dengan informan di atas yang melaksanakan dan yang terlibat dalam kartu Indonesia pintar yaitu ada Dinas pendidikan, sekolah, pemerintah setempat, dan bank penyalur. Dari dinas pendidikan menyampaikan informasi ke setiap sekolah, kemudian sekolah memverifikasi mulai dari membuat surat keterangan siswa dan bank penyalur sebagai tempat pencairan dana siswa.

Selanjutnya yang melaksanakan dan yang terlibat dalam kartu Indonesia pintar di SMP 1 Kabupaten Bulukumba yang di kemukakan oleh salah satu orang tua siswa

“As”, yaitu :

“yang terlibat itu tentu tidak bisa terlepas dari pemerintah kecamatan khususnya juga di yah pelaksana penentu kebijakan kemudian yang menjadi sasaran itu masyarakat dalam hal ini siswa-siswa kurang mampu. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2018)”.

Dari hasil wawancara dengan informan di atas yaitu yang terlibat dan yang melaksanakan tidak lepas dari pemerintah kecamatan, orang tua siswa, dan siswa itu sendiri sebagai penerima bantuan. Senada yang di ungkapkan oleh orang tua siswa “Ni” yaitu :“yang terlibat itu semua mulai dari pemerintah, dinas pendidikan, sekolah, Bank penyalur, kerja sama dengan orangtua siswa. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2018)”. Pernyataan yang lebih kuat juga di ungkapkan oleh informan dari Kepala Sekolah SMP 1 Kabupaten Bulukumba “MHA” yaitu :

“Urusan kesiswaan langsung yang mengatur itu kemudian dia yang berkordinasi langsung dengan pihak dinas pendidikan dan pihak Bank. Dia ke dinas pendidikan melihat datanya yang ada datanya anak-anak di antar ke bank untuk buka rekening, terkait pencairan urusannya anak-anak dengan orangtua. (Hasil wawancara pada tanggal 13 Juli 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas yang melaksanakan dan yang terlibat yaitu untuk di sekolah SMP 1 itu sendiri selain kepala sekolah ada urusan kesiswaan langsung yang mengatur dan berkoordinasi langsung dengan pihak dinas pendidikan dan pihak bank. Yang mengurus data siswa itu urusan kesiswaan dan siswa di antar langsung ke bank untuk proses pencairan.

Selanjutnya yang melaksanakan dan yang terlibat dalam kartu Indonesia pintar di SMA 8 Kabupaten Bulukumba di kemukakan oleh informan “Am” orang tua siswa, yaitu :

“kalau yang terlibat itu termasuk orangtua siswa, siswa, kepala sekolah, guru dan BNI, yang melaksanakan itu pemerintah sama dinas pendidikan. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.

Senada yang di ungkapkan oleh informan siswa “Ag” yaitu :

“yang terlibat disini tentunya dari pihak sekolah itu sendiri, dari pihak KIP itu sendiri, dinas pendidikan dan pemerintah pusat. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di atas yaitu yang terlibat dan yang melaksanakan itu tentunya pihak sekolah guru yang terlibat dan kepala sekolah, siswa dan orang tua, bank penyalur yaitu Bank BNI, Dinas pendidikan, pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dan dari pihak Kartu Indonesia pintar itu sendiri. Pernyataan yang lebih kuat di kemukakan oleh informan “SYD” Kepala sekolah SMA 8 Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“yang mengelolah itu tentunya kepala sekolah, kesiswaan, para wali kelas. Kalo untuk di bulukumba itu tentu Dinas pendidikan menyampaikan kepala sekolah itukan melalui proses jalur, misalnya informasi melalui pusat departemen pendidikan dan kebudayaan pusat sampaikan ke provinsi gubernur, gubernur melalui dinas pendidikan kemudian dinas pendidikan ada cabangnya di bulukumba itu namanya cabang dinas wilayah 5 kabupaten bulukumba baru dinas cabang dinas menyampaikan kesekolah yaitu kepala sekolah, kepala sekolah sampaikan kepada kami sebagai pembantu kepala sekolah kemudian saya sebagai pembantu kepala sekolah kemudian sampaikan kepada Pembina masing-masing wali kelas..... (Hasil wawancara pada tanggal 2 Juli 2018)”.

Dari hasil wawancara dengan informan di atas yang terlibat dan yang melaksanakan yaitu departemen pendidikan dan kebudayaan pusat, provinsi gubernur, dinas pendidikan, kemudian dinas pendidikan ada cabangnya di bulukumba namanya cabang dinas wilayah 5 kabupaten bulukumba, dinas pendidikan kabupaten bulukumba, sekolah, Pembina masing-masing wali kelas. Pernyataan yang lebih keras di ungkapkan oleh informan “JWD” selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembentukan Karakter di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“Penanggung jawab itu ada di dinas pendidikan kabupaten bulukumba, dan yang melaksanakan seksi peserta didik, yaitu sayami. Jadi itu program Indonesia pintar ada di dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten bulukumba. Yang menangani langsung adalah seksi peserta didik dan pembangunan karakter. Yang terlibat di dalamnya ada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten bulukumba, sekolah/Lembaga pendidikan, lembaga penyalur. Nah itu yang terlibat. Maksudnya lembaga penyalur itu kan dia fungsinya menyalurkan, pada saat pencairannya itu kan melalui disitu, di Bank BRI. Kalau kita itu SD SMP di BRI, janganmi kita berbicara SMA/SMK karena dia lainmi dia punya anu, jadi kalau kita itu SD SMP di BRI.(Hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2018)”.

Jadi dapat di simpulkan dari para informan di atas bahwa yang melaksanakan dan yang terlibat dalam kartu Indonesia pintar di Kabupaten Bulukumba yaitu untuk SD, SMP dan SMA itu berbeda. Disini SD dan SMP masih berkoordinasi langsung dengan dinas pendidikan, dan SMA langsung dari departemen pendidikan dan kebudayaan pusat. Kartu Indonesia pintar di masing-masing sekolah pastinya ada kepala sekolah, guru, orangtua siswa, siswa, Bank penyalur yang terlibat dan yang melaksanakan. Bank penyalur untuk SD dan SMP itu Bank BRI, sedangkan SMA Bank BNI.

- a. Badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar

Badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal ini yang berfungsi atau yang mengatur kebijakan kartu Indonesia pintar di kabupaten bulukumba agar kebijakan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Maka Tabel keenam akan menunjukkan bahwa setiap Informan dalam

program KIP tersebut melaksanakan sesuai kebijakan yang ada. Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.10 : Badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar

No.	Informan	Badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan KIP
1.	Dinas Pendidikan	a. Monitoring dan evaluasi b. Pelaporan c. Pengaduan
2.	Kepala Sekolah SMA	a. departemen pendidikan dan kebudayaan b. pemerintah daerah c. dinas pendidikan kabupaten bulukumba d. sekolah
3.	Kepala Sekolah SMP	a. dinas pendidikan b. bank penyalur (BRI)
4.	Kepala Sekolah SD	a. dinas pendidikan b. sekolah c. pemerintah setempat d. bank penyalur (BRI)
5.	Orangtua SMA	a. pihak sekolah b. pemerintah c. bank penyalur (BNI)
6.	Orangtua SMP	a. pemerintah b. kepala sekolah c. guru yang bersangkutan d. dinas pendidikan
7.	Orangtua SD	a. kepala sekolah b. guru yang bersangkutan c. dinas pendidikan d. pemerintah
8.	Siswa SMA	a. pemerintah b. pihak sekolah c. pihak KIP d. guru yang bersangkutan e. dinas pendidikan f. orangtua g. bank penyalur (BNI)
9.	Siswa SMP	a. pemerintah

		b. kepala sekolah c. guru yang bersangkutan d. bank penyalur (BRI) e. dinas pendidikan
--	--	---

Hasil reduksi data 2018

Pada table 4.10 Badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar yang dilakukan oleh para informan di atas bisa dilihat dari hasil wawancara di bawah ini, sebagaimana yang di ungkapkan oleh “Im” salah satu orang tua siswa SD 7 matajang, yaitu :

“yang bertanggung jawab itu dek guru-guru sama kepala sekolahnya disekolah. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab Kartu Indonesia pintar di SD 7 menyampaikan ke guru wali kelas untuk memberitahukan ke siswanya. Senada yang di sampaikan oleh orang tua siswa “Ay” yaitu : “yang bertanggung jawab itu kepala sekolah dan gurunya (Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)”. Selanjutnya di kemukakan oleh “KHS” selaku kepala sekolah di SD 7, yaitu :

“Kalau unit-unitnya, saya kira di kalangan di Indonesia itu tadi yang 4 saya sebutkan hanya itu juga yang terlibat secara langsung, jadi dinas pendidikan baru sekolah, sekolah memverifikasi ke pemerintah setempat setelah berkasnya lengkap barulah di suruh Bank penyalur. (Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)”.

Dari hasil wawancara di atas yaitu Dinas pendidikan menyampaikan ke sekolah, kepala sekolah menyampaikan ke guru yang bersangkutan, dan sekolah memferivikasi ke pemerintah setempat berkas siswa, bank penyalur yaitu Bank BRI untuk proses pencairan dana siswa kurang mampu. Adapun Badan-badan pelaksana

atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di SMP 1 di ungkapkan oleh orang tua siswa “As” yaitu :

“untuk yang bertanggung jawab sebenarnya semua pihak, maksudnya semua pihak itu mulai dari yang penentu kebijakan sampai pada guru-guru di sekolah juga. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2018)”.

Senada yang di katakana oleh siswa “Mn” yaitu :

“pemerintah yang mengeluarkan kebijakan, dinas pendidikan yang mengatur KIP untuk Kabupaten Bulukumba, dan sekolah yang mendata siswa-siswa. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di atas yang bertanggung jawab pastinya semua pihak, mulai dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dinas pendidikan yang mengatur Kartu Indonesia pintar khususnya di kabupaten bulukumba, dan sekolah yang mengatur semua mulai dari berkas dan pencairan dana siswa. Adapun pernyataan yang di kemukakan oleh Kepala Sekolah SMP 1 Kabupaten Bulukumba “MHA” yaitu :

“Badan-badan pelaksana itu sekolah, dinas pendidikan, Bank BRI itu saja.(Hasil wawancara pada tanggal 13 Juli 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan di atas yaitu yang bertanggung jawab untuk di SMP 1 itu ada dinas pendidikan, sekolah dan bank penyalur atau Bank BRI, alurnya sekolah dapat informasi mengenai kartu Indonesia pintar dari dinas pendidikan untuk di sampaikan ke guru yang bersangkutan di sekolah kemudian bekerja sama dengan bank penyalur. Selanjutnya Badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di kemukakan oleh informan “Nu” salah satu orang tua siswa di SMA 8 Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“kalau yang bertanggung jawab karena di sekolah itu, misalnya pencairan kalau sudah pencairan maka orangtua dimintai rincian pembelanjannya kemudian di laporkan barulah BNI bisa cairkan. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.

Dari hasil wawancara di atas yaitu sekolah selaku yang mengatur semua mulai pendataan siswa sampai pengusulan berkas ke pusat, setelah nama penerima dana Kartu Indonesia pintar telah terbit maka sekolah disini mempunyai peran penting yaitu memberitahu ke siswa dan menyuruh untuk proses pencairan dananya di Bank BNI. Senada yang di ungkapkan oleh siswa “Nn” yaitu : pemerintah, dan sekolah selaku yang mengatur semua pendataan siswa untuk menerima KIP. (Hasil wawancara pada tanggal 11 Agustus 2018)”. Selanjutnya di kemukakan oleh informan “SYD” selaku kepala sekolah SMA 8 Bulukumba, yaitu :

“yah tentunya yang bertanggung jawab itu tentunya yang saya sampaikan tadi karena ini birokrasinya dari pusat, pusat ke kabupaten, kabupaten kan tentu kepala daerah kemudian kepala daerah sampaikan kepada ke kepala dinas pendidikan yang berhubungan dengan siswa toh, bisa juga sampaikan juga ke kepala dinas sosial biasanya itu ada dinas sosial itu data siswa disini apa masih aktif atau tidak, kemudian kerja sama dengan kepala camat, camat sampaikan kepada kepala desa/kepala lurah untuk mengusulkan dan mendata peserta didik ataupun masyarakat yang tidak mampu, seperti itu. Yang bertanggung jawab KIP di sekolah ini untuk pengelolannya itu tentunya kepala sekolah.(Hasil wawancara pada tanggal 2 Juli 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas yaitu yang bertanggung jawab tantunya awal mula dari pusat, pusat ke kabupaten, di kabupaten ada kepala daerah yang menyampaikan ke dinas pendidikan yang berhubungan dengan siswa. Dinas pendidikan menyampaikan kesekolah, yaitu kepala sekolah untuk menyampaikan ke guru yang bersangkutan. Guru disini bekerja sama dengan orang tua siswa dan bank Penyalur. Pernyataan yang lebih keras di ungkapkan oleh “JWD”

selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembentukan Karakter di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“Bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan dan capaian PIP. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lakukan secara internal oleh sekolah dan komite sekolah serta eksternal oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, Dinas pendidikan Provinsi dan Direktorat Teknis.....(Hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2018)”.

Jadi dapat di simpulkan dari para informan di atas bahwa Badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di Kabupaten Bulukumba yaitu yang bertanggung jawab semua pihak mulai dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dinas pendidikan yang mengatur Kartu Indonesia pintar khususnya di kabupaten bulukumba, dan sekolah yang mengatur semua mulai dari berkas dan pencairan dana siswa, bank penyalur untuk SD dan SMP bank BRI untuk SMA bank BNI.

Dari hasil penelitian di atas di simpulkan bahwa implementing organization Yang melaksanakan dan yang terlibat dalam kartu Indonesia pintar di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut : mekanisme pemberian kartu Indonesia pintar untuk SD, SMP, SMA itu berbeda. SD dan SMP berkoordinasi langsung dengan dinas pendidikan, dan SMA langsung dari departemen pendidikan dan kebudayaan pusat. a) Badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di Kabupaten Bulukumba yaitu yang bertanggung jawab semua pihak mulai dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dinas pendidikan yang mengatur Kartu Indonesia pintar khususnya di kabupaten bulukumba, dan sekolah yang mengatur semua mulai dari berkas dan pencairan dana siswa, bank penyalur untuk SD dan SMP bank BRI untuk SMA bank BNI.

#### **4. Environmental Factors**

Implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di kabupaten Bulukumba menggunakan model kebijakan Smith yang terdiri dari beberapa indikator salah satunya adalah Environmental Factors. Environmental Factors yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar seperti aspek budaya yaitu kebiasaan yang oleh pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan, sosial yaitu hubungan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, ekonomi yaitu dana yang di gunakan dalam pelaksanaan program, dan politik yaitu bagaimana suatu program yang di laksanakan tanpa intervensi dari suatu golongan dan betul-betul tepat sasaran. Untuk menganalisis indikator tersebut, perlu menggambarkan bagaimana Pengaruh eksternal dalam program kartu Indonesia pintar. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.11

Tabel 4.11 : Pengaruh eksternal dalam program kartu Indonesia pintar

No.	Informan	Pengaruh eksternal dalam program kartu Indonesia pintar
1.	Dinas Pendidikan	a. Banyak nya orangtua siswa yang mengadu kalau masih ada masyarakat yang mendapatkan bantuan padahal mampu.
2.	Kepala Sekolah SMA	c. sangat membantu terhadap pembiayaan peserta didik dengan KIP itu d. masyarakat sudah di beritahu bahwa KIP ini hanya untuk siswa kurang mampu jadi tidak ada lagi yang complain.
3.	Kepala Sekolah SMP	a. sangat bagus karena anak-anak yang tidak mampu terbantu dan juga memotivasi mereka untuk terus giat belajar.
4.	Kepala Sekolah SD	a. Orangtua siswa yang awalnya kurang bersemangat b. Setelah ada bantuan dana semua orang tua siswa kembali bersemangat menyekolahkan anaknya

5.	Orangtua SMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengaruhnya sangat baik karena bisa membantu anak yang kurang mampu bisa bersaing dengan teman-temannya khususnya dalam pakaian dan lain sebagainya.</li> <li>b. pengaruh luarnya mendukung masyarakat terutama itu yang tidak mampu.</li> </ul>
6.	Orangtua SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. sangat berpengaruh dek karena itu yang masyarakat miskin yang kurang mampu bisa terbantuan sedikit biaya sekolahnya.</li> <li>b. tidak adaji karena ini memang program pemerintah.</li> </ul>
7.	Orangtua SD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menurutku saya dek tidak adaji pengaruhnya.</li> <li>b. merespon baikji dek karena dapat membantu perekonomian, kayak saya ini anakku kodong.</li> </ul>
8.	Siswa SMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengaruh luar kebijakan KIP itu sangat membantu kak selain meringankan orangtua dalam memenuhi perlengkapan sekolah juga bermanfaat bagi siswa sendiri.</li> <li>b. pengaruh luarnya itu memberikan dorongan kepada para siswa untuk lebih giat atau lebih bersungguh-sungguh dalam belajar agar bisa mendapatkan dana KIP di semester-semester berikutnya.</li> <li>c. kalau pengaruh luarnya kayaknya tidak ada.</li> </ul>
9.	Siswa SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. sangat bagus karena bisa membantu keluarga tidak bisa membeli sehingga dapat menerima kartu KIP dan membeli perlengkapan sekolah.</li> <li>b. kalau pengaruh dari luar itu kak bagusji</li> </ul>

Hasil reduksi data 2018

Pada tabel 4.11 Pengaruh eksternal dalam program kartu Indonesia pintar yang di lakukan oleh para informan di atas bisa dilihat dari hasil wawancara di bawah ini, sebagaimana yang di ungkapkan oleh “Sm” salah satu orang tua siswa SD 7 matajang, yaitu :

“merespon baikji dek karena dapat membantu perekonomian, kayak saya ini anakku kodong.(Hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2018)”.

Lain lagi yang ungkapkan oleh “Mw” orang tua siswa, yaitu :

“menurutku saya dek tidak adaji pengaruhnya.(Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di atas yaitu ternyata setiap informan berbeda ada yang mengatakan pengaruh eksternalnya dapat membantu perekonomian siswa, informan yang lain mengatakan tidak ada pengaruhnya. Adapun yang di kemukakan oleh “KHS” selaku kepala sekolah di SD 7, yaitu :

“kalau pengaruh eksternal ada juga karena ternyata orangtua siswa kita yang ada di sekitar sini yang tadinya mungkin memiliki semangat kurang ini tentang sekolah, semuanya bersemangat bahwa anak-anak kita kalau masuk itu ada tambahan dana, jadi dia merasa bersemangat menyekolahkan anaknya walaupun dana keterbatasan sehingga dana, karena sekarang itu orangtua berfikir apalagi di sekolah ini kebanyakan dari pesisir ini memiliki mata pencaharian yah musimana dia buruh itu di pantai penanam rumput laut..... (Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)”.

Dari hasil wawancara di atas yaitu pengaruh eksternal adanya orang tua yang kurang semangat untuk menyekolahkan anaknya Karena orang tua berfikir dari segi biaya dan mata pencahariannya musiman, tapi dengan adanya program pemerintah Kartu Indonesia pintar orangtua sangat merespon baik dan mereka antusias untuk meyekolahkan kembali anaknya.

Adapun Pengaruh eksternal dalam program kartu Indonesia pintar di SMP 1 Kabupaten Bulukumba yang di kemukakan oleh salah satu orang tua siswa “Im”, yaitu :

“sangat berpengaruh dek karena itu yang masyarakat miskin yang kurang mampu bisa terbantuan sedikit biaya sekolahnya. (Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)”.

Senada yang ungkapkan oleh siswa “Hh” yaitu

“sangat mendukung karena ada kebijakan seperti ini. (Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)”.

Berdarkan hasil wawancara di atas pengaruh eksternal dalam program kartu Indonesia pintar yaitu pengaruhnya sangat bagus karena dengan adanya bantuan masyarakat miskin bisa kembali bersekolah dan membeli perlengkapan sekolah. Pernyataan ini di perkuat oleh Kepala Sekolah SMP 1 Kabupaten Bulukumba “MHA” yaitu :

“Yah jelas pengaruhnya bagus kenapa Karena pertama ini jelas memengaruhi dalam hal bahwa anak-anak itu betul-betul tidak mampu itu terbantu kemudian ini juga dapat memotivasi dia untuk terus giat belajar Karena dia pikir kita ini dikasi dana atau bantuan dari pemerintah melalui KIP itu. (Hasil wawancara pada tanggal 13 Juli 2018)”.

Dari hasil wawancara di atas yaitu pengaruhnya sangat bagus karena anak-anak yang mendapatkan dana bantuan bisa bisa membiayai terutama soal pendidikan seperti membeli perlengkapan sekolah, uang saku, les tambahan, dan anak-anak bisa lebih giat belajar tidak di bebani lagi soal biaya. Selanjutnya pengaruh eksternal dalam program kartu Indonesia pintar di kemukakan oleh informan “Nu” salah satu orang tua siswa di SMA 8 Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“saya rasa pengaruhnya sangat baik karena bisa membantu anak yang kurang mampu bisa bersaing dengan teman-temannya khususnya dalam pakaian dan lain sebagainya. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.

Senada yang di katakan oleh “Sg” orangtua siswa, yaitu :

“pengaruh luarnya banyak yang mendukung masyarakat-masyarakat terutama itu yang tidak mampu. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas pengaruh eksternal dalam program kartu Indonesia pintar yaitu pengaruhnya sangat baik karena siswa yang kurang mampu ini bisa juga memakai seragam selayaknya siswa kesekolah, orang tua juga senang dengan adanya kebijakan kartu Indonesia pintar ini. adapun yang di ungkapkan oleh siswa “Ag” yaitu :

“kalau pengaruh luarnya kayaknya tidak ada. (Hasil wawancara pada tanggal 12 Agustus 2018)”.

Pernyataan yang lebih kuat di kemukakan oleh informan “SYD” Kepala sekolah SMA 8 Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“Kalau eksternalnya kan ada dua yah luar dan dalam. Sebenarnya pengaruh eksternal itu sangat membantu terhadap pembiayaan peserta didik dengan KIP itu. Dengan adanya KIP sehingga anak-anak terbantu untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan sekolahnya seperti membeli buku, buku tidak di beli toh tapi kebutuhan-kebutuhan sekolah itu yang menyangkut masalah hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan dari segi pakaian dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Untuk complainnya yah memang tidak ada anak-anak disini yang complain bahwa saya dapat dia tidak dapat karena yang jelas kita sudah sudah sampaikan memang kita kirim ini adalah yang penting utama itu yang memiliki KIP. (Hasil wawancara pada tanggal 2 Juli 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas ada yang mengatakan pengaruh eksternalnya tidak ada karena kebijakan ini memang di buat oleh pemerintah. Namun untuk di SMA 8 pengaruhnya itu sangat membantu terhadap pembiayaan peserta didik, dana yang di dapatkan bisa tercukupi untuk pembelian perlengkapan sekolah.

Penyataan yang lebih keras di sampaikan oleh “JWD” selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembentukan Karakter di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“Adanya biasa bisik-bisik tetangga ada dapat ada tidak, sama yang saya jelaskan kemarin begini kaitannya dengan orang yang mengadu itu karena di temukannya di masyarakat sepantasnya tidak mendapatkan trus dia dapat kartu, itu sampai kita kesini di kabupaten mengadukannya itu protes awalnya kami dari tim pelaksana kabupaten itu menyampaikan bahwa tentang penganuliran ini kita tidak bisa karena belum ada perintah, kita tidak tau bahwa yang bersangkutan itu yang anda protes kesini ada orang kaya, kita taunya pada saat itu sekolah melaporkan ke dapodik sekolah itu dia alasan kita itu punya KPS.....(Hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2018)”.

Jadi dapat di simpulkan dari para informan di atas bahwa Pengaruh eksternal dalam program kartu Indonesia pintar yaitu setiap jawaban informan berbeda ada yang mengatakan tidak ada pengaruh eksternal dan ada juga yang mengatakan sangat berpengaruh. Tapi lebih banyak yang mengatakan berpengaruh karena masyarakat yang mendapatkan bantuan dari keluarga yang kurang mampu, dengan adanya bantuan ini mereka sudah bisa membiayai pendidikan anak mereka. Di tambah lagi ada siswa yang hampir putus sekolah tapi namun Alhamdulillah sudah kembali bersekolah.

- a. lingkungan mempengaruhi dari perspektif budayanya terhadap jalannya kartu Indonesia pintar

lingkungan mempengaruhi dari perspektif budayanya dalam hal ini bagaimana kebijakan kartu Indonesia pintar bisa di terima oleh masyarakat dengan baik. Maka Tabel kesebelas akan menunjukkan bahwa setiap Informan dalam lingkungan mempengaruhi dari perspektif budayanya. Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut :

tabel 4.12 : Lingkungan mempengaruhi dari perspektif budayanya terhadap jalannya kartu Indonesia pintar

No.	Informan	lingkungan mempengaruhi dari perspektif budayanya terhadap jalannya KIP
1.	Dinas Pendidikan	dampaknya karena itu tadi. Masalahnya disini pendataan tidak tepat sasaran. Sebagian kecil ada beberapa persen itu yang tidak tepat sasaran.
2.	Kepala Sekolah SMA	Di lihat dari latar belakang keadaan keluarganya keadaan kondisi fisik daripada tempat tinggalnya, kemudian pendapatan orangtuanya
3.	Kepala Sekolah SMP	Lingkungan itu jelas memengaruhi karena karena rata-rata yang dapat ini banyak di lingkungan pesisir pantai
4.	Kepala Sekolah SD	sangat mendukung sekali yah utamanya dari tokoh-tokoh masyarakat sangat mendukung karena memang ini yang di harapkan semuanya dan itu merupakan sesuatu budaya bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik tidak ada lagi istilah pemaksaan
5.	Orangtua SMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mendukung juga,lingkungan sekitar itu maksudnya. Karena dia memperhatikan orang tidak mampu.</li> <li>b. lingkungan sangat mendukung dengan adanya ini bantuan.</li> </ul>
6.	Orangtua SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. sangat berpengaruh supaya dilingkungan yang rata-rata penduduknya warga tidak mampu mungkin ikut termotivasi juga untuk dukung anaknya agar mendapatkan KIP.</li> <li>b. sebenarnya kalau lingkungan itu sudah masuk dalam eksternal, lingkungan itu sangat memberi pengaruh karena biasanya kan data kita bisa dapatkan itu dari lingkungan atau tetangga-tetangga yang tau bahwa disini si A sebenarnya wajib itu sebenarnya layak dapat tabe di kasiki itu,</li> </ul>

		jadi untuk mendapatkan data yang valid sebenarnya peranannya. c. kalau pengaruh lingkungan itu saya rasa kejujuran dari masyarakat betul-betulkah dia tidak mampu karena takutnya ada yang mampu trus mau juga dapat KIP.
7.	Orangtua SD	a. kalau lingkungan itu sangat mendukung karena pemerintah memberikan bantuan yang seperti ini. b. sangat mendukungji toh karena mengurangi biaya orangtua yang tidak mampu
8.	Siswa SMA	a. saya pikir sangat bagus yah karena dapat membantu di bidang finansialnya itu sendiri. b. pengaruh lingkungannya yaitu siswa yang mendapatkan dana KIP, perlengkapannya dapat sama dengan siswa-siswa yang mampu dan mereka tidak memiliki perbedaan antara siswa yang mampu dengan siswa yang tidak mampu
9.	Siswa SMP	a. bagusji juga kak, karena banyak ji masyarakat yang terbantukam b. lingkungan itu responnya sangat positif

Hasil reduksi data 2018

Pada table 4.12 lingkungan mempengaruhi dari perspektif budayanya terhadap jalannya kartu Indonesia pintar yang di lakukan oleh para informan di atas bisa dilihat dari hasil wawancara di bawah ini, sebagaimana yang di ungkapkan oleh “Un” salah satu orang tua siswa SD 7 matajang, yaitu :

“kalau lingkungan itu sangat mendukung karena pemerintah memberikan bantuan yang seperti ini. (Hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2018)”.

Senada yang di ungkapkan oleh “Nar” orang tua siswa, yaitu :

“sangat mendukungji toh karena mengurangi biaya orangtua yang tidak mampu. (Hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu untuk dari perspektif budayanya sangat mendukung karena mengurangi beban orang tua dalam segi biaya pendidikan

anaknya dengan pemberian bantuan Kartu Indonesia pintar. Adapun pernyataan yang di kemukakan oleh “KHS” selaku kepala sekolah di SD 7, yaitu :

“Artinya kalau dari segi lingkungan sekitar sekolah sangat mendukung sekali yah utamanya dari tokoh-tokoh masyarakat sangat mendukung karena memang ini yang di harapkan semuanya dan itu merupakan sesuatu budaya bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik tidak ada lagi istilah pemaksaan, kan dulu nanti di paksa anak-anak baru mau sekolah sekarang tidak ada lagi, sekiranya itu menciptakan budaya bahwa pendidikan itu adalah hal yang wajib di laksanakan. (Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)”.

Dari hasil wawancara dengan infoman di atas yaitu dengan adanya Program kartu Indonesia pintar anak-anak tidak lagi di paksa untuk bersekolah, apalagi dari tokoh-tokoh masyarakat sangat mendukung karena memang ini yang di harapkan. Anak-anak di sekolah bisa lebih rajin dan berprestasi. selanjutnya pernyataan di kemukakan oleh satu orang tua siswa “Ni”, yaitu :

“sangat berpengaruh supaya dilingkungan yang rata-rata penduduknya warga tidak mampu mungkin ikut termotivasi juga untuk dukung anaknya agar mendapatkan KIP. Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2018)”.

Senada dengan yang di ungkapkan oleh “As” orang tua siswa, yaitu :

“sebenarnya kalau lingkungan itu sudah masuk dalam eksternal, lingkungan itu sangat memberi pengaruh karena biasanya kan data kita bisa dapatkan itu dari lingkungan atau tetangga-tetangga yang tau bahwa disini si A sebenarnya wajib itu sebenarnya layak dapat tabe di kasiki itu, jadi untuk mendapatkan data yang valid sebenarnya peranannya. ( Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di atas yaitu sangat berpengaruh karena dilingkungan rata-rata penduduk kurang mampu dan kebanyakan data yang di dapatkan dari tetangga-tetangga bahwa masyarakat di sekitarnya banyak yang berhak dapat bantuan. Siswa dan orangtua yang di data di beri motivasi dan

dukungan dari untuk mendapatkan Kartu Indonesia pintar. Adapun yang dikatakan oleh siswa “Aw” yaitu : bagusji juga kak, karena banyak ji masyarakat yang terbantuan. ( Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2018)”. Selanjutnya lingkungan mempengaruhi dari perspektif budayanya terhadap jalannya kartu Indonesia pintar di kemukakan oleh Kepala Sekolah SMP 1 Kabupaten Bulukumba “MHA” yaitu :

“Lingkungan itu jelas memengaruhi karena begini karena rata-rata yang dapat ini banyak di lingkungan pesisir pantai, kan di sana rata-rata , disini kita mendapat itu rata-rata di pesisir pantai. (Hasil wawancara pada tanggal 13 Juli 2018)”.

Dari hasil wawancara di atas yaitu lingkungan jelas mempengaruhi karena di lihat dari kondisi masyarakat yang rata-rata dari lingkungan pesisir pantai, dan Kartu Indonesia pintar ini memang di prioritaskan yang mendapat bantuan itu dari kalangan masyarakat kurang mampu. Sekolah mendata masyarakat kebanyakan yang dari pesisir pantai.

Adapun di kemukakan oleh informan “ML” salah satu orang tua siswa di SMA 8 Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“bagus karena dengan adanya KIP itu siswa-siswa yang tidak mampu bisa berlanjut sekolah. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.

Senada yang di ungkapkan oleh siswa “Ag”, yaitu :

“saya pikir sangat bagus yah karena dapat membantu di bidang finansialnya itu sendiri. (Hasil wawancara pada tanggal 12 Agustus 2018)”.

Dari hasil wawancara di atas pengaruhnya sangat bagus karena siswa yang kurang mampu yang putus sekalo bisa kembali bersekolah, kebijakan Kartu Indonesia

pintar ini sangat berpengaruh dengan masyarakat apalagi yang masyarakat golongan menengah kebawah. Masyarakat di beri berupa dana untuk anaknya sebagai biaya pendidikan. demikian pula yang di oleh siswa “Nr” yaitu : “siswa yang tidak mampu yang mendapatkan KIP tidak minder kak saman teman-temannya yang lain yang mampu jadi dia tidak minder dari segi pakaian nya semua sama di sekolah.(Hasil wawancara pada tanggal 12 Agustus 2018)”. Selanjutnya informasi di kemukakan oleh informan “SYD” selaku kepala sekolah SMA 8 Bulukumba, yaitu :

“Kalau dari lingkungan itu jelas dia latar belakang keadaan keluarganya keadaan kondisi fisik daripada tempat tinggalnya, kemudian pendapatan orangtuanya, itu dari factor budaya toh. Maka dilihat dari syarat-syarat yang seperti itu akan di usulkan melalui langsung ke kepala desanya misalnya atau ketua RW nya seperti itu menurut organisasinya toh ataukah ada semacam lembaga yang mendata masyarakat tidak mampu termasuk peserta didik yang ada di sekolah-sekolah. Kalau di SMA 8 tentunya memang mereka perlihatkan itu KIP nya itu berarti mereka sudah melalui proses dari kantor desanya kantor lurahnya. (Hasil wawancara pada tanggal 2 Juli 2018)”.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas yaitu sekolah SMA 8 melihat lingkungan dari perspektif budaya nya melalui latar belakang keadaan keluarga siswa, keadaan kondisi fisik tempat tinggalnya, pendapatan orang tua. Kalau sudah memenuhi syarat sebagai penerima Kartu Indonesia pintar maka di usulkan untuk mengurus surat keterangan mampu bagi yang belum punya. Pernyataan yang lebih keras di ungkapkan oleh “JWD” selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembentukan Karakter di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“.....inilah keadaan yang bikin protes di masyarakat sekitar kenapa katanya ini dapat, itumi biasa kadang sampai kekita disini, apa bisa saya jawab, saya sampaikan pak data awal ini KPS itu kemarin kita tidak tau apa-apa, saya jelaskan lagi kembali bahwa tabe ini KIP PIP ini pak bermula dari KPS, KPS ini pekerjaannya kementerian sosial, kalau di kabupaten BPJS, BPS lah yang

turun mendata, yang mendata ini yang mendata kemarin di desa-desa di pelosok itu orangya desa orangnya lurah. Contoh saya turun orangnya desa orangnya lurah kenalki tidak di hiraukan mi itu bahwa mapanki mampuki karena kenalki toh, masuk di kirim kepusat inilah, sebenarnya ini yang kudata, kita yang kudata karena kenalki. Ada dampaknya karena itu tadi. Masalahnya disini pendataan tidak tepat sasaran. Sebagian kecil ada beberapa persen itu yang tidak tepat sasaran. (Hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2018)".

Jadi dapat di simpulkan dari para informan untuk lingkungan mempengaruhi dari perspektif budayanya terhadap jalannya kartu Indonesia pintar di atas bahwa mengurangi beban orang tua dalam segi biaya pendidikan anaknya, masyarakat sangat mendukung karena memang ini yang di harapkan, dilingkungan rata-rata penduduk kurang mampu dan kebanyakan data yang di dapatkan dari tetangga-tetangga bahwa masyarakat di sekitarnya banyak yang berhak dapat bantuan. Siswa dan orangtua yang di data di beri motivasi dan dukungan dari untuk mendapatkan Kartu Indonesia pintar karena di lihat dari kondisi masyarakat yang rata-rata dari lingkungan pesisir pantai, dan Kartu Indonesia pintar ini memang di prioritaskan yang mendapat bantuan itu dari kalangan masyarakat kurang mampu yang putus sekolah bisa kembali bersekolah, Kalau sudah memenuhi syarat sebagai penerima Kartu Indonesia pintar maka di usulkan untuk mengurus surat keterangan mampu bagi yang belum punya. Karena masih ada beberapa persen tidak tepat sasaran.

b. masyarakat menerima program kartu Indonesia pintar

masyarakat menerima program kartu Indonesia pintar dalam hal ini bagaimana pemerintah dalam memberikan kebijakan sehingga dapat di terima oleh masyarakat dengan baik. Maka Tabel ke duabelas akan menunjukkan bahwa setiap

Informan dalam menerima program kartu Indonesia pintar tersebut sesuai kebijakan pemerintah .Hal ini bisa dilihat dalam table berikut :

Tabel 4.13 : Masyarakat menerima program kartu indonesia pintar

No.	Informan	masyarakat menerima program kartu Indonesia pintar
1.	Dinas Pendidikan	
2.	Kepala Sekolah SMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Respon masyarakat yang pernah di undang menerima dengan senang hati</li> <li>b. respon orangtua itu sangat baik terhadap adanya beasiswa tidak mampu ini karena bisa membantu masyarakat yang tidak mampu.</li> </ul>
3.	Kepala Sekolah SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. sangat terbantu dengan adanya ini tidak terlalu terbebani lagi</li> </ul>
4.	Kepala Sekolah SD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kalau responnya sangat luar biasa sekali mereka begitu sangat terbantu</li> <li>b. sangat berterima kasih tentunya terhadap pemerintah dengan adanya ini kegiatan seperti ini</li> </ul>
5.	Orangtua SMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. saya selaku orangtua di undang oleh pihak sekolah untuk mengadakan pertemuan dan di mintai rincian pembelanjaan untuk menemani anak saya ke BNI.</li> <li>b. proses penerimaannya itu kalau memang sudah ada sudah cair di BNI maka siswa atau anak itu sendiri sudah di mintai nota-nota pembelanjaannya kemudian di laporkan kepada sekolah dan sekolah yang memfasilitasi anak untuk ke BNI untuk pencairannya dan itu anak langsung yang kesana ke BNI cuman di fasilitasi oleh pihak sekolah yang berwenang kesana.</li> </ul>
6.	Orangtua SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. anak-anak beserta orangtua di panggil oleh guru-guru bersangkutan lalu di antar ke Bank dengan menyertakan kartu keluarga, KTP dan KIP.</li> <li>b. prosesnya itu di ambil di bank BRI biasa itu anakku pergi ambil sama gurunya, tapi sebelumnya itu nak ada namanya anakku di sekolah sebagai penerima.</li> </ul>
7.	Orangtua SD	iya kalau maumi itu terima anakku mintaki itu KIP nya di bawa kesekolah baru gurunya yang temaniki biasa juga kutemani biasa juga tidak, yang penting

		iyya adaji anakku do karena dia mau menandatangani.
8.	Siswa SMA	proses penerimaan dana KIP itu kak setelah kita di data di sekolah dan terpilih menjadi penerima KIP kita itu di bawa ke Bank BNI terus dengan membawa Kartu indonesia pintar dengan buku tabungan.
9.	Siswa SMP	kalau itu kak samaja guruku pergi di Bank BRI untuk cairkan uangku bawaka kartu keluarga sama KIP ku.

Hasil reduksi data 2018

Pada tabel 4.13 masyarakat menerima program kartu Indonesia yang dilakukan oleh para informan di atas bisa dilihat dari hasil wawancara di bawah ini, sebagaimana yang di ungkapkan oleh “Sm” salah satu orang tua siswa SD 7 matajang, yaitu :

“iya kalau maumi itu terima anakku mintaki itu KIP nya di bawa kesekolah baru gurunya yang temaniki biasa juga kutemani biasa juga tidak, yang penting iyya adaji anakku do karena dia mau menandatangani. (Hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2018)”.

Pendapat di tambahkan oleh orang tua siswa “Un” yaitu :

“kalau masalah penerimaan dananya itu anakku sama gurunya pergi di BRI untuk terima itu uangnya. (Hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2018)”.

Dari hasil wawancara dengan para informasi di atas untuk menerima program kartu Indonesia pintar yaitu siswa ke Bank BRI untuk proses pencairan dananya membawa berkas seperti Kartu Indonesia pintar, fotocopy kartu keluarga. Guru dan orang tua menemani siswa tersebut untuk mencairkan dana. Selanjutnya pernyataan di kemukakan oleh “KHS” selaku kepala sekolah di SD 7, yaitu :

“Kalau responnya sangat luar biasa sekali mereka begitu sangat terbantu, sangat berterima kasih tentunya terhadap pemerintah dengan adanya ini kegiatan seperti ini. Masalah siswa yang miskin trus belum dapat dana KIP, biasanya memang ada yang datang melapor, kenapa anak saya tidak dapat sementara termasuk juga siswa atau orangtua yang tidak mampu, saya bilang begini sesungguhnya bukan kita yang menentukan kita sekedar mengusul nanti pihak di atas di pusat itu yang menentukan siapa-siapa orangnya mungkin dia pake penilaian tersendiri atau standar tersendiri namun saya mengatakan begini bersabar saja karena biasa ini di gilir kan ternyata memang di gilir, biasa ada namanya tahun ini nanti hilang, yang belum dapat ada lagi muncul.....(Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)”.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas masyarakat menerima program kartu Indonesia pintar dengan sangat baik, masalah yang biasa ada di setiap sekolah yaitu masih ada siswa yang kurang mampu belum mendapat dan siswa yang mampu dapat, masalah ini yang banyak masyarakat datang melapor. Tapi sesungguhnya bukan sekolah yang menentukan sekolah hanya sekedar mengusul dan pihak atas yang menentukan, ada penilaian tersendiri atau standar tersendiri.

Adapun masyarakat menerima program kartu Indonesia di SMP 1 Kabupaten Bulukumba yang di kemukakan oleh salah satu orang tua siswa “Id”, yaitu :

“anak-anak beserta orangtua di panggil oleh guru-guru bersangkutan lalu di antar ke Bank dengan menyertakan kartu keluarga, KTP dan KIP. (Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)”.

Senada yang di ungkapkan oleh orang tua siswa “Iu” yaitu :

“prosesnya itu di ambil di bank BRI biasa itu anakku pergi ambil sama gurunya, tapi sebelumnya itu nak ada namanya anakku di sekolah sebagai penerima. (Hasil wawancara pada tanggal 20 juli 2018)”.

Dari hasil wawancara dengan para informan di atas yaitu masyarakat menerima program kartu Indonesia pintar setelah sekolah mengusulkan ke pusat dan nama penerima telah di tentukan. Sekolah menginformasikan ke siswa yang ada

namanya untuk proses pencairannya di Bank BRI dengan membawa persyaratannya. Pernyataan di kemukakan oleh Kepala Sekolah SMP 1 Kabupaten Bulukumba “MHA” yaitu :

“Sangat merespon kenapa karena mereka sangat terbantu toh utamanya yang tidak mampu itu sangat terbantu dengan adanya ini tidak terlalu terbebani lagi dalam arti misalnya dia mau belikan perlengkapan anak-anaknya tas, sepatu, baju dengan adanya ini bisa terbantu. (Hasil wawancara pada tanggal 13 Juli 2018)”.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas yaitu masyarakat sangat merespon baik karena dengan adanya bantuan mereka sangat terbantu, soal biaya pendidikan yang menjadi persoalan utama bagi masyarakat kurang mampu. Sekarang masyarakat sangat antusias dengan adanya kebijakan ini karena siswa menerima dana bantuan setiap semester untuk pembelian perlengkapan sekolah.

Selanjutnya masyarakat menerima program kartu Indonesia di kemukakan oleh informan “Am” salah satu orang tua siswa di SMA 8 Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“saya selaku orangtua di undang oleh pihak sekolah untuk mengadakan pertemuan dan di mintai rincian pembelanjaan untuk menemani anak saya ke BNI. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.

Senada yang di ungkapkan oleh siswa “Nr” yaitu :

“proses penerimaan dana KIP itu kak setelah kita di data di sekolah dan terpilih menjadi penerima KIP kita itu di bawa ke Bank BNI terus dengan membawa Kartu indonesia pintar dengan buku tabungan.(Hasil wawancara pada tanggal 24 Agustus 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di atas yaitu setelah sekolah mnegusulkan nama peserta didik kepusat, maka terbitlah SK siswa yang

penerima dana bantuan. Setelah itu orang tua di undang ke sekolah untuk di adakan pertemuan dan di minta rincian pembelanjaan untuk menemani anaknya pada proses pencairan. Pernyataan yang lebih kuat di kemukakan oleh informan “SYD” selaku kepala sekolah SMA 8 Bulukumba, yaitu :

“Kalau respon masyarakat yang pernah kita undang untuk menerima itu tentu dia menerima dengan senang hati malahan beasiswa yang diterima itu seandainya bisa di tambah, ditambah lagi karena respon masyarakat sangat besar, respon orangtua itu sangat baik terhadap adanya beasiswa tidak mampu ini karena bisa membantu masyarakat yang tidak mampu. (Hasil wawancara pada tanggal 2 Juli 2018)”.

Dari hasil wawancara dengan informan di atas yaitu masyarakat di undang untuk menerima Kartu Indonesia pintar anaknya dengan senang hati, karena dengan adanya kebijakan ini masyarakat yang kurang mampu anaknya bisa bersekolah kembali, andai dana nya bisa di tambah, di tambah lagi. Pernyataan yang lebih keras di ungkapkan oleh “JWD” selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembentukan Karakter di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“Perlu kita ketahui bersama di, bahwa ada tujuannya disini, ini barang di peruntukkannya untuk orang miskin, saya selaku orang miskin di kasika bagaimana kira tidak kuterima.(Hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2018)”.

Jadi dapat di simpulkan dari para informan di atas bahwa masyarakat menerima program kartu Indonesia yaitu kebijakan kartu Indonesia pintar di peruntukkan untuk siswa yang kurang mampu, siswa yang sekolah SD, SMP, SMA bisa menerima bantuan. Siswa yang kurang mampu yang mendapatkan dana membelanjakan uangnya dengan baik sesuai arahan dari sekolah bahwa dana tersebut

harus tepat sasaran. Sekolah mengundang orangtua ke sekolah untuk di beri arahan agar bisa mengerti tujuan dari bantuan ini.

c. Pemerintah memudahkan dan mendukung program kartu Indonesia pintar

Mempermudah dan mendukung dalam hal ini bagaimana implementor dalam mempermudah program kartu Indonesia pintar agar masyarakat tidak kewalahan dalam proses kartu Indonesia pintar sehingga kebijakan bisa berjalan dengan semestinya Maka Tabel ke tigabelas akan menunjukkan bahwa setiap Informan dalam program KIP tersebut melaksanakan sesuai kebijakan yang ada. Hal ini bisa dilihat dalam table berikut :

Tabel 4.14 : Pemerintah memudahkan dan mendukung program kartu Indonesia pintar

No.	Informan	pemerintah memudahkan dan mendukung program kartu Indonesia pintar
1.	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. setiap saat setiap waktu melakukan sosialisasi</li> <li>b. petunjuk perintah dari pusat kita langsung tindak lanjuti</li> </ul>
2.	Kepala Sekolah SMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mendata peserta didik bahwa sekian yang memiliki KIP baru di stor melalui dapodikmen itu salah satu jalan untuk mempermudah pemerintah untuk beasiswa tidak mampu</li> <li>b. peran serta dari masyarakat sangat membantu pemerintah untuk mempermudah pemerintah dalam menentukan pemberian beasiswa yang tidak mampu.</li> </ul>
3.	Kepala Sekolah SMP	pemerintah memudahkan tidak juga kenapa karena saya sebenarnya malas ini mengurus kenapa malas mengurus ini karena begini kasian itu guru bolak balik kesana apa toh maksudnya itu kan butuh biaya mengurus ini bolak balik BRI apa toh sementara ini kan tidak ada anggaran

4.	Kepala Sekolah SD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mendukungnya pemerintah yang mengeluarkan peraturan ini, itu artinya mempermudah</li> <li>b. mempermudahnya itu karena di serahkan langsung ke sekolah untuk memverifikasi kan</li> </ul>
5.	Orangtua SMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bekerja sama dengan dinas pendidikan provinsi untuk menyampaikan ke dinas pendidikan kabupaten</li> <li>b. pastinya melalui jalur, pemerintah menyampaikan ke dinas pendidikan kabupaten agar sekolah-selolah yang mengurus berkas siswa</li> </ul>
6.	Orangtua SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemerintah meminta siswa selalu belajar dengan baik dan tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah</li> <li>b. KIP ini kan di tujukan untuk keluarga miskin yang ingin menyekolahkan anaknya secara gratis dan pemerintah memberikan dana KIP tiap semester.</li> </ul>
7.	Orangtua SD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. perintah dek pasti memudahkan dengan memberikan KIP tapi kembali ke instansi dinas pendidikan bagaimana caranya dia menyampaikan kesetiap sekolah yang berhak mendapatkan dana KIP</li> <li>b. meringankan beban masyarakat miskin agar anaknya tetap dapat bersekolah.</li> </ul>
8.	Siswa SMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alhamdulillah pemerintah sangat baik dengan memberikann bantuan seperti ini, siswa kurang mampu seperti saya tidak lagi memikir soal biaya.</li> <li>b. berbicara memudahkan ini sangat mudah karena sudah lama saya menunggu-nunggu kebijakan seperti ini</li> </ul>
9.	Siswa SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memudahkan itu kak dengan cara kan guru ku ji di sekolah yang urus semua terus itu berkas toh kak di kirim mi ke pusat.</li> </ul>

Hasil reduksi data 2018

Pada table 4.14 pemerintah memudahkan dan mendukung program kartu Indonesia pintar yang di lakukan oleh para informan di atas bisa dilihat dari hasil

wawancara di bawah ini, sebagaimana yang di ungkapkan oleh “Nr” salah satu orang tua siswa SD 7 matajang, yaitu :

“perintah dek pasti memudahkan dengan memberikan KIP tapi kembali ke instansi dinas pendidikan bagaimana caranya dia menyampaikan kesetiap sekolah yang berhak mendapatkan dana KIP.(Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2018)”.

Senada yang di katakana oleh orang tua siswa “Im”, yaitu :

“meringankan beban masyarakat miskin agar anaknya tetap dapat bersekolah. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di atas pemerintah dan memudahkan dengan memberikan kartu Indonesia pintar untuk meringankan beban masyarakat agar tetap bersekolah. Tapi kembali lagi bagaimana dinas menyampaikan ke setiap sekolah yang berhak mendapatkan dana kartu Indonesia pintar. Selanjutnya pernyataan di perkuat untuk pemerintah memudahkan dan mendukung program kartu Indonesia pintar kartu Indonesia pintar di SD 7 “KHS” selaku kepala sekolah, yaitu :

“Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung untuk mempermudah ini, saya kira kan mendukungnya pemerintah yang mengeluarkan peraturan ini, itu artinya mempermudah. Kemudian mempermudahnya itu karena di serahkan langsung ke sekolah untuk memverifikasi kan, tapi kalau langsung ke orangtua keanu kan agak susah kayaknya ,misalnya orangtua langsung ke dinas pendidikan atau orangtua langsung ke Bank itu agak susah, tapi kalau orangtua langsung ke sekolah itu akan mempermudah orangtua, pemerintah itu sendiri untuk penyaluran atau pengadaan KIP itu. (Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas pemerintah memudahkan dan mendukung yaitu pemerintah menyerahkan langsung ke sekolah untuk memverifikasi semua data speserta didik, agar orang tua siswa tidak susah lagi untuk berkoordinasi

dengan dinas pendidikan. tapi dinas pendidikan menyampaikan ke sekolah dan sekolah mensosialisasikan ke orangtua siswa.

Adapun pemerintah memudahkan dan mendukung kartu Indonesia pintar di SMP 1 Kabupaten Bulukumba yang di kemukakan oleh salah satu orang tua siswa

“As”, yaitu :

“pemerintah meminta siswa selalu belajar dengan baik dan tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah.(Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)”.

Senada yang di ungkapkan oleh orang tua siswa “id” yaitu :

“KIP ini kan di tujukan untuk keluarga miskin yang ingin menyekolahkan anaknya secara gratis dan pemerintah memberikan dana KIP tiap semester. (Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)”.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas untuk memudahkan dan mendukung kartu Indonesia pintar yaitu pemerintah berharap agar program ini di gunakan dengan sebaik mungkin oleh siswa dan di minta agar lebih giat dalam belajar tidak lagi memikirkan soal biaya Karen sudah ada bantuan pemerintah persemester. Selanjutnya di kemukakan oleh Kepala Sekolah SMP 1 Kabupaten Bulukumba “MHA” yaitu :

“Kalau saya liat itu pemerintah memudahkan tidak juga kenapa karena saya sebenarnya malas ini mengurusinya kenapa malas mengurusinya ini karena begini kesian itu guru bolak balik kesana apa toh maksudnya itu kan butuh biaya mengurusinya ini bolak balik BRI apa toh sementara ini kan tidak ada anggaran untuk itu jadi biasanya guru malas itu untuk apa namanya, kenapa karena biasa berapa kali bolak balik ke BRI baru ini kan anak-anak yang langsung terima sementara tidak ada dana pembeli bensinnya apa semua untuk mengurusinya itu. (Hasil wawancara pada tanggal 13 Juli 2018)”.

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah SMP 1 dalam memudahkan dan mendukung kebijakan kartu Indonesia pintar yaitu kalau soal memudahkan tidak juga karena yang mengurusinya kartu Indonesia pintar ini tidak ada dana untuk guru, guru

yang bolak balik mengurus berkas dan bolak balik ke bank tidak ada sepersen pun dana untuk mereka, makanya di sekolah SMP 1 itu malas mengurusinya.

Adapun memudahkan dan mendukung program kartu Indonesia pintar di kemukakan oleh informan “Am” salah satu orang tua siswa di SMA 8 Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“pastinya melalui jalur, pemerintah menyampaikan ke dinas pendidikan kabupaten agar sekolah-selolah yang mengurus berkas siswa (Hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2018)”.

Pendapat yang sama juga di ungkapkan oleh siswa “Fj” , yaitu :

“Alhamdulillah pemerintah sangat baik dengan memberikann bantuan seperti ini, siswa kurang mampu seperti saya tidak lagi memikir soal biaya.(Hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2018)”.

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas memudahkan dan mendukung yaitu melalui jalur pemerintah pembuat kebijakan menyampaikan ke dinas pendidikan kabupaten untuk menginformasikan ke setiap-setiap sekolah untuk mendata siswanya yang kurang mampu, dan sekolah meminta siswa agar bersungguh-sungguh belajar dan tidak memikirkan soal biaya pendidikan. Pernyataan yang lebih kuat di kemukakan oleh informan “SYD” selaku kepala sekolah SMA 8 Bulukumba, yaitu :

“untuk di sekolah itu kita sebagai pengelolah di KIP itu mendata peserta didik bahwa sekian yang memiliki KIP baru di stor melalui dapodikmen itu salah satu jalan untuk mempermudah pemerintah untuk beasiswa tidak mampu, kalau dari masyarakat tentunya yang masyarakat menyampaikan kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, atau pemerintah Lurah untuk di proses pengusulan mendapatkan KIP nya supaya dapat bantuan, artinya peran serta dari masyarakat sangat membantu pemerintah untuk mempermudah pemerintah dalam menentukan pemberian beasiswa yang tidak mampu. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2018)”.

Dari hasil wawancara di atas yaitu di sekolah pengelolaannya itu mendata peserta didik yang untuk di usul ke dapodikmen untuk mempermudah pemerintah dalam penentuan penerima kartu Indonesia pintar, masyarakat di minta untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, atau pemerintah lurah untuk dip roses pengusulan mendapatkan kartu Indonesia pintar. Pernyataan yang lebih keras di ungkapkan oleh “JWD” selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembentukan Karakter di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“Jadi begini dek toh ini itu cara kerja kita disini dek kalau misalnya ada petunjuk perintah dari pusat itu seperti ini percepatan pencairan dana toh, percepatan menginginkan ini pusat supaya ada persuratan ke sekolah makanya kami tindaklanjuti, begitu ada langsung kita tindaklanjuti apa perihalnya percepatan pencairan dana program Indonesia pintar, dasarta dari sini menindaklanjuti surat direktorat jendral pendidikan dasar dan menengah no 583/D2/TU/2018. (Hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2018)”.

Jadi dapat di simpulkan dari para informan di atas bahwa mengurangi beban orang tua dalam segi biaya pendidikan anaknya, masyarakat sangat mendukung karena memang ini yang di harapkan, dilingkungan rata-rata penduduk kurang mampu dan kebanyakan data yang di dapatkan dari tetangga-tetangga bahwa masyarakat di sekitarnya banyak yang berhak dapat bantuan. Siswa dan orangtua yang di data di beri motivasi dan dukungan dari untuk mendapatkan Kartu Indonesia pintar karena di lihat dari kondisi masyarakat yang rata-rata dari lingkungan pesisir pantai, dan Kartu Indonesia pintar ini memang di prioritaskan yang mendapat bantuan itu dari kalangan masyarakat kurang mampu yang putus sekolah bisa kembali bersekolah, Kalau sudah memenuhi syarat sebagai penerima Kartu Indonesia pintar maka di usulkan untuk mengurus surat keterangan mampu bagi yang belum punya.

d. KIP terpengaruh dengan adanya pilkada

Terpengaruh dengan adanya pilkada dalam hal ini bagaimana pemerintah dalam membuat kebijakan, apakah ada atau tidak aturan main dalam program. Maka Tabel ke empatbelas akan menunjukkan bahwa setiap Informan dalam program KIP ini dapat dijalankan sesuai dengan aturan kebijakan. Hal ini bisa dilihat dalam table berikut :

Tabel 4.15: Kartu Indonesia pintar terpengaruh dengan adanya pilkada

No.	Informan	KIP terpengaruh dengan adanya pilkada
1.	Dinas Pendidikan	Tidak ada hubunganya
2.	Kepala Sekolah SMA	Program Pemerintah
3.	Kepala Sekolah SMP	Tidak Ada, KIP itu ada sejak pemerintahan Jokowi
4.	Kepala Sekolah SD	langsung ke aplikasi dapodik
5.	Orangtua SMA	Tidak ada hubunganya
6.	Orangtua SMP	Tidak ada hubunganya
7.	Orangtua SD	Tidak ada hubunganya
8.	Siswa SMA	Tidak ada hubunganya
9.	Siswa SMP	Tidak ada hubunganya

Hasil reduksi data 2018

Pada table 4.15 program kartu Indonesia pintar terpengaruh dengan adanya pilkada yang di lakukan oleh para informan di atas bisa dilihat dari hasil wawancara di bawah ini, sebagaimana yang di ungkapkan oleh “Nd” salah satu orang tua siswa SD 7 matajang, yaitu :

“tidak ada pengaruhnya sama yang itu karena ini memang kebijakan dari pemerintah. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.

Senada yang di katakana oleh orang tua siswa “Im” yaitu :

“lain tongji juga itu pilkada. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diatas yaitu kebijakan kartu Indonesia pintar tidak ada hubungannya dengan pilkada, kebijakan ini murni dari pemerintah untuk membantu siswa yang kurang mampu agar dapat bersekolah dengan baik. Adapun pernyataan yang di kemukakan oleh “KHS” selaku kepala sekolah di SD 7, yaitu :

“Tidak, karena jauh-jauh sebelumnya kan KIP ini sudah ada dari tahun 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, intinya belum jauh-jauh sebelumnya belum ada istilah bahwa mau di adakan pilkada atau apa tidak ada hubungannya. Ini kan langsung ke aplikasi dapodik jadi tidak ada hubungannya ke pilkada apalagi yang macam-macam tentang politik, tidak ada. Menurut saya.(Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)”.

Dari hasil wawancara dengan informan diatas yaitu kebijakan kartu Indonesia pintar tidak ada hubungan dengan pilkada Karena kebijakan ini sudah ada sejak 2 tahun yang lalu dan langsung dari ke aplikasi dapodik tidak ada campur tangan dengan orang-orang dalam pemilihan. Adapun kartu Indonesia pintar terpengaruh dengan adanya pilkada di SMP 1 Kabupaten Bulukumba yang di kemukakan oleh salah satu orang tua siswa “As”, yaitu :

“kalau yang itu wallahualam di belakangnya tapi yang namanya kalau kebijakan dengan niat yang baik memang untuk membantu masyarakat khususnya yang layak itu bagus, walaupun ada iming-iming politik, ada hubungannya dengan politik di belakangnya itu kita bisa pastikan juga namanya juga segala sesuatunya dari niat. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Agustus 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu berpengaruh atau tidaknya dengan pilkada itu wallahualam, Karena kebijakan ini di buat hanya karena untuk membantu

masyarakat yang kurang mampu, dan jika ada hubungannya dengan politik itu bisa di pastikan karena segala sesuatu dari niat. Senada dengan yang di ungkapkan oleh orang tua siswa “DI” yaitu : tidak ada hubungannya. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2018)”. Di dukung juga dengan pernyataan yang di ungkapkan oleh siswa “Ba” yaitu :

“tidak ada pengaruhnya.(Hasil wawancara pada tanggal 20 juli 2018)”.

Selanjutnya pernyataan di kemukakan oleh informan “MHA” selaku kepala sekolah SMP 1 Bulukumba :

“Tidak, kalau saya tidak, tidak tau kalau yang lain. Karena saya juga tidak tau prosesnya jangan sampai misalnya diluar ada karena anaknya ini ini pendukungnya mungkin dia urus di pusat apa supaya namanya bisa masuk, setahu saya tidak tau kerana saya juga tidak tau alurnya seperti apa. Tapi setahu saya tidak ada, KIP itu ada sejak pemerintahan Jokowi.(Hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu pengaruh kebijakan kartu Indonesia pintar dengan pilkada tidak ada karena kartu Indonesia pintar ada sejak pemerintahan jokowi, tapi tidak tau untuk yang lain prosesnya sepeti apa mungkin dia urus di pusat supaya nama anaknya terdaftar. Selanjutnya kartu Indonesia pintar terpengaruh dengan adanya pilkada di SMA 8 Kabupaten Bulukumba yang di kemukakan oleh salah satu orang tua siswa “Nu”, yaitu :

“sepertinya tidak ada hubungannya antara pilkada dengan KIP. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”.

Senada yang di katakan oleh orang tua siswa “Sm” yaitu :

“tidak ada hubungannya. (Hasil wawancara pada tanggal 20 juli 2018)”.

hasil wawancara dengan para informan di atas yaitu kebijakan kartu Indonesia pintar tidak ada hubungannya dengan pilkada, orang tua siswa memang di data oleh guru di sekolah tidak ada campur tangan orang lain. Di dukung juga dengan yang di

ungkapkan oleh orang tua siswa “MI” yaitu : tidak adaji pengarnya itu dek. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Agustus 2018)”. Selanjutnya di kemukakan oleh informan “SYD” Kepala sekolah SMA 8 Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“Tidak ada, itukan memang program pemerintah.(Hasil wawancara pada tanggal 2 Juli 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu bahwa tidak adanya pengaruh pilkada dengan program pemerintah.Program ini di buat atas dasar banyaknya siswa yang putus sekolah kembali bersekolah.Banyakya orang tua yang tidak sanggup dengan biaya pendidikan anaknya. Pernyataan yang lebih kuat juga di sampaikan oleh “JWD” selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembentukan Karakter di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, yaitu :

“Kan begini dek, logika berfikirnya begini inikan kartu sudah lama, yang bisa di prediksi ada hal-hal seperti itu kalau baru sekarang mau di bagi itu kartu, tapi inikan sudah lamami dia mau bagaimana.Namun saya sampaikani toh ini tolong di catat ada memang namanya kuota untuk anggota dewan usulan orang yang pem angku kepentingan.(Hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2018)”.

Dari hasil wawancara dengan informan di atas yaitu kartu Indonesia pintar sudah lama, tidak ada pengaruhnya dengan pilkada.Namun ada aturan main anggota dewan dengan pemangku kepentingan.Kartu Indonesia pintar tidak real bahwa hanya untuk siswa yang kurang mampu tapi ada juga kuota untuk anak anggota dewan.

Dari hasil penelitian di atas di simpulkan bahwa Environmental Factors, Pengaruh eksternal dalam program kartu Indonesia pintar di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut : setiap jawaban informan berbeda ada yang mengatakan tidak ada pengaruh eksternal dan ada juga yang mengatakan sangat berpengaruh. Tapi lebih

banyak yang mengatakan berpengaruh karena masyarakat yang mendapatkan bantuan dari keluarga yang kurang mampu, dengan adanya bantuan ini mereka sudah bisa membiayai pendidikan anak mereka. a) lingkungan mempengaruhi dari perspektif budayanya terhadap jalannya kartu Indonesia pintar di Kabupaten Bulukumba yaitu mengurangi beban orang tua dalam segi biaya pendidikan anaknya, masyarakat sangat mendukung karena memang ini yang di harapkan, Kartu Indonesia pintar karena di lihat dari kondisi masyarakat yang rata-rata dari lingkungan pesisir pantai, dan Kartu Indonesia pintar ini memang di prioritaskan yang mendapat bantuan itu dari kalangan masyarakat kurang mampu yang putus sekolah bisa kembali bersekolah, Kalau sudah memenuhi syarat sebagai penerima Kartu Indonesia pintar maka di usulkan untuk mengurus surat keterangan mampu bagi yang belum punya. Karena masih ada beberapa persen tidak tepat sasaran. b) masyarakat menerima program kartu Indonesia pintar di Kabupaten Bulukumba yaitu kebijakan kartu Indonesia pintar di peruntukkan untuk siswa yang kurang mampu, siswa yang sekolah SD, SMP, SMA bisa menerima bantuan. Siswa yang kurang mampu yang mendapatkan dana membelanjakan uangnya dengan baik sesuai arahan dari sekolah bahwa dana tersebut harus tepat sasaran. Sekolah mengundang orangtua ke sekolah untuk di beri arahan agar bisa mengerti tujuan dari bantuan ini. c) pemerintah memudahkan dan mendukung program kartu Indonesia pintar di Kabupaten Bulukumba yaitu mengurangi beban orang tua dalam segi biaya pendidikan anaknya, masyarakat sangat mendukung karena memang ini yang di harapkan, Siswa dan orangtua yang di data di beri motivasi dan dukungan dari untuk mendapatkan Kartu

Indonesia pintar karena di lihat dari kondisi masyarakat yang rata-rata dari lingkungan pesisir pantai, dan Kartu Indonesia pintar ini memang di prioritaskan yang mendapat bantuan itu dari kalangan masyarakat kurang mampu yang putus sekolah bisa kembali bersekolah, Kalau sudah memenuhi syarat sebagai penerima Kartu Indonesia pintar maka di usulkan untuk mengurus surat keterangan mampu bagi yang belum punya. d) kartu Indonesia pintar sudah lama, tidak ada pengaruhnya dengan pilkada. Namun ada aturan main anggota dewan dengan pemangku kepentingan. Kartu Indonesia pintar tidak real bahwa hanya untuk siswa yang kurang mampu tapi ada juga kuota untuk anak anggota dewan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya bahwa peneliti berfokus pada implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di kabupaten bulukumba maka dapat di simpulkan bahwa :

1. Idealized Policy dalam implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di kabupaten bulukumba: a) Proses kartu Indonesia pintar di Kabupaten Bulukumba tidak sesuai prosedur yang telah di sampaikan oleh dinas pendidikan Persyaratan yang telah di tetapkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan di lapangan. b) Mendorong pemerintah dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Bulukumba yaitu sangat baik karena siswa yang telah mengumpulkan berkas di sekolah orang tuanya di undang kesekolah untuk melakukan sosialisasi. Keterlibatan kepala sekolah dan guru-guru sangat baik. c) mempengaruhi kebijakan Kartu Indonesia Pintar Kabupaten Bulukumba yaitu apapun perintah dari pusat dinas pendidikan hanya menjalankan. d) Merangsang target grup untuk melaksanakan Kartu Indonesia Pintar Kabupaten Bulukumba yaitu berharap agar para siswa yang menerima bantuan agar membelanjakan uang dengan semestinya.
2. Target grup dalam implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di kabupaten bulukumba sebagai berikut : a) Menentukan target grup yang berhak mendapat Kartu Indonesia pintar yaitu melalui perekrutan, perekrutan

itu harus mengadakan sidang rapat-rapat kecil bersama guru-guru. b) Mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang di harapkan oleh perumus kebijakan kartu Indonesia pintar di Kabupaten Bulukumba yaitu mengadopsi dari aturan-aturan dari atas sekolah tidak menambah dan mengurangi hanya melakukan sosialisasi apa yang ada dan aturan apa yang telah di tetapkan. c) Menyesuaikan pola-pola perilaku pemerintah terhadap kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Bulukumba yaitu dengan mengambil kebijakan lain karena aturan harus yang memiliki KPS yang menerima tapi masih ada siswa yang tidak memiliki KPS jadi siswa di beri keluasaan untuk memperoleh surat keterangan tidak mampu.

3. Implementing organization dalam implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di kabupaten bulukumba sebagai berikut: a) yang melaksanakan dan yang terlibat dalam kartu Indonesia pintar yaitu mekanisme pemberian kartu Indonesia pintar untuk SD, SMP, SMA itu berbeda. b) Badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di Kabupaten Bulukumba yaitu yang bertanggung jawab semua pihak mulai dari Pemerintah, Dinas Pendidikan, dan Sekolah, bank penyalur untuk SD dan SMP bank BRI untuk SMA bank BNI.
4. Environmental Factors dalam implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di kabupaten bulukumba sebagai berikut: a) Pengaruh eksternal dalam program kartu Indonesia pintar di Kabupaten Bulukumba yaitu setiap jawaban

informan berbeda ada yang mengatakan tidak ada pengaruh eksternal dan ada juga yang mengatakan sangat berpengaruh. b) lingkungan mempengaruhi dari perspektif budayanya terhadap jalannya kartu Indonesia pintar di Kabupaten Bulukumba yaitu mengurangi beban orang tua dalam segi biaya pendidikan anaknya, masyarakat sangat mendukung Kartu Indonesia pintar karena di lihat dari kondisi masyarakat yang rata-rata dari lingkungan pesisir pantai dan masih ada beberapa persen tidak tepatsasaran. c) masyarakat menerima program kartu Indonesia pintar di Kabupaten Bulukumba yaitu kebijakan kartu Indonesia pintar di peruntukkan untuk siswa yang kurang mampu, siswa yang sekolah SD, SMP, SMA bisa menerima bantuan. d) pemerintah memudahkan dan mendukung program kartu Indonesia pintar di Kabupaten Bulukumba yaitu mengurangi beban orang tua dalam segi biaya pendidikan anaknya, Siswa dan orang tua yang di data di berimotivasi dan dukungan dari untuk mendapatkan Kartu Indonesia pintar. e) Kartu Indonesia pintar terpengaruh dengan adanya pilkada di kabupaten bulukumba yaitu kartu Indonesia pintar sudah lama, tidak ada pengaruhnya dengan pilkada. Namun ada aturan main anggota dewan dengan pemangku kepentingan.

## **B. Saran**

1. Seharusnya pemberian kartu Indonesia pintar mengikuti persyaratan dan prosedur yang telah di tetapkan
2. Tidak Menambah aturan dari aturan yang telah di buat.
3. Pemerintah harus lebih maksimal dalam pembagian kartu Indonesia pintar.

4. Harus Merata pembagian bantuan Kartu Indonesia pintar
5. Pemerintah harus lebih fokus kesiswa yang kurang mampu
6. Sebaiknya dinas pendidikan dan sekolah lebih memperhatikan siswa yang berhak mendapatkan kartu Indonesia pintar.
7. Sebaiknya tidak Ada aturan main antara anggota dewan dengan pemangku kepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Indiahono Dwiyanto, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media. 2016.

Kasmad Rulinawaty, Study Implementasi Kebijakan Publik. Makassar: Kedai Aksara. 2013.

Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Mutiarin, dyah dan Arif Zaenudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nugroho Riant, Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2006.

Purwanto Erwan A. Sulistyastuti Dyah R, Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gave M edia. 2012.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. bandung: Alfabeta. 2013.

Suratman, Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Makassar: Capiya Publising. 2017.

Wahab, Solihin Abdul. 2010. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.

Winarno, Drs budi. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.

### Skripsi/Jurnal

Astuti, Rini Septiani, *Implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar dalam upaya pemerataan pendidikan*. Skripsi. Yogyakarta: universitas Negri Yogyakarta. Diakses pada 4 Agustus 2017 pukul 11:47 WITA. 2016.

Sari Triana Desita, *Sikap Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kampung Lebak Manis Kelurahan Sukamaju Baru Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Diakses pada 7 Agustus 2017 Pukul 12:34 WITA. 2017.

Sartika, *Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Kota Tanjungpinang*. Jurnal. Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji. Diakses Pada 11 Oktober 2017 Pukul 17.37 WITA. 2013.

Setyani Sugiyasati Agus, *Implementasi Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar Tahun 2015/2016 Di Sma Negeri 11 Kota Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Diakses pada 11 Oktober 2017 Pukul 17.37 WITA. 2017.

Syaenab. *Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar*. Skripsi. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar. 2016.

Valentinus Ama Kepala., Laporan pelaksanaan program Indonesia pintar melalui kartu Indonesia pintar, *Jurnal*. (<http://eprints.uny.ac.id/49788/>). 2016.

Wulansari, Milda Selviana., Evaluasi program Indonesia pintar tingkat sekolah menengah pertama negeri sekabupaten mojokerto. Skripsi. (<http://karya-ilmiah.um.ac.id/indeks.php/asp/article/view/58634>). 2016.

## B. Lain-Lain

<http://m.antarsulses.com/berita/64263>

<http://www.sapa.or.id/b1/123-pmk/7722-undang-undang-desa-00000046>

[http://psma.kemendikbud.go.id/files/permendikbud\\_tahun2016\\_Nomor019-2.pdf](http://psma.kemendikbud.go.id/files/permendikbud_tahun2016_Nomor019-2.pdf)

Makassar.tribunnews.com/2016/02/25/213-ribu-penduduk-bulukumba-masih-miskin,

(<http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1227>)

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BULUKUMBA



SEKOLAH SMAN 8 BULUKUMBA



SEKOLAH SMPN 1 BULUKUMBA



SEKOLAH SD 7 MATAJANG BULUKUMBA





## RIWAYAT HIDUP



MIFTAHUS SA'ADAH, Dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 25 April 1997. Anak Tunggal dari pasangan Bapak Sabri Jafar dan Ibu Miraya. Peneliti menyelesaikan pendidikan di SD 171 Loka dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun ini juga peneliti melanjutkan pendidikan SMP Negeri 2 Bulukumba dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun 2011 peneliti kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri Bulukumba dan selesai Pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan yang lebih tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2018.